

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI  
PELATIHAN INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH-BUAHAN  
BERBASIS MANAJEMEN AGROWISATA DI DESA  
WARINGINSARI KECAMATAN LANGENSARI  
KOTA BANJAR**

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Mendapatkan Bantuan Dana dari DIPA-BOPTN  
UIN SGD Bandung Tahun Anggaran 2018  
Sesuai dengan Kontrak Nomor: B-296.08/Un.05/V.2/PP.00.9/05/2018**

**KATEGORI:**

**Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Desa Mitra Kampus**



**Tim Penyusun:**

**Ketua : Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag  
NIP. 197411062005011006  
Anggota 1 : Widiawati, S.Pd, M.M.  
NIP. 198105032015032003  
Anggota 2 : Azis Surono  
NIM. 1143070037**

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
TAHUN 2018**

## ABSTRAK

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dilatarbelakangi temuan awal selama membimbing KKN SISDAMAS UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada pertengahan 2016, tepatnya di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Sebagian besar masyarakat di desa ini karena mereka sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani agrowisata, terutama buah-buahan seperti mangga, papaya, jambu air, nanas, dan sebagainya. Fakta di lapangan menunjukkan belum meratanya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan bahkan ada yang masuk kategori keluarga pra sejahtera. Di bidang ekonomi, masyarakat di Desa Waringinsari dapat dikatakan masuk dalam kategori masyarakat cukup sejahtera, meskipun secara makro tingkat kesejahteraan tersebut belum merata. Namun hasil identifikasi di lapangan diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah kesulitan mengolah dan memasarkan hasil pertanian buah-buahan.

Tujuan khusus program PKM ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendampingan dan asistensi (*supervision*) berupa pelatihan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil komoditas pertanian agar dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan tujuan umum program PKM ini adalah ***Menjadikan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari sebagai Pilot Project Sentra Pengembangan Komoditas Unggulan Agroindustri di Kota Banjar.***

Program ini dilaksanakan dengan menggunakan kombinasi metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)* dan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, yang mana masyarakat desa dilibatkan secara langsung untuk memainkan peran yang lebih besar dalam pengumpulan informasi, analisis data, dan pengembangan intervensi, seperti pada program-program pengembangan ekonomi masyarakat yang didasarkan kepada pengertian dan pemahaman terhadap program secara keseluruhan.

Mengacu kepada program PKM yang telah dilaksanakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kalangan petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar terbukti belum memiliki perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi bisnis yang baik, terutama dalam mengolah, mengemas, dan memasarkan hasil pertaniannya. Mereka masih berusaha sendiri-sendiri, tidak memiliki kelompok usaha, belum memiliki rumah produksi, hasil olahan buah-buahan mereka belum diuji dan memiliki sertifikasi halal, belum memiliki izin usaha dan sertifikat merek dagang, dan belum terjalin kemitraan usaha dengan pelaku usaha besar dalam pemasaran komoditasnya. Implikasinya adalah pemasaran komoditas hasil pengolahan buah-buahan menjadi kurang maksimal, sehingga belum berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonominya. Rekomendasi dan tindak lanjut dari program PKM ini adalah LP2M UIN Sunan Gunung Djati perlu memberikan program pendampingan kepada para petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar dalam pembentukan kelompok usaha, rancang bangun rumah produksi, pengurusan legalisasi izin produksi dan sertifikasi halal, uji laboratorium, desain merek dagang, dan jaringan pasar. Hasilnya adalah ***Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Menjadi Sentra Komoditas Unggulan Agroindustri di Kota Banjar.***

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Laporan Kegiatan PKM ini adalah asli dan belum pernah diajukan sebagai Laporan Kegiatan PKM pada lembaga lainnya, baik di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Laporan Kegiatan PKM ini murni merupakan gagasan, rumusan, dan hasil kegiatan di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang dilakukan dengan tanpa bantuan pihak lain;
3. Dalam Laporan Kegiatan PKM ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali karya tulis yang secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan hak atas karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandung, 18 Agustus 2018  
Ketua Tim Pokja PKM,

**Dr. Deni K. Yusup, M.Ag.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	a
ب	b
ت	t
ث	ts
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	dz
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	sh
ض	dh

ط	th
ظ	zh
ع	'
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	'
ي	y
ة	t/h

Untuk Madd dan Diftong

آ	a panjang	ā
إِي	i panjang	ī
أُو	u panjang	ū
أُو	diftong	au
أَيَّ	diftong	ai

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan segala kuasa dan iradah-Nya, serta dengan segala taufiq dan hidayah-Nya, alhamdulillah peneliti dengan susah payah mampu menyelesaikan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan dan membawa ajaran mulia bagi penulis pada khususnya dan semua umat pada umumnya.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dilatarbelakangi temuan awal selama menjadi membimbing KKN SISDAMAS UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tepatnya di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Sebagian besar masyarakat di desa ini karena mereka sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani agrowisata, terutama buah-buahan seperti mangga, papaya, jambu air, nanas, dan sebagainya. Fakta di lapangan menunjukkan belum meratanya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan bahkan ada yang masuk kategori keluarga pra sejahtera. Di bidang ekonomi, masyarakat di Desa Waringinsari dapat dikatakan masuk dalam kategori masyarakat cukup sejahtera, meskipun secara makro tingkat kesejahteraan tersebut belum merata.

Tujuan program PKM ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendampingan dan asistensi (*supervision*) berupa pelatihan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil komoditas pertanian agar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan tujuan umum program PKM ini adalah ***Menjadikan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari sebagai Pilot Project Sentra Pengembangan Komoditas Unggulan Agroindustri di Kota Banjar.***

Melalui penerapan metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)* dan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, penulis menyimpulkan bahwa

kalangan petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar terbukti belum memiliki perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi bisnis yang baik, terutama dalam mengolah, mengemas, dan memasarkan hasil pertaniannya. Mereka masih berusaha sendiri-sendiri, tidak memiliki kelompok usaha, belum memiliki rumah produksi, hasil olahan buah-buahan mereka belum diuji dan memiliki sertifikasi halal, belum memiliki izin usaha dan sertifikat merek dagang, dan belum terjalin kemitraan usaha dengan pelaku usaha besar dalam pemasaran komoditasnya. Implikasinya adalah pemasaran komoditas hasil pengolahan buah-buahan menjadi kurang maksimal, sehingga perlu diberikan pelatihan agar hasil pertanian mereka berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonominya.

Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak, baik dosen, teman sejawat, lembaga atau institusi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga selesainya laporan kegiatan PKM. Secara khusus, rasa terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Prof. Dr. H. M. Anton Athoillah, M.M selaku Tim Penelaah Laporan Kegiatan PKM ini;
3. Dr. Munir, MA selaku Ketua LP2M dan Dr. H. Ramdani Wahyu Sururi, M.Ag, M.Si selaku Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang banyak membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKM;
4. Dr. Engkos Kosasih, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial dan P3A Kota Banjar, Ika Kartikawati, S.IP., M.Si selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Sosial dan P3A Kota Banjar, serta Lukita Dwi Purnamasari, S.Sos selaku Kepala Seksi Peningkatan

Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial dan P3A Kota Banjar yang banyak membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKM UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

5. Camat Langensari, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Waringinsari, Kepala Dusun, Ketua-ketua RW, dan Ibu-ibu Petani Buah-buahan, yang turut terlibat aktif berpartisipasi dalam kegiatan PKM UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Azis Suroho dan Aqmari Fitriani keduanya merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang turut terlibat dalam melaksanakan tugas PKM di Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, serta semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan PKM ini.

Pada akhirnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal atas segala kebaikan dan pertolongannya bagi peneliti. Besar harapan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Islam. *Amiin ya robbal 'alamiin...*

Bandung, 18 Agustus 2018  
Ketua Tim Pokja PKM,

**Dr. Deni K. Yusup, M.Ag.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Analisis Situasi .....	1
B. Khalayak Sasaran .....	4
C. Identifikasi Masalah .....	6
D. Tujuan Kegiatan .....	7
E. Manfaat Kegiatan .....	8
F. Kerangka Pemecahan Masalah .....	8
G. Metodologi dan Desain Kegiatan .....	9
H. Rancangan Evaluasi/Alat Ukur Keberhasilan Program .	15
I. Rencana dan Agenda Kegiatan .....	17
J. Organisasi/Pelaksana Kegiatan .....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN EKONOMI, DAN PELATIHAN MANAJEMEN INDUSTRI HASIL PERTANIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Pengabdian Masyarakat .....	19
1. Pengertian Pengabdian Masyarakat .....	19
2. Landasan Pengabdian Masyarakat .....	24
3. Metode Pengabdian Masyarakat .....	28
4. Bentuk-bentuk Pengabdian Masyarakat .....	35
5. Manfaat Pegabdian Masyarakat .....	36



B. Pemberdayaan Ekonomi .....	37
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi .....	37
2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Ekonomi .....	39
3. Tantangan Pemberdayaan Ekonomi .....	44
4. Strategi Pemberdayaan Ekonomi .....	47
5. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi .....	50
C. Pelatihan Manajemen Industri Hasil Pertanian .....	52
1. Pengertian Pelatihan Manajemen Industri .....	52
2. Ruang Lingkup Pelatihan Manajemen Industri .....	58
3. Bentuk-bentuk Pelatihan Manajemen Industri .....	63
4. Pola Pelatihan Manajemen Industri Hasil Pertanian .	69
5. Tujuan Pelatihan Manajemen Industri Hasil Perta- nian .....	75
<b>BAB III KONDISI OBYEKTIF MASYARAKAT DESA WARI- NGINSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR .....</b>	<b>79</b>
A. Sejarah Singkat .....	79
B. Kondisi Alam/Geografi .....	82
C. Kondisi Monografi .....	85
D. Kondisi Sosial Budaya .....	90
E. Kondisi Ekonomi .....	95
<b>BAB IV HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>99</b>
A. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Buah-Buahan kepada Kelompok Tani di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar .....	99
B. Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Buah-	

Buahan Kepada Kelompok Petani Buah-Buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar .....	111
C. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Buah- Buahan Kepada Kelompok Tani di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar .....	124
D. Pengawasan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Buah-Buahan Kepada Kelompok Tani di Desa Wari- nginsari Kecamatan Langensari Kota Banjar .....	139
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>152</b>
A. Kesimpulan .....	152
B. Saran/Rekomendasi .....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>155</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Analisis Situasi**

Desa Waringinsari merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Langensari Kota Banjar. Dalam struktur Pemerintah Desa dikenal dengan istilah “Dusun”, sedangkan dalam struktur Pemerintahan Kelurahan di Kota Banjar dikenal dengan istilah “Lingkungan”. Kecamatan ini mencakup enam desa: Langensari, Muktisari, Waringinsari, Rejasari, Bojongkantong, dan Kujangsari. Di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Wanareja provinsi Jawa Tengah yang dipisahkan/dibatasi sungai Citanduy, sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis, sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Pataruman kota Banjar..

Pusatnya berada di Desa Langensari yang secara geografis memiliki posisi yang berada di antara 108°37'22,08"- 108°38'13,92"BT dan 7°20'51,36"- 7°22'9,12" LS terletak dibagian Timur wilayah Kota Banjar dengan luas wilayah Desa Langensari adalah 497,241 Hektar. Secara topografis sebagian besar wilayah Desa Langensari termasuk dataran rendah. Kedudukan atau jarak dari ibukota Kecamatan sekitar 40 m, ibukota Kota Banjar 12 km, ibukota Provinsi (Bandung) sekitar ± 126 km dan dari ibukota negara (Jakarta) berjarak sekitar ± 336 km. Adapun batas wilayah Desa Langensari adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Sebelah Barat berbatasan Desa Rejasari Kecamatan Langensari Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Sebelah Selatan : Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari.

Obyek utama kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 ini akan dilaksanakan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Alasan utama memilih Desa Waringinsari adalah sebagian besar masyarakat di desa ini karena mereka sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani agrowisata, terutama buah-buahan seperti mangga, papaya, jambu air, nanas, dan sebagainya. Fakta di lapangan menunjukkan belum meratanya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan bahkan ada yang masuk kategori keluarga pra sejahtera.

Di bidang ekonomi, masyarakat di Desa Waringinsari dapat dikatakan masuk dalam kategori masyarakat cukup sejahtera, meskipun secara makro tingkat kesejahteraan tersebut belum merata. Berdasarkan identifikasi awal di lapangan diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Waringinsari Kecamatan Langensari adalah menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan KKN SISDAMAS UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, antara lain:

1. Bidang Sosial dan Ekonomi

Desa Waringinsari sejak dulu dikatakan sebagai sentra penghasil produksi pertanian unggulan. Seperti lumbungnya padi, berbagai macam tanaman palawija, penghasil gula merah kelapa, dan sekarang ditambah Papaya California. Bahkan, atas potensi pertanian tersebut, masyarakat desanya bisa hidup makmur dan pendapatannya terus meningkat. Terlebih dari hasil produksi buah Papaya California yang begitu pesat permintaannya di luar kota, sebab papaya yang ditanam di Waringinwasri berkualitas paling baik.

Selain itu, guna menunjang produksi pertanian dan perekonomian, kami melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti *lening tersier*, kirmir jalan, pengaspalan dan perbaikan jalan. Pada tahun 2015, telah dibangun lebih banyak membangun kirmir jalan di 4 dusun yang ada, diantaranya di Dusun Sukanegara, Kedungwaringin, Purwodadi dan Dusun Sukarahayu. Sedangkan untuk pengaspalan jalan hanya akan dilaksanakan di Dusun Kedungwaringin.

## 2. Bidang Pemerintahan dan Lingkungan

Sementara, untuk pengerjaan pembangunan lainnya, seperti bidang pemerintahan, salah satunya akan melaksanakan penataan ruang kantor desa, termasuk ruangan untuk kelembagaan di desanya, serta pembangunan bidang sosial budaya dan ekonomi. Pihak Pemdes Waringinsari juga merencanakan membangun GOR di atas lahan asset desa yang lokasinya berada di belakang kantor Desa Waringinsari. Kondisi saat ini tanah tersebut masih ada bangunan rumah yang dulu dibangun untuk kepentingan petugas Babinsa dan bidan desa.

Untuk kepentingan pembangunan GOR, maka bangunan rumah tersebut akan dipugar. GOR dibuat untuk kepentingan acara rapat desa atau acara-acara besar lainnya, termasuk bisa digunakan untuk kegiatan olah raga dan bisa dimanfaatkan oleh Karang Taruna. Pelaksanaannya dianggarkan melalui lembaga desa yang dilakukan secara bertahap sambil menunggu anggaran penuh, khusus alokasi rencana buat pembangunan GOR.

## 3. Bidang Pendidikan dan Keagamaan

Masalah pendidikan yang paling menonjol adalah kurangnya instansi sekolah seperti SMP dan SMA/SMK sehingga para remaja di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Selain itu masih rendahnya minat baca dan belajar dari anak-anak dan masyarakat sehingga salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana

dengan memberdayakan bimbingan belajar yang disertai dengan pengelolaan yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan.

Kondisi obyektif di atas, ditemukan fenomena bahwa persoalan yang paling mendasar adalah belum meratanya tingkat kesejahteraan ekonomi. Padahal apabila dilihat dari segi potensi alam dan potensi ekonomi di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai “Kawasan Agrowisata”. Faktor masih minimnya perhatian pemerintah, kurang optimalnya pengembangan sumber daya manusia, dan kurang optimalnya pengembangan potensi alam sebagai sumber daya ekonomi menjadikan Desa Waringinsari belum mampu menjadi wilayah kelurahan yang memiliki keunggulan sehingga belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu rekomendasi penting hasil temuan lapangan selama pelaksanaan KKN SISDAMAS UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2018 ini adalah perlu dikembangkannya program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan industri buah-buahan berbasis manajemen agrowisata di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

## **B. Khalayak Sasaran**

Sasaran utama program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kalangan kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar yang belum pernah mendapatkan bantuan pendampingan pelatihan. Alasan utama pemilihan khalayak dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018 ini adalah:

1. Kebanyakan kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar masih melakukan aktifitas usaha

secara individu dan belum tergabung dalam “Kelompok Usaha” atau “Asosiasi Bisnis”, sehingga mereka perlu dibina baik dari *business skill* maupun permodalan untuk meningkatkan kemampuan bisnisnya;

2. Kebanyakan kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan dalam bidang manajemen bisnis, sehingga mereka belum memiliki “produk unggulan” serta berorientasi pada “peluasan segmentasi pasar”;
3. Kebanyakan kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar ternyata belum pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari sejumlah instansi terkait.

Melalui ketiga alasan tersebut, kami berpendapat bahwa kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar menjadi prioritas utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini karena:

1. Wirausaha sudah merupakan kegiatan rutin dan sekaligus mata pencaharian utama, yang dapat mempercepat terjalinnya kemitraan bisnis dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara masif dan massal;
2. Wirausaha merupakan kegiatan bisnis yang sudah berjalan, namun belum mendapatkan prioritas utama sebagai ujung tombak kegiatan ekonomi, yang sebenarnya dapat memberikan sumbangan cukup besar bagi Peningkatan Asli Daerah (PAD);
3. Wirausaha dapat dikembangkan menjadi berbagai kegiatan bisnis yang bersifat kolektif dan dihimpun ke dalam berbagai kelompok usaha dan asosiasi bisnis, sehingga dapat menyerap “lapangan kerja baru” dalam jumlah besar untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi.

### **C. Identifikasi Masalah**

Mengacu kepada latar belakang dan kondisi obyektif khalayak yang menjadi sasaran di lapangan diketahui bahwa ada banyak faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Di satu sisi, secara internal mereka memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, namun tampaknya belum tereksplorasi dengan baik dan diberdayakan secara maksimal, sehingga kesejahteraan ekonominya pun menjadi tidak merata dan hanya di kalangan kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

Di sisi lain, secara eksternal mereka juga dihadapkan kepada tantangan persaingan ekonomi yang lebih besar dan belum mampu meningkatkan daya saing usaha, sehingga tingkat kesejahteraan ekonominya pun menjadi tidak seimbang dan hanya dapat diakses oleh sebagian kecil petani saja. Padahal apabila semua potensi ekonomi tersebut dikelola dan dikembangkan secara optimal sudah barang tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dirumuskanlah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka konseptual program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah-buahan kepada kelompok tani di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar?
2. Bagaimana kerangka operasional bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah-buahan kepada kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar?
3. Bagaimana mengatasi kendala dan strategi pemecahan masalah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi



masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah-buahan kepada kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar?

4. Bagaimana mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah-buahan kepada kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar?

#### **D. Tujuan Kegiatan**

Mengacu kepada identifikasi masalah di atas, program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini antara lain:

1. Merumuskan kerangka konseptual program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah-buahan kepada kelompok tani di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
2. Merumuskan kerangka operasional bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah-buahan kepada kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
3. Merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk mengatasi kendala dan strategi pemecahan masalah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah-buahan kepada kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
4. Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah-buahan kepada kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

## **E. Manfaat Kegiatan**

Program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

### **1. Manfaat Akademik**

Secara akademik, terumuskan kerangka konseptual dan operasional sebuah model program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah-buahan kepada kelompok petani buah-buahan berbasis manajemen agrowisata di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.

### **2. Manfaat Praktik**

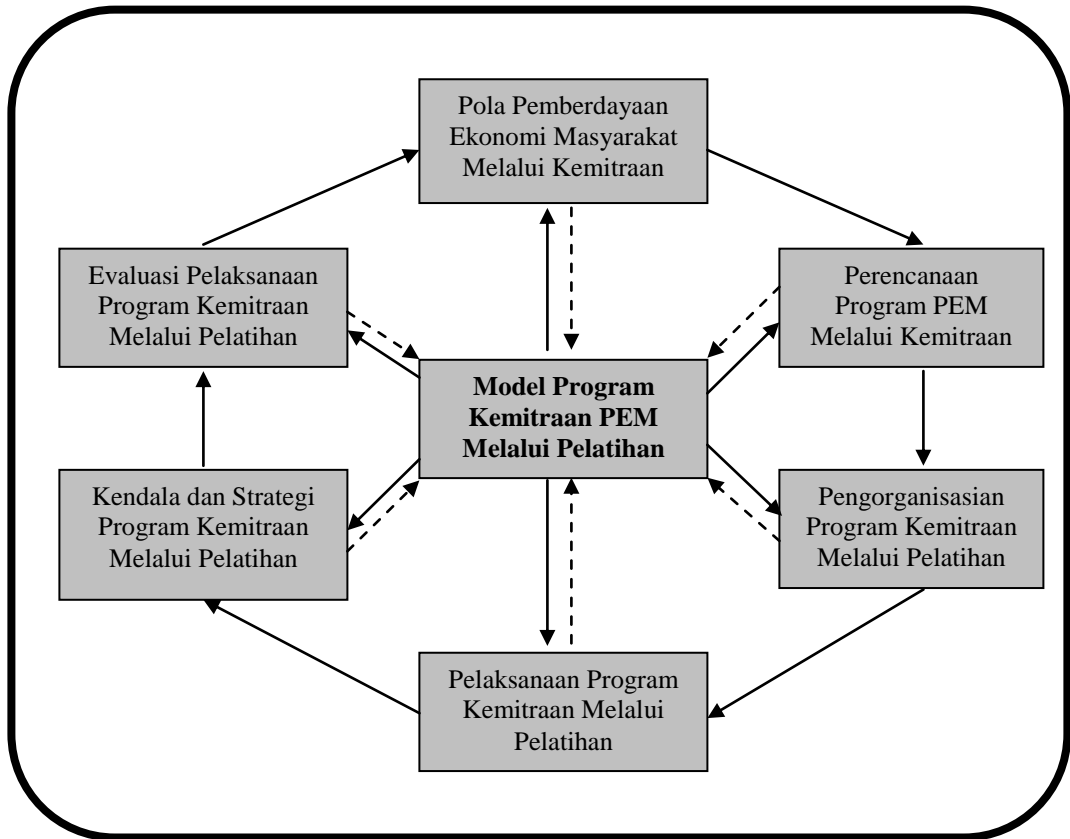
Secara praktis, Perguruan Tinggi turut memberikan kontribusi dalam merumuskan model program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah-buahan kepada kelompok petani buah-buahan berbasis manajemen agrowisata di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, yang dapat dijadikan rujukan untuk kegiatan sejenis di berbagai daerah lainnya, khususnya di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat.

## **F. Kerangka Pemecahan Masalah**

Untuk merumuskan kerangka konseptual dan operasional program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah-buahan kepada kelompok petani buah-buahan berbasis manajemen agrowisata di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar yang dikembangkan di Perguruan Tinggi digunakan analisis kritis pemecahan masalah dengan pendekatan ilmiah (*critical scientific thinking method*), baik secara interdisipliner maupun multidisipliner. Hal tersebut diilustrasikan ke dalam peta konsep atau kerangka pemecahan masalah seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

Peta Konsep/Kerangka Pemecahan Masalah



**Keterangan:**

↔ : Proses manajemen kegiatan PKM

↑↓ : Pola hubungan langsung manajemen kegiatan PKM

↕ : Pola hubungan bolak-balik manajemen kegiatan PKM

**G. Metodologi dan Desain Kegiatan**

Program kegiatan kemitraan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan bisnis ini menggunakan dua metode, yaitu:

**1. Rapid Rural Appraisal (RRA)**

RRA (*Rapid Rural Appraisal*) merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktek, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan

oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Meskipun sering dikatakan sebagai teknik penelitian yang “*cepat dan kasar/kotor*” tetapi RRA dinilai masih lebih baik dibanding teknik-teknik kuantitatif klasik.

Metode RRA juga digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan perdesaan harus diambil segera. Dewasa ini banyak program pembangunan yang dilaksanakan sebelum adanya kegiatan pengumpulan semua informasi di daerah sasaran. Konsekuensinya, banyak program pembangunan yang gagal atau tidak dapat diterima oleh kelompok sasaran meskipun program-program tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan secara matang, karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penyusunan prioritas dan pemecahan masalahnya.

Pada dasarnya, metode RRA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multidisiplin, menggunakan sejumlah metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi perdesaan. Cara kerja tersebut tersebut dipusatkan pada pemahaman pada tingkat komunitas lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.

Komunikasi dan kerjasama diantara masyarakat desa dan aparat perencana dan pelaksana pembangunan (*development agent*) adalah sangat penting, dalam kerangka untuk memahami masalah-masalah di perdesaan. Di samping itu, metode RRA juga berguna dalam memonitor kecenderungan perubahan-perubahan di perdesaan untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi di lapangan dan mengusulkan penyelesaian masalah yang memungkinkan.

Menurut Beebe James (1995), metode RRA menyajikan pengamatan yang dipercepat yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat atau peneliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengamatan kualitatif bagi keperluan pembuat keputusan untuk menentukan perlu tidaknya penelitian tambahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Metode RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu; (a) perspektif sistem, (b) triangulasi dari pengumpulan data, dan (c) pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (*iterative*).

Sebagai suatu teknik penilaian, RRA menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari:

- a. Review/telaahan data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapang secara ringkas.
- b. Oservasi/pengamatan lapang secara langsung.
- c. Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya.
- d. Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik.
- e. Studi kasus, sejarah lokal, dan biografi.
- f. Kecenderungan-kecenderungan.
- g. Pembuatan kuesioner sederhana yang singkat.
- h. Pembuatan laporan lapang secara cepat.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam metode RRA, yaitu:

- a. *Efektivitas dan efisiensi*, kaitannya dengan biaya, waktu, dengan perolehan informasi yang dapat dipercaya yang dapat digunakan dibanding sekadar jumlah dan ketepatan serta relevansi informasi yang dibutuhkan.
- b. *Hindari bias*, melalui: introspeksi, dengarkan, tanyakan secara berulang-ulang, tanyakan kepada kelompok termiskin.
- c. *Triangulasi sumber informasi* dan libatkan Tim Multi-disiplin untuk bertanya dalam beragam perspektif.

- d. *Belajar dari dan bersama masyarakat.*
- e. *Belajar cepat melalui eksplorasi, cross-check dan jangan terpaku pada bekuhan yang telah disiapkan.*

## **2. *Participatory Rural Appraisal (PRA)***

Metode PRA merupakan penyempurnaan dari RRA. PRA yang dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua pengguna (*stakeholders*) dengan difasilitasi oleh orang-luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur yang mengurui. Menurut Chambers (1996), metode PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak.

Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metode PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Melalui PRA dilakukan kegiatan-kegiatan:

- a. Pemetaan-wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan.
- b. Analisis keadaan yang berupa:
  - 1) Kedaan masa lalu, sekarang, dan kecenderungannya di masa depan.
  - 2) Identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan alasan-alasan atau penyebabnya.
  - 3) Identifikasi (akar) masalah dan alternatif-alternatif pemecahan masalah.
  - 4) Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mencakup *strength, weakness, opportunity, and treat (SWOT)*.

- c. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan (dapat dilaksanakan, efisien, dan diterima oleh sistem sosialnya).
- d. Rincian tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang akan diusulkan/ direkomendasikan.

Alat-alat yang digunakan dalam metode PRA serupa dengan yang digunakan dalam metode RRA, tetapi berbeda dalam tingkat partisipasi dari masyarakat desa dalam praktik di lapangan. Tidak seperti dalam RRA, masyarakat desa yang dilibatkan dalam PRA memainkan peran yang lebih besar dalam pengumpulan informasi, analisis data dan pengembangan intervensi seperti pada program-program pengembangan masyarakat yang didasarkan pada pengertian terhadap program secara keseluruhan. Proses ini akan memberdayakan masyarakat dan memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah mereka sendiri yang lebih baik dibanding dengan melalui intervensi dari luar.

Metode RRA dan PRA tersebut kemudian dijabarkan menjadi desain program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mencakup:

### **1. Program Pemetaan Potensi Ekonomi**

- a. Pelaksana Program PKM bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pemetaan kawasan-kawasan yang diperkirakan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai Kawasan Bisnis Terpadu (KBT);
- b. Pelaksana Program PKM bekerjasama dengan instansi terkait menentukan skala prioritas dan sasaran utama obyek Kawasan Bisnis Terpadu (KBT);
- c. Pelaksana Program PKM bekerjasama dengan instansi terkait merumuskan rencana strategis dan rencana operasional pelaksanaan program pengembangan Kawasan Bisnis Terpadu (KBT).

## **2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

- a. Pelaksana Program PKM bekerjasama dengan instansi terkait memberikan program pendidikan, pelatihan, pendampingan, supervisi, dan konsultasi kepada pelaku UMKM di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, di antaranya:
  - 1) Pelatihan Manajemen Bisnis dan Tata Kelola Wirausaha Industri Kreatif Syari'ah;
  - 2) Pelatihan Manajemen Bisnis dan Tata Kelola Agro Industri Pariwisata Syari'ah;
  - 3) Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Pelaku UMKM;
  - 4) Pelatihan Tenaga Pendamping bagi Pelaku UMKM.
- b. Pelaksana Program PKM bekerjasama dengan instansi terkait memberikan asistensi kepada pelaku UMKM dalam mendapatkan pendampingan usaha.

## **3. Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang akan dilakukan oleh Pelaksana Program PKM UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018 ini dirancang sebagai berikut:

- a. Pengembangan Desa Wisata dan Budaya;
- b. Pengembangan Komoditi Unggulan Berbasis Agro Industri;
- c. Pengembangan Kawasan Agro Politan;
- d. Pengembangan Kawasan Niaga Terpadu;
- e. Dan lain-lain.

Selanjutnya, pelaksana program PKM UIN sunan Gunung Djati Bandung menyusun tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

### **1. Tahapan Perencanaan Program**

Sebelum dilaksanakan ketiga program besar tersebut, terlebih dahulu perlu dilakukan tahapan-tapan sebagai berikut:

- a. Manual Draft bahan rapat koordinasi dengan instansi terkait;



- b. Manual Draft pemetaan skala prioritas program yang akan dilaksanakan;
- c. Manual Draft berbagai instrumen teknis penyelenggaraan program;
- d. Manual Draft instrument pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
- e. Manual Draft penyusunan laporan kegiatan.

## 2. Tahapan Pelaksanaan Program

Program-program tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan dengan intensitas berbeda yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori:

- a. Jangka Pendek (*Short Term Program*) yaitu, kegiatan yang sifatnya insidental, seperti pelatihan (*training*);
- b. Jangka Menengah (*Mid Term Program*) yaitu kegiatan yang sifatnya berkala, seperti supervisi/asistensi (*supervision and monitoring*);
- c. Jangka Panjang (*Long Term Program*) yaitu kegiatan yang sifatnya berkelanjutan, seperti: aktifitas bisnis (*business activity*).

## 3. Tahapan Evaluasi Program

Program-program tersebut di atas akan dievaluasi dan dilaporkan secara tertulis dan terstruktur yang mencakup:

- a. Laporan dan evaluasi substantif kegiatan PKM;
- b. Laporan dan evaluasi keuangan kegiatan PKM;
- c. Publikasi dan release kegiatan PKM.

## H. Rancangan Evaluasi/Alat Ukur Keberhasilan

Rancangan evaluasi/alat ukur keberhasilan pelaksanaan program PKM UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018 ini disusun sebagai berikut:

Jenis/Kriteria Kegiatan	Penjabaran Program Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Tolak Ukur Keberhasilan
Program Pemetaan Potensi Ekonomi	1. Pemetaan kawasan-kawasan yang diperkirakan	1. Dapat memetakan kawasan-kawasan yang diperkirakan	1. Terpetakannya kawasan-kawasan yang diperkirakan

	<p>memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai Kawasan Bisnis Terpadu (KBT);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penentuan skala prioritas dan sasaran utama obyek Kawasan Bisnis Terpadu (KBT);</li> <li>3. merumuskan rencana strategis dan rencana operasional pelaksanaan program pengembangan Kawasan Bisnis Terpadu (KBT).</li> </ol>	<p>memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai Kawasan Bisnis Terpadu (KBT);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dapat menentukan skala prioritas dan sasaran utama obyek Kawasan Bisnis Terpadu (KBT);</li> <li>3. Dapat merumuskan rencana strategis dan rencana operasional pelaksanaan program pengembangan Kawasan Bisnis Terpadu (KBT).</li> </ol>	<p>memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai Kawasan Bisnis Terpadu (KBT);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terpilihnya skala prioritas dan sasaran utama obyek Kawasan Bisnis Terpadu (KBT);</li> <li>3. Terumuskannya rencana strategis dan rencana operasional pelaksanaan program pengembangan Kawasan Bisnis Terpadu (KBT).</li> </ol>
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Manajemen Bisnis dan Tata Kelola Wirausaha Industri Kreatif Syari'ah;</li> <li>2. Pelatihan Manajemen Bisnis dan Tata Kelola Agro Industri Pariwisata Syari'ah;</li> <li>3. Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Pelaku UMKM;</li> <li>4. Pelatihan Tenaga Pendamping bagi Pelaku UMKM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keahlian pelaku UMKM dalam bidang Manajemen Bisnis dan Tata Kelola Wirausaha Industri Kreatif Syari'ah;</li> <li>2. Meningkatkan keahlian pelaku UMKM dalam bidang Manajemen Bisnis dan Tata Kelola Agro Industri Pariwisata Syari'ah;</li> <li>3. Meningkatkan keahlian pelaku UMKM dalam bidang Manajemen Keuangan bagi Pelaku UMKM;</li> <li>4. Meningkatkan keahlian Tenaga Pendamping bagi Pelaku UMKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya keahlian pelaku UMKM dalam bidang Manajemen Bisnis dan Tata Kelola Wirausaha Industri Kreatif Syari'ah;</li> <li>2. Meningkatnya keahlian pelaku UMKM dalam bidang Manajemen Bisnis dan Tata Kelola Agro Industri Pariwisata Syari'ah;</li> <li>3. Meningkatnya keahlian pelaku UMKM dalam bidang Manajemen Keuangan bagi Pelaku UMKM;</li> <li>4. Meningkatnya keahlian Tenaga Pendamping bagi Pelaku UMKM</li> </ol>
Program Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Desa Wisata dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan Desa Wisata dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya Desa Wisata dan</li> </ol>

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Budaya; 2. Pengembangan Komoditi Unggulan Berbasis Agro Industri; 3. Pengembangan Kawasan Agro Politan; 4. Pengembangan Kawasan Niaga Terpadu.	Budaya; 2. Mengembangkan Komoditi Unggulan Berbasis Agro Industri; 3. Pengembangan Kawasan Agro Politan; 4. Pengembangan Kawasan Niaga Terpadu.	Budaya; 2. Berkembangnya Komoditi Unggulan Berbasis Agro Industri; 3. Berkembangnya Kawasan Agro Politan; 4. Berkembangnya Kawasan Niaga Terpadu.
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## I. Rencana dan Jadwal Kegiatan

Rencana dan agenda kegiatan program PKM UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018 ini disusun sebagai berikut:

No	Agenda	Waktu	Keterangan
1	Penyusunan Proposal PKM	April 2018	
2	Pengajuan Proposal PKM	April 2018	
3	Seleksi Proposal PKM	April 2018	
4	MoU Kontrak PKM	Mei 2018	
5	Pelaksanaan PKM	Mei-Juli 2018	
6	Penyusunan Laporan PKM	Juli 2018	
7	Workshop Laporan PKM	Agustus 2018	
8	Cetak Laporan PKM	Agustus 2018	
9	Pubikasi Hasil PKM	September 2018	

## J. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Organisasi Pelaksana Kegiatan program PKM UIN Sunan Gunung Djati Bandung disusun sebagai berikut:

### 1. Ketua Tim Pelaksana

Nama dan Gelar Akademik : Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag  
 NIP : 197411062005011006  
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Bidang Keahlian : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Syariah dan Hukum/MKS  
Waktu yang Disediakan : 16 Jam / Minggu

**2. Anggota 1**

Nama dan Gelar Akademik : Widiawti, S.Pd., MM  
NIP : 198105032015032003  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Bidang Keahlian : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Syariah dan Hukum/MKS  
Waktu yang Disediakan : 16 Jam / Minggu

**3. Anggota 2**

Nama dan Gelar Akademik : Azis Surono  
NIM : 1143070037  
Tugas dalam PKM : Pelaksana Teknis  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Syariah dan Hukum/MKS  
Waktu yang Disediakan : 16 Jam / Minggu

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA TENTANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN EKONOMI, DAN PELATIHAN MANAJEMEN INDUSTRI HASIL PERTANIAN**

#### **A. Pengabdian Kepada Masyarakat**

##### **1. Pengertian Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi di samping pendidikan dan penelitian. Awal gagasan pendirian Perguruan Tinggi adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mempersiapkan warga negara yang cerdas, berilmu, beriman, dan beramal untuk kemajuan bangsa, serta berkhidmat kepada masyarakat yang ada.

Semangat keutuhan atau integrasi Tridharma tersebut merupakan mandat dari Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Dalam ketentuan UU tersebut, pengabdian kepada masyarakat disebut sebagai suatu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>1</sup>

Selain itu, pengabdian kepada masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain dalam hal perluasan wawasan, pengetahuan maupun peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh civas akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan katif meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah.

---

<sup>1</sup> Lihat ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya pengabdian kepada masyarakat juga dapat dipahami sebagai pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai bentuk penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Merujuk kepada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PKM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Selanjutnya dalam Penjelasan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PKM sehingga setiap Perguruan Tinggi dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Lebih rinci lagi Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 22 ayat 3 Penjelasan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Dalam kedua peraturan tersebut di atas ditegaskan secara detail tentang standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di dalam rangka menjalankan kegiatan PKM yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PKM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Sebagai salah satu institusi di bawah naungan Kementerian Agama, konsep PKM di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dirumuskan tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Misalnya, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa PKM merupakan kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PKM kemudian diatur lebih teknis melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Menurut Keputusan Dirjen Diktis, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan istilah yang digunakan oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 dan PMA Nomor 55 Tahun 2014, yang esensinya menyebutkan bahwa kemitraan yang setara antara universitas dengan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> UU Nomor 12 Tahun 2012, PMA Nomor 55 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012, khususnya pada Pasal 47, 48 dan 49, ruang lingkup mengabdikan kepada masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat UU, penting sekali perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru, tak terkecuali di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, di mana PKM dirumuskan sebagai kegiatan sivitas akademika di dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai bentuk kegiatan.

Sebagaimana hal di perguruan tinggi lainnya, program-program PKM yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga menggunakan prinsip dasar keterpaduan aspek Tridharma Perguruan Tinggi, empati-partisipatif, interdisipliner, komprehensif-komplementatif dan berdimensi luas, realistis-pragmatis, pelestarian dan pengembangan lingkungan (*environmental development*), serta terlaksananya gagasan bersama (*co-creation*), pendanaan bersama (*co-financing*), keluwesan (*flexibility*), berkesinambungan (*sustainability*) dan berbasis riset (*research based community services*).

Semua prinsip tersebut di atas sejalan dengan upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk menjadi menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN Tahun 2025. Pencapaian visi UIN telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) sebagaimana tercantum dalam Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi (AIPT). Dalam RIP yang dimiliki, telah tersusun tahapan-tahapan atau tonggak capaian (*milestones*) yang telah dan akan dilakukan dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan tinggi. Dalam RIP tersebut, dijabarkan

---

Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi kerangka acuan kegiatan PKM di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



melalui renstra 5 tahunan yang tahapan dan capaiannya yang dinyatakan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Tahun 2004-2009 : tahapan institusionalisasi (*institutionalization*);
- b. Tahun 2010-2014 : tahapan penguatan (*strengthening institution*);
- c. Tahun 2015-2019 : tahapan pengembangan (*developing institution*);
- d. Tahun 2020-2024 : tahapan tinggal landas (*take off stage*);
- e. Tahun 2025-2029 : tahapan internasionalisasi (*international participation*).

Saat ini, UIN Sunan Gunung Djati Bandung sedang memasuki tahun 2015-2019 merupakan tahap pengembangan institusi (*developing institution*), di mana dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung ditekankan beberapa indikator capaian sebagai berikut:

- a. Terbentuknya sistem akademik yang tertata, baik pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara *on line*;
- b. Tumbuhnya budaya akademik dengan meminimalisir nuansa politis dalam kebijakan universitas;
- c. Bertambahnya kerjasama internasional yang visible dan meningkatkan kualitas SDM sivitas akademika, di tingkat asia;
- d. Terbangunnya infrastruktur yang memadai untuk sebagian 25% mahasiswa baru di Ma'had al-Jamiah;
- e. 35% dosen berpendidikan Doktor;
- f. 9% dosen memiliki jabatan akademik Guru Besar;
- g. 35% dosen mampu berbicara bahasa Arab dan Inggris secara aktif;
- h. 15% karyawan berbicara salah satu bahasa asing (Arab/Inggris);
- i. Setiap fakultas memiliki minimal 15 orang mahasiswa asing;
- j. 45% sivitas akademika telah menggunakan internet dalam upaya membangun kultur akademik;

---

<sup>4</sup> Lihat Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2004-2029 dan Rencana Strategis UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015-2019.

- k. Terdapat program studi terakreditasi A sebanyak 20, dan mempersiapkan diri terhadap akreditasi ISO dan tingkat regional;
- l. Semakin kecil rasio jumlah dosen dan mahasiswa dengan perbandingan 1:20;
- m. Terdapat 7 jurnal nasional telah terakreditasi.

Kemudian dalam RIP dan Renstra UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2015-2019 juga dijabarkan bidang pengabdian kepada masyarakat bahwa bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilaksanakan dengan berbagai bentuk, yaitu pembelajaran masyarakat, pendampingan masyarakat, advokasi, pemberdayaan ekonomi, layanan masyarakat, uji coba dan kegiatan sosial yang bersifat karitatif;

Sedangkan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang hendak diwujudkan diantaranya adalah menyempurnakan pedoman dan berbagai panduan pengabdian kepada masyarakat, menyelenggarakan beragam jenis KKN, yaitu KKN Reguler, KKN Tematik, KKN Kebangsaan dan KKN Internasional, Pengabdian Dosen kepada Masyarakat Reguler, Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Riset dan terbentuknya desa mitra kampus yang dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut akan bermuara pada tujuan akhir yakni seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkan semua ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan nasional.

## **2. Landasan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan normatif dalam menyusun kebijakan, strategi pengembangan, dan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
- d. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

- l. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- m. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
- n. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
- o. Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
- p. Keputusan Menteri Agama Nomor B. II/3/3106361/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengangkatan Rektor;
- q. Surat Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) Kementerian Agama;
- r. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/ I.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
- s. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- t. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 117 Tahun 2015 tentang Panduan Pelaksanaan Kegiatan Akademik; Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor Un.05/II.2/KP.076/ 152/ 2015 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di LP2M.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, program pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga didasarkan kepada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Wahyu Memandu Ilmu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilandasi dengan kaidah dan norma yang tercantum di dalam al-quran sebagai panduan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

b. Asas Kelembagaan

Program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus dilaksanakan secara melembaga. Oleh karenanya asas kelembagaan merupakan salah satu ciri pokok yang tidak boleh ditinggalkan.

c. Asas Ilmu-Amaliah dan Amal-Ilmiah

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika harus menggunakan metodologi ilmiah sejak pengembangan, perencanaan program, pelaksanaan maupun evaluasi, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan amal yang dilandasi oleh pemikiran ilmiah serta profesionalisme.

d. Asas Kerjasama

Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha bersama antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan pihak-pihak lain untuk perkembangan masyarakat. Hubungan kerjasama ini perlu dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong atas dasar kemitraan yang saling menunjang dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan pembangunan.

e. Asas Kestinambungan

Asas kesinambungan dalam program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan ciri adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan suatu usaha sadar yang terencana melalui tahapan-tahapan logis sistematis

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender

Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.

g. Asas Manfaat

Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan asset mereka.

h. Asas Ramah Lingkungan.

Memberikan perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tatakelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

i. Asas Akhlak Karimah

Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keislaman adat istiadat dan kearifan lokal, sehingga peran perguruan tinggi berkontribusi besar dalam pembangunan sosial dan kemasyarakatan.

### **3. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat**

Dalam beberapa literatur dikenal banyak metode ilmiah untuk pengabdian kepada masyarakat. Namun dalam konteks ini, program kegiatan

pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pataruman Kota Banjar ini akan menggunakan dua metode, yaitu:<sup>5</sup>

a. *Rapid Rural Appraisal* (RRA)

RRA (*Rapid Rural Appraisal*) merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktek, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Meskipun sering dikatakan sebagai teknik penelitian yang “*cepat dan kasar/kotor*” tetapi RRA dinilai masih lebih baik jika dibandingkan dengan teknik-teknik kuantitatif klasik.

Metode RRA juga digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan perdesaan harus diambil segera. Dewasa ini banyak program pembangunan yang dilaksanakan sebelum adanya kegiatan pengumpulan semua informasi di daerah sasaran. Konsekuensinya, banyak program pembangunan yang gagal atau tidak dapat diterima oleh kelompok sasaran meskipun program-program tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan secara matang, karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penyusunan prioritas dan pemecahan masalahnya.

Pada dasarnya, metode RRA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multidisiplin, menggunakan sejumlah metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi perdesaan. Cara kerja tersebut tersebut dipusatkan pada pemahaman pada tingkat komunitas lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.

---

<sup>5</sup> Penulis mengutip penjelasan R. Chambers, *Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif*, (Yogyakarta: Oxfam – Kanisius, 1996) dan penjelasan S. Gitosaputro, *Implementasi Participatory Rural Appraisal (Pra) Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Lampung, 2006.

Komunikasi dan kerjasama diantara masyarakat desa dan aparat perencana dan pelaksana pembangunan (*development agent*) adalah sangat penting, dalam kerangka untuk memahami masalah-masalah di perdesaan. Di samping itu, metode RRA juga berguna dalam memonitor kecenderungan perubahan-perubahan di perdesaan untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi di lapangan dan mengusulkan penyelesaian masalah yang memungkinkan.

Metode RRA menyajikan pengamatan yang dipercepat yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat atau peneliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengamatan kualitatif bagi keperluan pembuat keputusan untuk menentukan perlu tidaknya penelitian tambahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Metode RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu; (a) perspektif sistem, (b) triangulasi dari pengumpulan data, dan (c) pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (*iterative*).

Sebagai suatu teknik penilaian, RRA menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari:

- 1) Review/telaahan data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapang secara ringkas.
- 2) Oservasi/pengamatan lapang secara langsung.
- 3) Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya.
- 4) Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik.
- 5) Studi kasus, sejarah lokal, dan biografi.
- 6) Kecenderungan-kecenderungan.
- 7) Pembuatan kuesioner sederhana yang singkat.
- 8) Pembuatan laporan lapang secara cepat.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam metode RRA, yaitu:

- 1) *Efektivitas dan efisiensi*, kaitannya dengan biaya, waktu, dengan perolehan informasi yang dapat dipercaya yang dapat digunakan



dibanding sekedar jumlah dan ketepatan serta relevansi informasi yang dibutuhkan.

- 2) *Hindari bias*, melalui: introspeksi, dengarkan, tanyakan secara berulang-ulang, tanyakan kepada kelompok termiskin.
- 3) *Triangulasi sumber informasi* dan libatkan Tim Multi-disiplin untuk bertanya dalam beragam perspektif.
- 4) *Belajar dari dan bersama masyarakat*.
- 5) *Belajar cepat melalui eksplorasi, cross-check* dan jangan terpaku pada bekuhan yang telah disiapkan.

b. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

Metode PRA merupakan penyempurnaan dari RRA. PRA yang dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua pengguna (*stakeholders*) dengan difasilitasi oleh orang-luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang menggurui.

Menurut Chambers, metode PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak.

Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metode PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Melalui PRA dilakukan kegiatan-kegiatan:

- e. Pemetaan-wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian suatu keadaan.
- f. Analisis keadaan yang berupa:

- 5) Kedaan masa lalu, sekarang, dan kecenderungannya di masa depan.
  - 6) Identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan alasan-alasan atau penyebabnya.
  - 7) Identifikasi (akar) masalah dan alternatif-alternatif pemecahan masalah.
  - 8) Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis *strength, weakness, opportunity, and treat* (SWOT) terhadap semua alternatif pemecahan masalah.
- g. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan (dapat dilaksanakan, efisien, dan diterima oleh sistem sosialnya).
  - h. Rincian tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang akan diusulkan/ direkomendasikan.

Alat-alat yang digunakan dalam metode PRA serupa dengan yang digunakan dalam metode RRA, tetapi berbeda dalam tingkat partisipasi dari masyarakat desa dalam praktik di lapangan. Tidak seperti dalam RRA, masyarakat desa yang dilibatkan dalam PRA memainkan peran yang lebih besar dalam pengumpulan informasi, analisis data dan pengembangan intervensi seperti pada program-program pengembangan masyarakat yang didasarkan pada pengertian terhadap program secara keseluruhan. Proses ini akan memberdayakan masyarakat dan memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah mereka sendiri yang lebih baik dibandingkan dengan melalui intervensi dari luar.

Metode RRA dan PRA tersebut kemudian dijabarkan menjadi desain program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mencakup:

- d. Program Pemetaan Potensi Ekonomi

- 1) Pelaksana Program PKM bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pemetaan kawasan-kawasan yang diperkirakan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai Kawasan Bisnis Terpadu (KBT);
  - 2) Pelaksana Program PKM bekerjasama dengan instansi terkait menentukan skala prioritas dan sasaran utama obyek Kawasan Bisnis Terpadu (KBT);
  - 3) Pelaksana Program PKM bekerjasama dengan instansi terkait merumuskan rencana strategis dan rencana operasional pelaksanaan program pengembangan Kawasan Bisnis Terpadu (KBT).
- e. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 5) Pelaksana Program PKM bekerjasama dengan instansi terkait memberikan program pendidikan, pelatihan, pendampingan, supervisi, dan konsultasi kepada pelaku UMKM di Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, di antaranya:
    - a) Pelatihan Manajemen Bisnis dan Tata Kelola Wirausaha Industri Kreatif Syari'ah;
    - b) Pelatihan Manajemen Bisnis dan Tata Kelola Agro Industri Pariwisata Syari'ah;
    - c) Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Pelaku UMKM;
    - d) Pelatihan Tenaga Pendamping bagi Pelaku UMKM.
  - 2) Pelaksana Program PKM bekerjasama dengan instansi terkait memberikan asistensi kepada pelaku UMKM dalam mendapatkan pendampingan usaha.
- f. Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang akan dilakukan oleh Pelaksana Program PKM UIN Sunan Gunung Djati Bandung dirancang sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Desa Wisata dan Budaya;

- 2) Pengembangan Komoditi Unggulan Berbasis Agro Industri;
- 3) Pengembangan Kawasan Agro Politan;
- 4) Pengembangan Kawasan Niaga Terpadu;
- 5) Dan lain-lain.

Selanjutnya, pelaksana program PKM UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyusun tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Tahapan Perencanaan Program

Sebelum dilaksanakan ketiga program besar tersebut, terlebih dahulu perlu dilakukan tahapan-tapan sebagai berikut:

- 1) Manual Draft bahan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- 2) Manual Draft pemetaan skala prioritas program yang akan dilaksanakan;
- 3) Manual Draft berbagai instrumen teknis penyelenggaraan program;
- 4) Manual Draft instrument pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
- 5) Manual Draft penyusunan laporan kegiatan.

b. Tahapan Pelaksanaan Program

Program-program tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan dengan intensitas berbeda yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori, antara lain:

- 1) Jangka Pendek (*Short Term Program*) yaitu, kegiatan yang sifatnya insidental, seperti pelatihan (*training*);
- 2) Jangka Menengah (*Mid Term Program*) yaitu kegiatan yang sifatnya berkala, seperti supervisi/asistensi (*supervision and monitoring*);
- 3) Jangka Panjang (*Long Term Program*) yaitu kegiatan yang sifatnya berkelanjutan, seperti: aktifitas bisnis (*business activity*).

c. Tahapan Evaluasi Program

---

<sup>6</sup> Penulis menggunakan metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)* dan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* sebagai kerangka metodologi untuk pelaksana program PKM UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2018.

Program-program tersebut di atas akan dievaluasi dan dilaporkan secara tertulis dan terstruktur yang mencakup:

- 1) Laporan dan evaluasi substantif kegiatan PKM;
- 2) Laporan dan evaluasi keuangan kegiatan PKM;
- 3) Publikasi dan release kegiatan PKM.

#### **4. Bentuk-bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat**

Ada beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pataruman Kota Banjar ini, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Pembelajaran masyarakat yang berkelanjutan, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan;
- b. Pendampingan masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra;
- c. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
- d. Pemberdayaan ekonomi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk rintisan usaha mandiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan;
- e. Layanan masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi

---

<sup>7</sup> Penulis menggunakan metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)* dan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* sebagai kerangka metodologi untuk pelaksana program PKM UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2018.

(psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain;

- f. Ujicoba, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dan lain-lain.
- g. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial dalam bentuk pemberdayaan secara berkelanjutan dan tidak terbatas sumbangan materi.

## **5. Tujuan Pegabdian Kepada Masyarakat**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UIN SGD Bandung secara umum bertujuan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat baik dilakukan melalui institusi sosial keagamaan, pemerintah, dunia usaha, industri dan sebagainya. Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan suatu penelitian atau mengkaji ulang hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEKS. Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:

1. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan, latihan, dan upaya lain yang relevan;
2. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam

globalisasi, menuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku;

3. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses globalisasi;
4. Memberi masukan kepada program studi di lingkungan UIN SGD Bandung untuk pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan.

## **B. Pemberdayaan Ekonomi**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut *empowerment*. Menurut Sedarmayanti, *empowerment* asalnya dari kata “*power*” yang artinya “*control, authority, dominion*”. Awalan “*emp*” memiliki arti “*on put to*” atau “*to cover with*” jelasnya “*more power*”. Pendek kata, *empowering* artinya “*passing on authority and responsibility*”.<sup>8</sup>

Pemberdayaan sebagai terjemahan *empowering* mengandung dua pengertian, pertama *to give power or authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, kedua *to give ability to* atau *enable*, usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Dengan demikian secara eksplisit dalam kedua ini adalah bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan seseorang.<sup>9</sup>

Konsep pemberdayaan secara umum dapat digambarkan sebagai bentuk adanya pemberian kewenangan dan kesempatan bagi individu atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas.

---

<sup>8</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) hlm. 285.

<sup>9</sup> Randy R. Wrihatnolo & Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan, sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat* (Jakarta : Kelompok Gramedia, 2007), hlm. 115

Pemberdayaan sangat penting ditegakkan bagi masyarakat, sebagai perwujudan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan, agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menunjang diri menuju keadaan yang lebih baik.

Randy R. Wrihatnolo & Riant Nugroho Dwidjowijoto mengutip penjelasan Dubois dan Miley (1997) mengemukakan dasar pemberdayaan meliputi:

- a. Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat *mutual benefit*;
- b. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan;
- c. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang memengaruhi;
- d. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat daripada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan;
- e. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber pendapatan tersebut secara efektif;
- f. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi;
- g. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur parallel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.<sup>10</sup>

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan. Apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 116.



tidak akan optimal. Menurut korten, memahami *power* tidak cukup hanya dari dimensi distributif akan tetapi juga dari dimensi generatif.<sup>11</sup>

Pelaksanaan pemberdayaan pada masyarakat lokal termanifestasikan ke dalam berbagai tindakan kolektif dalam rangka melakukan perubahan kondisi kehidupan masyarakat. Tindakan kolektif tersebut merupakan cerminan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengelolaan pembangunan secara mandiri, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pembangunan.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara umum pemberdayaan ekonomi dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan, memberikan kesempatan untuk mengatur dan melaksanakan hak dan tanggungjawabnya selaku anggota masyarakat dalam berbagai aktifitas perekonomian.

## **2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Ekonomi**

Konsep pemberdayaan bidang ekonomi dapat dilakukan dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kedaulatan ekonomi harus diberikan sepenuhnya kepada rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.

Pemberdayaan pada bidang ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan pemberian kesempatan untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup

---

<sup>11</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesanya?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 88.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 103.

hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang sangat erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

Menurut Adam Smith masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang warganya memiliki simpati, yang memberi perhatian pada nasib orang lain. Konsep ini dikenal dengan masyarakat bersahabat. Masyarakat bersahabat merupakan masyarakat yang dibangun atas dasar kebutuhan fisik dan psikologi. Ekonomi tidak hanya mengurus masalah kebutuhan fisik, tetapi harus berkembang dari penghargaan terhadap manusia.<sup>13</sup> Dengan timbulnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk saling menghargai maka akan menciptakan kemitraan, gotong royong, saling membantu dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan dalam pembedayaan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru, dan pemerataan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.<sup>14</sup>

#### a. Bantuan Modal

Faktor modal menjadi salah satu hal penting dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Pemecahan aspek modal penting dan

---

<sup>13</sup> Mikhael dua, *Filsafat Ekonomi 'Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama'* (Yogyakarta : Kanisius, 2008), hlm. 41

<sup>14</sup> Gunawan Sumidiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1999), hlm. 127.

memang harus dilakukan. Namun perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan adalah: *pertama*, bagaimana pemberian bantuan modal tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat. *Kedua*, bagaimana pemecahan aspek modal dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan.

Ketiga, bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten. Oleh karena itu, cara untuk memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.<sup>15</sup>

#### b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mengembangkan usaha, tidak akan memiliki arti jika hasil produksi tidak dapat dipasarkan, atau dengan harga yang rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mardi Yatmo Hutomo “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi”, dalam Jurnal Ekonomi Nomor 20, Edisi Juni-Juli 2000, hlm. 7

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 8

### c. Bantuan Pendampingan

Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Namun demikian yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi tenaga pendamping masyarakat. Konsep yang dapat menjadi pertimbangan adalah membentuk suatu wadah yang khusus mendampingi pengusaha. Wadah ini dapat dilakukan oleh pemerintah, atau oleh pihak ketiga (penyedia modal).<sup>17</sup>

### d. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.<sup>18</sup>

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi dapat diimplementasikan melalui peningkatan kekuatan bagi pengusaha, baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dalam produksi, distribusi maupun konsumsi. Pemberdayaan ekonomi dapat diciptakan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 10

dengan adanya sinergitas antara pemerintah sebagai penentu regulasi, pihak ketiga sebagai pihak penyedia modal, serta masyarakat itu sendiri yang akan menekuni dunia usaha.

Sebagian besar usaha nasional di Indonesia adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. Sektor ini menciptakan lapangan kerja lebih dari 90% dari total usaha nasional, menyumbang sampai 60% *output* yang dihasilkan usaha nasional. Usaha kecil seharusnya menjadi prioritas pembangunan karena bersentuhan langsung dengan *grassroot* sehingga berpotensi menjadi penggerak sektor riil dan mengurangi pengangguran.<sup>19</sup>

Dalam rangka mewujudkan sasaran pemberdayaan dalam bidang usaha terutama bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maka dilaksanakan berbagai kebijakan, diantaranya: *Pertama*, mengembangkan UMKM agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing.

Kedua, memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan berwawasan gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan perisinan, memperluas akses permodalan, menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan dunia usaha, teknologi, pemasaran, manajemen, dan informasi.

Ketiga, memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang berkeunggulan. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agrobisnis dan agroindustri disertai kemudahan dalam pengelolaan usaha. Mengembangkan UMKM untuk lebih berperan dalam proses industrialisasi, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan SDM. Selanjutnya mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan setiap daerah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 236

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 238

### 3. Tantangan Pemberdayaan Ekonomi

Islam sebagai agama yang universal, agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama yang mengatur dan mengajarkan seluruh siklus kehidupan. Prinsip dan aturan dalam kehidupan didasarkan pada ketentuan al-Quran dan as-sunah sehingga akan membawahkan masyarakat mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidup. Islam mengajarkan tentang pentingnya untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Sedangkan yang kuat memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat yang lemah. Pemberdayaan ekonomi dalam Islam diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain zakat, wakaf, sedekah, dan infak.

Islam berpegang teguh pada prinsip persamaan kedudukan, prinsip keadilan, tuntutan sosial yang secara jelas, prinsip perimbangan antara hak dan kewajiban, serta tuntutan untuk tolong menolong, menjadi suatu dasar pijakan dalam rangka mengurangi penderitaan kaum lemah. Dengan mengembangkan sikap kebersamaan dalam menikmati keuntungan dan menanggung kerugian pada berbagai kegiatan ekonomi, baik dalam sebagai fungsi produksi, distributor maupun sebagai konsumen, maka keserasian hubungan antara unit-unit dalam masyarakat akan terjamin.

Implementasi pemberdayaan ekonomi dalam Islam dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan dalam berbagai hal diantaranya pembentukan *empowering center*. *Empowering Center* (EC) diaplikasikan ke dalam prinsip sistem tolong menolong, survei, karakter dan komitmen kemitraan, serta fasilitator.<sup>21</sup>

#### a. Prinsip Tolong Menolong

Prinsip tolong menolong dilakukan dengan datangnya mitra kepada *empowering center* atau sebaliknya untuk melakukan kerja sama. Hal ini

---

<sup>21</sup> Muhammad Budi Djatmiko dan Doddy Koesdijanto, *The Book Of Empowering Center*, (Bandung : STEMBI Bandung Business School, 2012), hlm. 101

didasarkan sesuai dengan al-Quran dan al-Hadits. Rasulullah SAW telah memerintahkan seluruh ummatnya untuk saling tolong menolong dalam kesulitan dengan menyebutkan bahwa tangan di atas lebih utama kedudukannya daripada tangan di bawah. Saling membantu dalam menyebarkan kebaikan dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Allah SWT menjelaskan dalam Al-qur'an tentang pentingnya tolong menolong, sebagaimana dijelaskan pada al-Quran surah al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. (QS. al-Baqarah : 245)

Dengan dasar prinsip saling tolong-menolong maka *empowering center* diaplikasikan dalam bentuk sebagai berikut :

- 1) *Empowering Center* sebuah pusat pemberdayaan yang secara fungsi dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan potensi, memberikan pendidikan dan pembinaan, menjadi fasilitator pemberdayaan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Selain itu *empowering center* juga dapat menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul dari pihak ketiga untuk disalurkan kepada kaum yang membutuhkan;
- 2) *Empowering Center* dilakukan kegiatan dengan mengadopsi sosok Rasulullah. Memiliki empat nilai dasar yang diterapkan dalam suatu organisasi, yaitu *sidik* (benar), *amanah* (terpercaya) *fatanah* (cerdas), dan *tablik* (menyampaikan).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 104

## b. Survei

Sebelum melakukan kerja sama dengan mitra maka hal yang dilakukan adalah melakukan survei untuk mengenal lebih jauh tentang calon mitra tersebut. Implementasi survei dalam *Empowering Center* harus dilakukan dengan cermat agar dapat dilakukan keputusan yang tepat. Melalui survei *Empowering Center* dapat memetakan kendala atau masalah yang dihadapi oleh mitra untuk selanjutnya dapat diberikan solusi.<sup>23</sup> Allah SWT menjelaskan dalam Al-qur'an tentang pentingnya sebuah survei, sebagaimana dijelaskan pada al-Quran surah al-Hujurat : 6

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ  
مَا فَعَلْتُمْ نَتَدَرِّمِينَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al Hujurat : 6).

## c. Karakter dan Komitmen Mitra

Ada dua parameter yang perlu dicermati sebelum menjalin kemitraan dengan pihak lain yaitu karakter dan komitmen. Kedua hal tersebut harus dimiliki oleh kedua belah pihak. Karakter dan komitmen kedua belah pihak akan mempengaruhi kelancaran kerja sama dalam sebuah lembaga, baik skala kecil maupun dalam skala besar.

Pembentukan karakter dan komitmen dapat dilakukan melalui program pelatihan yang akan mendukung visi dan misi *Empowering Center* sebagai sebuah pusat pemberdayaan. Pembinaan dan pelatihan harus dilakukan terus menerus, dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat baik secara internal maupun

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 107



eksternal. Melalui pembentukan karakter dan komitmen *Empowering Center* dapat mensosialisasikan keberadaannya agar masyarakat luas dapat ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan tersebut.<sup>24</sup>

#### d. Fasilitator

*Empowering Center* dapat bertindak sebagai fasilitator terhadap pihak ketiga sebagai penyandang dana. Ada tiga sistem yang dapat ditawarkan kepada kedua mitra. *Pertama, profit –loss sharing* yaitu kerja sama dengan sistem bagi hasil keuntungan dan rugi dengan akad sesuai syariat. *Kedua, qardhul hasan*, yaitu dana bergulir atau pinjaman tanpa bunga dengan pengembalian dana pokok untuk dimanfaatkan bagi masyarakat yang lain. *Ketiga*, penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah. Pada dasarnya model ini merupakan wakaf atau hibah untuk kepentingan umat berupa pemanfaatan untuk perbaikan taraf hidup, pendidikan, pembinaan, serta untuk membantu pengusaha yang lemah dan kaum duafa.<sup>25</sup>

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi dalam Islam memiliki banyak potensi. Hal ini juga erat kaitannya dengan pengelolaan potensi yang harus dimiliki disertai dengan langkah-langkah dan strategi yang kongkrit, maka akan tercipta tatanan kehidupan yang harmonis. Orang kaya akan menjadi penunjang bagi orang miskin, orang kuat akan mengayomi orang lemah, sehingga akan terjadi pemerataan kehidupan dalam masyarakat.

#### **4. Strategi Pemberdayaan Ekonomi**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak dikaitkan dengan suatu kewajiban tanpa memperhatikan hak pada peran. Dengan menggunakan pendekatan model *participatory rural appraisal* (PRA) menekankan bahwa masyarakat sasaran memiliki kemampuan untuk melakukan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 108

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 111

kontrol bahkan mengubah program yang telah dikeluarkan oleh para perencana pembangunan. Karena itu untuk mengendalikan peran masyarakat dan perencana dalam melakukan proses pembangunan, ada beberapa prinsip PRA yang menjadi dasar pijakan untuk implementasinya, yaitu:

- a. Belajar secara langsung. Belajar dari masyarakat secara langsung untuk mendapatkan pengetahuan fisik, teknis dan sosial secara local;
- b. Belajar secara cepat dan progresif. Belajar secara cepat dan progresif melalui eksplorasi yang terencana dan pemakaian metode yang fleksibel;
- c. Komunikasi rilek dan bersifat kekeluargaan. Menyeimbangkan bias, rileks dan tidak tergesa-gesa, mendengarkan dan bukan menggurui, tidak memaksakan dan mencari masyarakat yang lebih miskin, kehadiran orang luar hendaknya masuk dalam proses diskusi sebagai anggota. Oleh karena itu, komunikasi yang ada harus bersifat kekeluargaan;
- d. Optimalisasi pertukaran, mengaitkan biaya pemahaman dengan informasi yang benar-benar bermanfaat dengan pertukaran antara kuantitas, kegayutan, keakuran serta ketepatan waktu;
- e. Membuat jaringan titik-titik pengukuran, dapat diartikan sebagai penggunaan waktu kisaran yang terdiri dari metode, diskusi, jenis informasi untuk pengecekan silang;
- f. Mencari keanekaragaman, mencari hal yang berbeda-beda daripada rata-rata. Dalam hal ini, metode triangulasi dipergunakan untuk memperoleh informasi yang kedalamannya dapat diandalkan;
- g. Pemberian fasilitas, artinya memberikan fasilitas penyelidikan, analisis, penyajian dan pemahaman oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mereka dapat menyajikan dan memiliki hasilnya serta juga mempelajarinya;
- h. Kesadaran dan tanggung jawab diri yang kritis, fasilitator secara terus menerus menguji tingkah laku mereka dan mencoba melakukannya secara lebih baik. Kesalahan harus dipahami sebagai suatu kesempatan untuk belajar melakukan yang lebih baik;

- i. Saling berbagi informasi dan gagasan antar sesama masyarakat desa, antar masyarakat desa dengan fasilitator, dan antar fasilitator yang berbeda, serta saling berbagi wilayah kegiatan, pelatihan dan pengalaman antar organisasi yang berbeda.<sup>26</sup>

Partisipasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. *Pertama, Co-option*, dimana masyarakat hanya dijadikan subjek pembangunan. *Kedua, Co-operation*, terdapat insentif, namun proyek telah didesain oleh pihak luar yang menentukan seluruh agenda dan proses secara langsung. *Ketiga, Consultation*, masyarakat ditanya tentang kondisi dan kebutuhannya, namun pihak luar menganalisis informasi sekaligus memutuskan bentuk aksinya sendiri. *Keempat, Collaboration*, masyarakat bekerjasama dengan pihak luar untuk menentukan prioritas, dan pihak luar bertanggungjawab langsung kepada proses. *Kelima, Co-learning*, masyarakat dan pelaksana program saling membagi pengetahuan, untuk memperoleh saling pengertian, dan bekerjasama untuk merencanakan aksi, pihak luar (hanya memfasilitasi. *Keenam, Collective action*, Masyarakat menyusun dan melaksanakan agendanya sendiri, pihak luar tidak memiliki andil sama sekali.<sup>27</sup>

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa partisipasi adalah adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam setiap proses pembangunan. Partisipasi merupakan suatu nilai kerja dari masyarakat, sehingga masyarakat harus secara aktif ikut serta dalam setiap proses pembangunan. Partisipasi dapat berupa buah pikiran, tenaga, materi, maupun keterampilan. Partisipasi pengusaha dapat diwujudkan dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia, memperbaiki manajemen kerja, meningkatkan akses permodalan yang dapat menunjang pada peningkatan produksi.

---

<sup>26</sup> Robert Chambers, *Participatory Rural Appraisal (Memahami Desa Secara Partisipatif)*, Terjemahan Y. Sukoco, ( Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 34.

<sup>27</sup> Agus Purbathin Hadi, *op.cit.* hlm. 8

## 5. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan (*empowering*) secara umum kerap dipahami sebagai bagian dari pencatatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan usaha rakyat kecil atau masyarakat tertinggal melalui metode-metode alternatif. Sedangkan dalam pemahaman luas, pemberdayaan memiliki keterkaitan dengan upaya untuk mengimbangi kekuatan yang mengancam atau medominasi suatu kegiatan yang mengalami hambatan untuk berkembang.

Dalam lingkup transformasi budaya, pemberdayaan dapat dipandang sebagai upaya-upaya masyarakat untuk memberdayakan dan menyesuaikan diri terhadap dinamika budaya yang tengah berlangsung. Sedangkan dalam masyarakat modern, gerakan-gerakan pemberdayaan kerap ditafsirkan sebagai upaya perlawanan, perimbangan, penyetaraan, ataupun pendinamisasian satu kegiatan yang mengalami pemapanan, kurang kreatif, atau mereka yang terpinggirkan.<sup>28</sup>

Terdapat beberapa tujuan dari pemberdayaan,<sup>29</sup> diantaranya: *pertama* menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*). Asumsi dasar yang dibangun adalah bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan dilakukan dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Untuk memperkuat potensi masyarakat yang telah dimiliki diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Upaya yang paling penting untuk dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber

---

<sup>28</sup> Agus Soehari, *Budaya Visual Indonesia* (Erlangga, 2007), hlm. 35.

<sup>29</sup> Ginandjar kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat "Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat"*, jurnal, hlm. 10

kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan.

Ketiga, memberdayakan juga bertujuan untuk melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Dengan demikian pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan perubahan pola pikir serta sosial masyarakat. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula dengan pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.

## C. Pelatihan Manajemen Industri Hasil Pertanian

### 1. Pengertian Pelatihan Manajemen Industri Hasil Pertanian

Pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui beberapa rangkaian kegiatan meliputi identifikasi, pengkajian, dan proses belajar yang terencana. Hal ini dilakukan untuk membantu mengembangkan kemampuan yang diperlukan dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki kinerja organisasi seperti efisiensi, efektivitas dan produktivitas.

Menurut Panggabean,<sup>30</sup> Pelatihan dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sekarang, sedangkan pendidikan lebih berorientasi kepada masa depan dan lebih menekankan pada peningkatan kemampuan seseorang untuk memahami dan menginterpretasikan pengetahuan.

Berdasarkan referensi pembelajaran kemasyarakatan, pelatihan dimaknai sebagai sebuah kegiatan atau pekerjaan melatih untuk memperoleh kemahiran ataupun kecakapan, oleh karena pelatihan dikaitkan dengan pekerjaan tertentu.<sup>31</sup> Menurut DeCenzo dan Robin,<sup>32</sup> *“Training is a learning experience in that it seeks a relatively permanent change in an individual that will improve the ability to perform on the job.”* Ini berarti bahwa pelatihan adalah suatu pengalaman pembelajaran di dalam mencari perubahan permanen secara relatif pada suatu individu yang akan memperbaiki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya itu.

Pelatihan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Seperti halnya menurut Prijono bahwa model

---

<sup>30</sup>Mutiara Panggabean S., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004)

<sup>31</sup> Ihat Hatimah. dkk. *Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan*. (Jakarta. Universitas Terbuka, 2007), hlm. 4.4

<sup>32</sup> DeCenzo and Robbins, *Human Resource Management*, Sixth Edition, (New York, John Wiley & Sons, Inc. 1999), hlm.227

yang digunakan dalam pengembangan ekonomi masyarakat salah satunya adalah *the development approach*, yaitu melakukan kegiatan dengan memusatkan pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.<sup>33</sup>

Pelatihan manajemen industri dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran kepada masyarakat dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil industri yang dihasilkan dari hasil pertaniannya. Pelatihan manajemen industri dapat berupa pelatihan mengenai pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil komoditas pertanian agar dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Pengolahan adalah suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya yang diwujudkan dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengolahan hasil pertanian adalah pemanfaatan hasil pertanian atau hasil sumber daya alam agar dapat menghasilkan suatu barang olahan atau bahan jadi agar dapat memiliki manfaat dan nilai jual.

Pengemasan adalah suatu kegiatan melindungi produk yang akan didistribusikan atau dipasarkan kepada konsumen agar terjaga keamanan dan kualitasnya. Hal tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kotler Dan Keller,<sup>34</sup> bahwa pengemasan adalah kegiatan dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Sedangkan menurut *World Trade Organization* (WTO), pengemasan adalah suatu sistem terpadu untuk mengawetkan, melindungi, menyiapkan produk, hingga siap untuk

---

<sup>33</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 120

<sup>34</sup> Kotler dan Keller. *Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13.*(Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 27

ditransportasi dan didistribusikan ke konsumen dengan cara yang efektif, efisien, mudah dan murah.

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan- kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.<sup>35</sup> Sehingga dapat disimpulkan pemasaran merupakan puncak dari kegiatan usaha hingga produk dapat beredar di kalangan konsumen.

Pelatihan manajemen hasil industri pertanian akan memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian daerah karena telah dibekali proses manajerial dan teknik pemanfaatan sumber daya yang ada. Peluang usaha di sektor pertanian semakin meningkat karena adanya peningkatan permintaan domestik sejalan dengan penambahan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran masyarakat akan gizi, terbukanya sistem perekonomian nasional.

Perkembangan perekonomian yang pesat serta wacana mengenai perdagangan bebas mengharuskan perusahaan meningkatkan nilai perusahaannya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai keunggulan daya saingnya, untuk itu perusahaan membutuhkan pihak lain. Perusahaan perlu melakukan kemitraan atau kerja sama dengan pihak lain, baik dengan supplier, distributor, konsumen bahkan dengan pesaingnya.

Secara konseptual kemitraan usaha dapat diartikan suatu jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga dapat saling memerlukan,

---

<sup>35</sup> Basu Swastha Dharmamesta dan T. Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Perilaku Konsumen*, ( Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 4



menguntungkan dan memperkuat.<sup>36</sup> Kemitraan usaha juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip kerjasama saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.<sup>37</sup>

Menurut Martodireso dan Widada,<sup>38</sup> kemitraan usaha merupakan suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam arti pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan pemasaran sarana produksi barang dan jasa memerlukan adanya bimbingan dan penampungan hasil. Saling memperkuat berarti antara satu pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya sama-sama melaksanakan etika bisnis, keduanya sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan saling membutuhkan sehingga memperkuat kesinambungan dalam bermitra, yang mana melalui upaya saling menguntungkan tersebut pengusaha dapat memperoleh peningkatan pendapatan disamping juga adanya kesinambungan dalam usaha.

Sedangkan Sandra Pratama Sutrisno<sup>39</sup> sebagaimana mengutip Kusnaedi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan umum pola kemitraan usaha adalah sebagai berikut: pertama, untuk mengatur kerjasama yang seimbang dan saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil atau peternak; kedua, memberikan iklim usaha yang lebih baik pada peternakan kecil; dan ketiga, mendorong terciptanya pemerataan berusaha dan peningkatan pendapatan semua pihak.

---

<sup>36</sup> Yuninda Gerdiana Putri dan Rosidah, "Kemitraan Usaha Total Quality Management", makalah kuliah Kewirausahaan pada Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Tahun 2012.

<sup>37</sup> Soemardjo, *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2004), hlm. 2.

<sup>38</sup> Martodireso dan Widada, *Agribisnis Kemitraan Usaha: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 5.

<sup>39</sup> Kusnadi dalam Sandra Pratama Sutrisno, *Pengertian Kemitraan Usaha: Bahan Mata Kuliah Manajemen Kewirausahaan* dalam <https://pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan/> diakses tanggal 23 Juli 2017.

Secara normatif, landasan kemitraan usaha terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 dijelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Adapun Usaha Menengah dan atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil. Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Dalam hal ini, Menteri Koperasi dan UKM memiliki kewenangan dan tugas yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam semua sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.<sup>40</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, Marindo<sup>41</sup> telah menjelaskan bahwa pola kemitraan pada dasarnya merupakan suatu pola kerjasama antara pengusaha atau pemilik modal sebagai inti dengan pengusaha lainnya sebagai plasma dalam upaya pengelolaan usaha. Pola kemitraan tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan wilayah melalui pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang pelaksanaannya lebih ditekankan pada pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

---

<sup>40</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Usaha Kecil dan Menengah.

<sup>41</sup> Marindo, "Kemitraan Usaha Peternak dan Penguasaha dalam Peternakan Ayam", artikel yang ditulisa Sandra Pratama Sutrisno dalam <https://pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan/> diakses 23 Juli 2017.

Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra. Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif. Bagi usaha kecil kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil.

Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berfikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawanan. Oleh karena itu, kemitraan merupakan salah satu instrumen yang strategis bagi pengembangan usaha kecil, tetapi ini tidak berarti bahwa semua usaha kecil bisa segera secara efektif dikembangkan melalui kemitraan. Dalam konteks inilah diperlukan adanya dukungan pemerintah dan pengusaha besar untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Demikian halnya bagi pengusaha informal atau yang sangat kecil skala usahanya dan belum memiliki dasar kewirausahaan yang memadai, kemitraan dengan usaha besar belum tentu efektif karena belum tercipta kondisi saling membutuhkan. Sedangkan yang terjadi adalah usaha kecil membutuhkan usaha besar sedangkan usaha besar tidak merasa membutuhkan usaha kecil. Usaha kecil yang demikian barangkali perlu dipersiapkan terlebih dahulu, misalnya dengan memperkuat posisi transaksi melalui wadah koperasi atau kelompok usaha bersama (prakoperasi) dan pembinaan kewirausahaan.

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, peneliti berpendapat bahwa demikian penting kiranya memahami secara detail bagi kalangan

pelaku usaha mengenai manajemen hasil industri pertanian, berbagai aspek kewirausahaan dan bergabung dalam wadah koperasi, usaha-usaha yang sangat kecil atau informal tersebut secara bersama-sama akan memiliki kedudukan dan posisi transaksi yang cukup kuat untuk menjalin kemitraan yang sejajar, saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dengan usaha besar mitra usahanya.

## **2. Ruang Lingkup Pelatihan Manajemen Industri Hasil Pertanian**

Sementara itu dalam Islam, terdapat seperangkat prinsip dan asas ekonomi yang mengatur bahwa ada kewajiban bagi orang yang mampu untuk membantu orang yang fakir/miskin. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang memuat ajaran tentang keharusan menjaga tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, amar ma'ruf nahi munkar, tolong-menolong dan toleransi menjadi prinsip umum bagi pengentasan kemiskinan. Salah satu strategi yang harus dirancang adalah membangun paradigma pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah yang ditujukan bagi upaya pengentasan kemiskinan dalam pembangunan ekonomi.

Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi dijadikan dasar hukum bolehnya melakukan kemitraan usaha dalam sistem ekonomi Islam adalah Al-Qur'an, Hadits Nabi dan ijtihad merupakan landasan hukum paling fundamental bagi umat Islam, untuk melakukan akad dan memiliki harta yang dibenarkan menurut ketentuan syara'. Bahkan para ulama jumhur sepakat bahwa akad dan pemilikan harta dalam bermuamalah hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam al-Quran banyak dijelaskan ayat yang menjelaskan kebolehan melakukan kegiatan bisnis melalui pemanfaatan harta kekayaan. Pada prinsipnya Allah SWT membolehkannya seperti tercantum dalam QS al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihالalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Kemitraan bisnis dapat pula diaplikasikan salah satunya dalam kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. Menurut Sudarsono sebagaimana dikutip oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini<sup>42</sup>, apabila seseorang menukar sesuatu barang dengan barang yang lainnya dengan cara tertentu (akad) inilah yang disebut “jual beli”. Dipertegas oleh Hamzah Ya’kub<sup>43</sup> yang menjelaskan bahwa dasar hukum dari perniagaan termasuk juga didalamnya jual beli adalah firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Demikian pula larangan memakan riba sebagaimana ditegaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

<sup>42</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayat al-Ahyar* (Terjemah M. Thalib), (Surabaya: Bina Ilmu, 1997, 156).

<sup>43</sup> Hamzah Ya’kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1993), h. 72-73.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>44</sup>

Adapun tata cara transaksi yang dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam diterangkan QS al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
 فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Soenardjo, dkk., *op.cit.* h. 69.

<sup>45</sup> *Ibid.*

Beberapa ayat al-Quran di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa pada prinsipnya Islam membolehkan akad dan memiliki harta sepanjang dasar dan tujuan melakukan akad dan pemilikan harta tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, serta juga ditujukan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Kemudian dalam hadits Nabi ada beberapa hadist Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan langsung dengan tata cara pengelolaan harta dalam kegiatan bisnis. Diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang menegaskan bahwa:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان)

Jual beli itu hanya sah bila saling merelakan.

Hadits lainnya yang menjadi dasar hukum kebolehan jual beli adalah berasal dari Ruf'ah bin Rafi' diriwayatkan al-Bazar dan disahkan oleh hakim:<sup>46</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ َ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه رفاعه بن رافع وابن ماجه وصححه الحاكم)

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik; Nabi berkata: Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.

Berdasarkan beberapa hadits hukum di atas, dapat dirumuskan bahwa pada prinsipnya, Islam juga membolehkan akad dan memiliki harta sepanjang dasar dan tujuan melakukan akad dan pemilikan harta tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, serta juga ditujukan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Terjemah A. Hasan), (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 1994) dan Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 193.

<sup>47</sup> Penjelasan lebih lengkap mengenai konsep *maslahat* dan *maqashid al-syariah* banyak dijelaskan oleh Imam al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1416 H/1996 M), Jilid 2, hlm. 321-325.

Selain ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menjadi dasar hukum sekaligus dalil bolehnya melakukan kemitraan usaha dalam bentuk pengelolaan harta adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata "*juhd*" yang berarti sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu perbuatan. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam bidang jurisprudensi (fiqh) untuk menyatakan salah satu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama madzhab dan menyusul pembentukannya. Apabila suatu kasus tidak ditemukan penjelasannya dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka ia harus berijtihad dengan *ra'yu*-nya.<sup>48</sup>

Ijtihad dapat dikatakan sebagai rekonstruksi pemikiran seorang faqih di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum baru yang dilakukan melalui penalaran akal secara mendalam disertai bukti-bukti dan hujjah yang kuat dengan tetap berpegang kepada sumber yang pokok yakni al-Qur'an dan Sunnah.<sup>49</sup> Karena ia merupakan rekonstruksi pemikiran akal, maka terdapat dua kecenderungan produk ijtihad, yaitu bisa jadi hasil ijtihad seseorang itu benar, tapi bisa juga keliru.

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, landasan hukum kemitraan usaha didasarkan kepada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997. Kedua regulasi tersebut menjelaskan bahwa kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Berdasarkan landasan hukum di atas, maka kemitraan usaha hendaknya berdasarkan asas sukarela dan suka sama suka. Dalam kemitraan

---

<sup>48</sup> Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence* (Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1986) diterjemahkan Munir, *Qiyas Penalaran Analogis Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka, 2001), h. 58.

<sup>49</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 152-155.



harus dijauhkan “kawin paksa”. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bermitra harus sudah siap untuk bermitra, baik kesiapan budaya maupun kesiapan ekonomi. Jika tidak, maka kemitraan akan berakhir sebagai penguasaan yang besar terhadap yang kecil atau gagal karena tidak bisa jalan. Artinya, harapan yang satu terhadap yang lain tidak terpenuhi, maka beberapa alasan terjadi kemitraan usaha dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profit atau sales pihak-pihak yang bermitra;
- b. Memperbaiki pengetahuan situasi pasar;
- c. Memperoleh tambahan pelanggan atau para pemasok baru;
- d. Meningkatkan pengembangan produk;
- e. Memperbaiki proses produksi;
- f. Memperbaiki kualitas;
- g. Meningkatkan akses terhadap teknologi.

Dengan demikian, penulis dapat merumuskan sebagai berikut: pertama, kemitraan usaha sangat dianjurkan dan dibolehkan dalam sistem ekonomi syari'ah; kedua, kemitraan usaha merupakan alat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan sistem ekonomi syari'ah; ketiga, peranan pemerintah dan pengusaha besar sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi syari'ah melalui kemitraan usaha; dan keempat, perlu komitmen semua pihak dalam mengatasi semua hambatan kemitraan usaha di Indonesia.

### **3. Bentuk-bentuk Pelatihan Manajemen Industri Hasil Pertanian**

Di setiap program pendidikan, apapun bentuk dan satuannya pelatihan merupakan salah satu komponen penting yang harus diadakan. Begitu pula dengan satuan pendidikan manajemen industri yang dilaksanakan melalui program. Mengingat program ini merupakan salah satu unggulan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih berkembang dan maju, maka

diperlukan pelatihan yang memadai dan komprehensif. Komponen utama yang berinteraksi langsung dengan berbagai komponen lainnya, seperti peserta pelatihan, kurikulum, metode, media, waktu, proses pembelajaran, lingkungan dan lain sebagainya. Adapun bentuk-bentuk pelatihan manajemen industri hasil pertanian seperti pelatihan, penyuluhan atau bahkan pendidikan profesi.<sup>50</sup>

a. Pelatihan

Poerwadarminta (1984) memberikan arti kepada “pelatihan” sebagai pelajaran untuk membiasakan atau memperoleh sesuatu kecakapan. Flippo (1961) menegaskan bahwa pelatihan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengetahuan dan kecakapan agar karyawan dapat mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Berdasarkan kepada uraian di atas, pelatihan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan sengaja, terorganisir dan sistematis di luar sistem persekolahan untuk memberikan dan meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu kepada kelompok tenaga kerja tertentu dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang mengutamakan praktek daripada teori, agar mereka memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memahami dan melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan cara yang efisien dan efektif.

Beberapa manfaat yang berharga dari pelatihan adalah sebagai berikut : (1) dapat memberikan pengetahuan sikap dan keterampilan mengenai sesuatu pekerjaan; (2) dapat memberikan dasar yang lebih luas bagi pendidikan lanjutan; (3) dapat menambah pemahaman terhadap wawasan suatu pekerjaan; (4) dapat meningkatkan keterampilan dalam suatu pekerjaan; (5) dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam mengerjakan suatu pekerjaan; (6) dapat memberikan rasa puas terhadap suatu

---

<sup>50</sup> Dimiyati dan moejiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta . Rineka Cipta, 1996), h 132-134

pekerjaan; (7) dapat memberikan rasa sadar terhadap kesempatan-kesempatan untuk mencapai kemajuan; (8) dapat menambah perasaan tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan; (9) dapat menambah kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber manusia atau materi yang belum dimanfaatkan; (10) dapat memperkecil kecelakaan dalam melakukan suatu pekerjaan; (11) dapat memberikan keterampilan untuk melakukan perbaikan dalam suatu pekerjaan; (12) dapat memberikan didikan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan cara yang lebih baik; (13) dapat meningkatkan semangat kerja; (14) dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas kerja; (15) dapat mengurangi pengawasan terhadap suatu pekerjaan; dan (16) dapat meningkatkan kestabilan dan keluwesan organisasi atau lembaga.

Bentuk atau tipe pelatihan itu bermacam-macam. Bentuk pelatihan dapat dikategorikan kepada dua golongan, yaitu (1) pelatihan yang didasarkan kepada lembaga dan (2) pelatihan yang didasarkan kepada pekerjaan. Dilihat dari segi jenis pekerjaan, tipe program pelatihan itu ada tiga, yaitu (1) pelatihan formal; (2) pelatihan informal; dan (3) bentuk pelatihan lainnya.

#### b. Penyuluhan

Hakikat dari pembelajaran melalui penyuluhan adalah pembelajaran yang benar-benar asli, yang merupakan pengembangan dari proses pembelajaran yang berkembang selama ini, kendati belum sepenuhnya dipahami semua pihak akan tetapi merupakan merupakan nyawa dari pendidikan itu sendiri. Penyuluhan juga dikenal demikian sederhana akan tetapi akan tetapi penampilannya demikian dipahami secara utuh baik bagi mereka yang benar-benar memberikan perhatian khusus pada penyuluhan maupun bagi mereka yang kurang memberikan perhatian khusus. Dalam banyak hal penyuluhan tidak diperhatikan secara utuh akan tetapi bagi seorang profesional penyuluhan adalah merupakan bentuk keragaman

pendidikan dari upaya untuk mencerdaskan manusia. Dalam skala ranking penyuluhan sendiri dapat diurutkan secara berjenjang sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan merupakan bentuk dari aplikasi sains yang bersumber dari sejumlah penelitian, pengalaman yang beragam dan prinsip-prinsip yang relevan yang dihasilkan dari sains keperilaku, digabungkan dengan teknologi tepat guna berkembang menjadi kesatuan filsafat, prinsip, muatan dan metode yang diarahkan pada pemecahan masalah yang berhubungan dengan pendidikan luar sekolah terutama untuk pemuda dan orang dewasa;
- 2) Penyuluhan merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk melakukan perubahan perilaku dan keterampilan orang-orang yang bergabung dalam penyuluhan:
- 3) Penyuluhan didefinisikan sebagai proses pendidikan diarahkan dalam upaya memberikan pengetahuan bagi penduduk pedesaan dalam upaya meningkatkan keterampilan dalam meningkatkan kebermaknaan dan membantu mereka dalam membuat keputusan sesuai dengan lingkungan sekitar dimana mereka berada;
- 4) Penyuluhan ditujukan dalam membantu penduduk pedesaan dalam melakukan perubahan yang berkelanjutan dalam melakukan perubahan lingkungan fisik, kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui usaha perorangan dan kelompok. ditujukan untuk memungkinkan tersedianya untuk wilayah pedesaan, sesuai dengan prinsip keilmuan dengan memberikan sejumlah informasi, pelatihan dan bimbingan dalam upaya memecahkan masalah pertanian dan kehidupan diantara mereka;
- 5) Pendidikan penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan diantara orang-orang dalam kegiatan yang mudah dimengerti, bermuatan gagasan baru dan perbaikan teknologi mengenai praktek, dan memberikan kemungkinan untuk memanfaatkannya dalam keseharian dalam upaya

untuk memudahkan peningkatan standar hidup melalui kemampuan merealisasikan diri dan usaha mandiri:

- 6) Penyuluhan adalah sains yang bermuatan berbagai strategi perubahan pola perilaku manusia melalui inovasi pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan standar kehidupannya;
- 7) Penyuluhan merupakan proses yang berkelanjutan yang dirancang dalam upaya memberikan kesadaran pada orang-orang akan permasalahan serta berusaha untuk mencari pemecahan sendiri dalam memecahkannya. Didalamnya tidak hanya menekankan pada pendidikan untuk menemukan masalah dan metode akan tetapi memberikan aspirasi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik;
- 8) Penyuluhan pertanian merupakan jembatan penghubung antara penelitian dalam pertanian dengan masyarakat petani melalui proses pembelajaran dan berbagai ragam pengorganisasian;
- 9) Pendidikan penyuluhan merupakan sains terapan, pengetahuan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam mengarahkan perubahan dalam keseluruhan perilaku manusia yang demikian rumit;
- 10) Penyuluhan adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan individu, dimana melalui proses ini penduduk pertanian pedesaan ditingkatkan kesadarannya melalui bantuan penyuluh dalam upaya meningkatkan kondisi kehidupannya;
- 11) Penyuluhan adalah upaya untuk mengajar orang-orang mengenai bagaimana berpikir, bukan mengenai apa yang harus dipikirkan dan mengajar bagaimana orang-orang untuk mempredikasikan secara tepat mengenai kebutuhan dan menemukan cara untuk memecahkan permasalahan mereka dan membantu mereka untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan kepercayaan diri dalam memenuhi kebutuhannya;

- 12) Penyuluhan merupakan pendidikan di luar sekolah dimana orang dewasa dan pemuda melakukan pembelajaran sambil bekerja. Dalam proses ini terjadi kerjasama antara pemerintah, akademisi dan orang-orang dalam memberikan pelayanan dan pendidikan yang dirancang dalam upaya memenuhi kebutuhan orang-orang.
- 13) Penyuluhan dan penyuluhan pertanian adalah merupakan metode atau sekumpulan metode dimana praktek keilmuan dilaksanakan termasuk praktek dalam melakukan pemeliharaan tanaman;
- 14) Pendidikan penyuluhan adalah upaya untuk melakukan pendidikan mengenai apa yang mereka inginkan dan bagaimana bekerja dalam upaya memberi kepuasan pada mereka. Materi pendidikan bukan hanya sebatas isi pendidikan akan tetapi lebih pada upaya untuk memenuhi sendiri kepuasan mereka melalui kreativitas diri, meningkatkan kemauan dan keinginannya;
- 15) Penyuluhan adalah pendidikan bagi orang dewasa di luar sistem sekolah yang menekankan pada pilihan dan minat. Pendidikan ditujukan dalam upaya meningkatkan kebebasan mereka, melalui upaya untuk membantu dalam memanfaatkan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan dasar dari kehidupan demokrasi.

Jadi terdapat sejumlah faktor pendukung pada perkembangan penyuluhan yaitu dukungan masyarakat, perkembangan ilmu sosial dan perkembangan profesi yang mendukung pada wujud penyuluhan terutama yang berhubungan dengan pemahaman, objektivitas, kepercayaan, kemampuan melakukan perkiraan dan pengontrolan.

Dukungan yang sangat membantu antara lain diterbitkannya sejumlah jurnal seperti halnya jurnal pelayanan penyuluhan koperasi di Amerika dan Jurnal penyuluhan India, mendorong pada perubahan berpikir dan menjadi awal pada pengembangan profesi mengenai penyuluhan. Perkembangan

keilmuan penyuluhan dengan demikian tidak hanya bersifat sederhana dan seragam akan tetapi berkembang menjadi sangat bervariasi, rumit dan dinamis. Sejalan dengan lahirnya beberapa pandangan baru semakin berkembang pula kebutuhan akan penelitian dan semakin berkembangnya konsep baru dalam upaya mengatasi permasalahan.

Berdasarkan kepada pengamatan dalam melihat interaksi sosial yang berkembang, yang semula hanya untuk kepentingan melihat data kualitatif berkaitan dengan perilaku selanjutnya mendorong penelitian yang lebih luas dalam penelitian mengenai penyuluhan.

#### **4. Pola Pelatihan Manajemen Industri Hasil Pertanian**

Pola merupakan suatu bentuk atau model untuk menghasilkan sesuatu sehingga pola dapat diartikan sebagai metode, berikut pola pelatihan atau pembelajaran :

##### **a. Metode Proyek**

Cara penyajian perkuliahan yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi (mata perkuliahan yang berbeda) yang saling berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna.

##### **b. Metode Eksperimen**

Cara penyajian perkuliahan, dimana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari.

##### **c. Metode Tugas dan Resitasi/Review**

Cara penyajian pengajaran dimana dosen/guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar.

##### **d. Metode Diskusi**

Cara penyajian perkuliahan, di mana peserta didik-peserta didik dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama.

e. Metode Sosiodrama/Role Playing

Cara penyajian pengajaran dengan mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial.

f. Metode Demonstrasi

Cara penyajian bahan perkuliahan dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, dan disertai dengan penjelasan lisan.

g. Metode Problem Solving

Cara penyajian bahan perkuliahan yang dimulai dengan adanya masalah, kemudian mencari data-data pendukung untuk memecahkan masalah tersebut, menetapkan jawaban sementara, menguji kebenaran dan pada akhirnya menarik kesimpulan.

h. Metode karyawisata

Cara penyajian bahan perkuliahan dengan mengajak peserta didik mengunjungi tempat atau objek tertentu yang berhubungan dengan bahan yang dipelajari.

i. Metode Tanya jawab

Cara penyajian perkuliahan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Dari dosen/guru ke peserta didik atau dari peserta didik ke dosen/guru.

j. Metode Latihan

Cara penyajian bahan perkuliahan melalui training atau latihan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasan tertentu dan dapat juga digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan.

k. Metode Ceramah

Cara penyajian bahan perkuliahan dalam bentuk penyampaian informasi, keterangan atau uraian tentang suatu pokok persoalan secara lisan.



Untuk mengembangkan kemitraan usaha, Islam mengajarkan kepada para pemikir dan praktisi ekonomi Islam modern dan khususnya di Indonesia, terus berupaya merumuskan kembali falsafah dasar nilai-nilai ekonomi Islam untuk membuat rumusan baru bagi pembentukan *platform* lembaga keuangan syari'ah yang ideal. Akan tetapi, *platform* tersebut terkait dengan beberapa faktor determinan yang mempengaruhinya dalam proses pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, Muhammad menjelaskan bahwa faktor-faktor itu dapat digolongkan dalam empat aspek, antara lain:<sup>51</sup>

a. Sumber Modal (*Investible Resources*)

Setiap proses pembangunan membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga diperlukan mencari sumber-sumber modal yang digali dari potensi-potensi ekonomi yang dimiliki. Kelayakan modal tidak hanya menjadi kebutuhan negara-negara maju, tetapi juga khususnya negara-negara yang sedang berkembang, di mana Indonesia termasuk ke dalam kategori negara berkembang tersebut. Proses pembangunan yang berjalan sekarang ini tidak serta merta mengandalkan potensi ekonomi dalam negeri berupa pemanfaatan sumber daya alam atau sejenisnya, tetapi juga bergantung kepada kerja sama di bidang ekonomi dengan negara lain.

Secara mikro, pembangunan sistem ekonomi Islam di Indonesia dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah masih relatif mengandalkan potensi modal dalam negeri (*capital domestik*), di mana pihak swasta lebih banyak berperan menanamkan investasi di dalam struktur dan manajemen lembaga keuangan syari'ah. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya sejumlah Bank Syari'ah dan BMT yang dari segi modal termasuk kebijakan pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta. Kendati pun pemerintah telah memberikan payung hukum yang kuat, tetapi dari segi kebijakan publik pemerintah masih mengutamakan pembangunan atas infrastruktur perbankan konvensional.

---

<sup>51</sup> Muhammad. *op. cit.* hlm. 6-12.

Sedangkan dalam kerangka makro, tingkat partisipasi ekonomi pasar global dalam pembangunan ekonomi di Indonesia juga belum memberi perhatian besar bagi pembangunan ekonomi Islam. Ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan partisipasi kalangan investor asing dalam berinvestasi di lembaga keuangan konvensional, baik bank maupun non-bank. Bisa jadi ini disebabkan oleh prospektus lembaga keuangan syariah belum mampu dijadikan sebagai instrumen pokok dalam pembangunan ekonomi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>52</sup>

Namun demikian, tingkat ketahanan dan stabilitas ekonomi lembaga keuangan syariah yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi dan moneter telah menarik perhatian kalangan investor asing untuk membantu percepatan pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pinjaman hutang dari luar negeri menjadi pendukung bagi kelayakan modal yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Pada gilirannya, ini dapat mendorong terjadinya kenaikan angka rasio tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi karena adanya dukungan modal usaha.

#### b. Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Manusia merupakan subyek (*development agent*) yang berperan penting dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) yang cakap dan mampu jelas diperlukan untuk mengelola berbagai kegiatan ekonomi secara profesional, sebab SDM yang berkualitas merupakan komponen penting dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi. SDM dapat menjadi “penggerak” untuk membuat model perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan penilaian terhadap berbagai bentuk kegiatan ekonomi, menggali dan memanfaatkan potensi alam, mengelola dana,

---

<sup>52</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Kelembagaan Ekonomi Islam Dalam Perspektif Islam: Kajian Kritis Terhadap Kelembagaan Konvensional*, makalah dalam “Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam” untuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni 2003, hlm. 9-10.

membangun organisasi social, ekonomi, politik dan budaya dalam satu wadah “pembangunan”.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara simultan dan organis dengan proses pembangunan yang sedang berjalan dan hendak dicapai ke depan. Peningkatan kualitas SDM tersebut terkait dengan dua aspek: *Pertama*, keahlian dan profesionalisme (*professional quality*); dan *Kedua*, kualitas moral yang baik (*moral quality*).<sup>53</sup> *Professional quality* mengacu kepada kualitas kemampuan, keahlian dan etos kerja untuk melakukan semua tugas dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi secara proporsional. Dalam Islam, istilah *professional quality* yang dikehendaki adalah adanya suatu keseimbangan dalam melakukan tugas sesuai dengan hak dan kewajiban.<sup>54</sup>

Sedangkan *moral quality* merupakan dimensi moral yang mengacu kepada etika bisnis Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Qur’an dan Sunnah.<sup>55</sup> Seseorang tidak dibenarkan melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ekonomi yang dibenarkan menurut hukum syari’at, sebab syari’at menghendaki keadilan bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi hukum. Pada gilirannya, kualitas SDM yang dibentuk untuk mendukung pembangunan ekonomi hendaknya memiliki kemampuan (*skill*) dan moral yang baik.

#### c. Mental Wirausaha (*Entrepreneurship*)

Wirausaha (*enterpreneurship*) merupakan sikap mental yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu untuk membangun perekonomian bangsa. Joseph Schumpeter telah menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi sangat bergantung kepada adanya dinamika partisipasi masyarakat untuk berwirausaha dan mampu melakukan inovasi dalam berbagai kegiatan

---

<sup>53</sup> Muhammad, op. cit. hal. 9.

<sup>54</sup> Lihat QS 5:1, 2:180 & 188, 16:90 dan 59:7.

<sup>55</sup> Lihat QS 83:1-3, 16:90, 59:7, 9:34-35 dan 6:141.

ekonomi. Sebagai agama yang dinamis, Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk melakukan kegiatan wirausaha sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi.

Kemitraan usaha bukan hanya dilihat sebagai ilmu ekonomi (*economyc knowledge*), tetapi juga merupakan keahlian (*business skill*) untuk melakukan berbagai jenis inovasi dalam berbisnis. Kemitraan usaha dapat mendorong bagi terciptanya produk-produk usaha dan jasa yang baru, metode usaha baru, uoaya penemuan sumber usaha baru, peluang usaha dan peluang kerja yang baru serta pembetulan organisasi bisnis yang baru pula.

Sebagai contoh, keberhasilan pembangunan ekonomi Jepang antara lain didukung oleh 2 % kalangan wirausaha menengah dan 20 % wirausahawan kecil. Jika ini diterapkan dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia, maka wirausaha dapat menjadi instrumen bagi pembangunan ekonomi syari'ah.<sup>56</sup>

Namun demikian, perhatian pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah relatif masih minim. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kesulitan kalangan usaha kecil dan menengah dalam memperoleh modal kredit bantuan usaha dalam kegiatan bisnis. Padahal percepatan proses pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan terwujud jika tidak memprioritaskan kegiatan sektor riil yang umumnya dilakukan oleh kalangan usaha kecil dan menengah. Perhatian terhadap kalangan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah dewasa ini antara lain melalui kredit usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh BMT-BMT, BPR Syari'ah dan Bank Umum Syariah (BUS).

#### d. Perangkat Teknologi (*Technology*)

Di samping ketiga faktor di atas, teknologi juga merupakan faktor yang paling determinan dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi.

---

<sup>56</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2000) hlm. 4-5.

Teknologi juga dapat menjadi perangkat utama yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha yang cepat, tepat, efektif dan efisien. Dewasa ini, teknologi merupakan perangkat pokok yang menunjang pelayanan produk dan jasa yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah, karena masyarakat lebih menghendaki kemudahan dan keserbapraktisan memperoleh pelayanan yang didukung dengan sarana penunjang yang memadai.<sup>57</sup>

## 5. Tujuan Pelatihan Manajemen Industri Hasil Pertanian

Di Negara-negara maju, kemitraan usaha muncul karena adanya tuntutan pasar, atas dasar tanggung jawab bersama, mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Menengah dan Usaha Kecil, dan dalam rangka meningkatkan daya saing nasionalnya. Pola dan sistem kemitraan dikembangkan oleh suatu perusahaan hingga menjadi *Good Practice*. Lima jenis kemitraan yang dikembangkan di Eropa dan dapat ditiru:<sup>58</sup>

- a. *Buying and Selling* yang meliputi kegiatan *suppliers* dan *subcontracting*;
- b. *Positive Restructuring* yang meliputi: *outsourcing*, *spin offs*, *management by-outs*, *community renewal* dan *trade offs*;
- c. *SME Support* yang meliputi *start-up companies*, mentoring, kerjasama penelitian dan pengembangan (R&D) dan bantuan ekspor;
- d. *Training* dan *Education*, misalnya untuk untuk *supplier* dan magang serta *recruitment* calon mitra;
- e. *Local Focus* adalah kegiatan kemitraan dengan tujuan mengembangkan ekonomi wilayah.

Kegiatan dalam bentuk latihan manajemen dan ketrampilan, magang, studivisit dan alih teknologi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memodernisasi usaha kecil. Oleh karena itu, agar kesenjangan manajemen dan teknologi antara usaha besar dan usaha kecil tidak terlalu

---

<sup>57</sup> Muhammad, *op.cit.* hlm 11-12.

<sup>58</sup> *Ibid.*

jauh ketinggalan, maka pengembangan SDM harus selalu menjadi agenda kemitraan.

Kemitraan usaha juga bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukanlah proses merger atau akuisisi. Kemitraan usaha yang diinginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun syarat-syarat kemitraan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan umum yang sama;
- b. Kesetaraan;
- c. Saling menghargai;
- d. Saling memberi kontribusi;
- e. Ada efek sinergi;
- b. Saling menguntungkan.

Masyarakat pelaku usaha akan memperoleh berbagai keuntungan dari kegiatan kemitraan usaha, antara lain: pertama, adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang jelas, terukur dan rasional; kedua, adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi; ketiga, transaksi dapat dilakukan dalam rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang; keempat, terhindar dari praktek-praktek bisnis yang monopolistik, eksploitatif dan diskriminatif; dan kelima, adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Kedadaan demikian, lebih memungkinkan pelaku kemitraan usaha terhindar jauh dari praktek bunga yang mengandung kesamaran (*gharar*) dan melipatgandakan keuntungan (*riba*). Atas dasar itu, tidak ada alasan yang lebih rasional untuk meragukan kemitraan usaha berbasis syari'ah baik dari segi hukum, etika, kejelasan untung dan rugi serta ketahanan institusi dari

keadaan pailit. Praktek bagi hasil tidak didasarkan kepada ketentuan yang kaku (*rigid*), seperti dalam praktek bunga (*riba'*) yang ditentukan oleh salah satu pihak dan mengikuti standar fluktuasi nilai tukar mata uang. Pembagian untung dan rugi (*profit and loss sharing*) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi didasarkan kepada perolehan keuntungan yang fleksibel. Kedua belah pihak dapat saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pertimbangan kelayakan dan rasionalitas sesuai kesepakatan.<sup>59</sup>

Perkembangan kemitraan usaha yang berbasis ekonomi Islam di Indonesia masih sedikit dikarenakan beberapa sebab berikut: pertama, keterbatasan sarana dan prasana penunjang yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah; kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan pengetahuan serta kemampuan praktis (*skill*) di bidang kegiatan usaha; ketiga, masih minimnya sosialisasi tentang ekonomi syari'ah kepada masyarakat bawah, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan baru untuk mendorong proses pemberdayaan sistem ekonomi syariah melalui kemitraan usaha. Masyarakat dewasa ini relatif membutuhkan sistem pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan praktis. Misalnya melalui kemitraan usaha dengan lembaga keuangan syariah dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan praktis tersebut umumnya masih dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional.

Terlebih lagi lembaga keuangan konvensional tersebut telah lama berperan dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Sementara itu

---

<sup>59</sup> M. Dawam Rahardjo, *Wacana Studi Ekonomi Islam Kontemporer*, makalah dalam "Seminar Ekonomi Islam" di Jakarta, 10 Maret 2001, hlm. 5. Penjelasan tentang bagi hasil (*profit-sharing*) dalam bentuk mudharabah dapat dilihat dalam Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'* (Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah Indonesia), hlm. 53, Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, hlm. 34-42 dan tentang Musyarakah dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977) hlm. 294 dan Abu Bakar Ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Bandung: Al-Ma'arif, t.th), hlm. 280.

pada praktiknya ternyata tidak semua lembaga keuangan syariah memberikan pelayanan serupa karena keterbatasan aspek infra-struktur dan supra-struktur yang dimilikinya. Sehingga kemitraan usaha lembaga keuangan syariah dan kalangan pelaku usaha belum optimal.

Untuk mencapai tujuan kesejahteraan ekonomi melalui kemitraan usaha, salah satunya dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan usaha sektor riil. Kegiatan usaha sektor riil, sejenis kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dapat menjadi pilar penyangga ketahanan sistem ekonomi nasional. Secara mikro, kegiatan usaha kecil dan menengah merupakan bentuk kegiatan usaha yang paling produktif dan dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sedangkan secara makro usaha kecil dan menengah juga dapat tumbuh menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang besar dan juga berperan dalam skala global.

Pada gilirannya, peneliti merumuskan bahwa kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar melalui dukungan pemerintah dan swasta dapat menjadi acuan rancang bangun program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistematis dan terpadu. Hal tersebut ditujukan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, potensi ekonomi kerakyatan hendaknya dapat diarahkan untuk berpartisipasi dalam membangun pilar-pilar ekonomi melalui kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar.



**BAB III**  
**KONDISI OBYEKTIF MASYARAKAT DESA WARINGINSARI**  
**KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR**

**A. Sejarah Singkat**

Secara geografis letak wilayah Kota Banjar adalah di antara 108<sup>0</sup>28'00" – 108<sup>0</sup>40'00" Bujur Timur dan 7<sup>0</sup>19'30" – 7<sup>0</sup>26'30" Lintang Selatan (berdasarkan Peta Rupa Bumi Bakosurtanal), yaitu di bagian timur wilayah Propinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah.

Luas wilayah Kota Banjar berdasarkan penjelasan UU No.27/2002 adalah kurang-lebih 113,49 km<sup>2</sup> atau 11.349 Ha. Sementara berdasarkan pengukuran pada Peta Rupa Bumi Bakosurtanal, seperti dikemukakan dalam Data Potensi Kota Banjar dari Bapeda Kota Banjar tahun 2003, luas wilayah Kota Banjar adalah 13.197,23 Ha, dengan rincian menurut kecamatan yaitu:<sup>60</sup>

1. Kecamatan Banjar : 2.623,84 Ha
2. Kecamatan Pataruman : 5.405,66 Ha
3. Kecamatan Purwaharja : 1.826,74 Ha
4. Kecamatan Langensari : 3.340,99 Ha

Secara keseluruhan, luas wilayah Kota Banjar berdasarkan tekstur tanah seluas 13.197,23 Ha, dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, Sebelah Timur dengan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Sebelah Barat dengan Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dan sebelah Selatan dengan Kecamatan Pamarican dan Lakbok Kabupaten Ciamis.

---

<sup>60</sup> Editor, "Profil Kota Banjar" <http://kotabanjar.go.id/> diakses tanggal 18 Agustus 2018.

Kota Banjar adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dan menjadi salah satu kawasan andalan (yaitu kawasan yang mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya).

Bentangan morfologi/topografi wilayah Kota Banjar bervariasi sejak dari puncak perbukitan hingga hamparan dataran. Ketinggian Kota Banjar berkisar antara 0 - 400 m dpl. Posisi tertinggi di atas permukaan laut adalah puncak bukit Gunung Sangkur, dengan ketinggian +356 m DPL, sementara posisi terendah adalah di bagian timur di tepi Sungai Citanduy (Desa Waringinsari Kecamatan Langensari), dengan ketinggian +16 m DPL.

Ada 2 kompleks perbukitan yang utama, dan sejumlah perbukitan/bukit minor (yang lebih kecil). Komplek perbukitan utama yang pertama adalah kompleks perbukitan Gunung Sangkur, yang terletak di Kecamatan Pataruman, dan terdiri atas beberapa puncak bukit, yaitu: Gunung Sangkur (+356 m), Pasir Huni (+227 m), Pasir Sireum (+226 m), Pasir Cabe (+251 m), Pasir Batukarut (+253 m), dan lainnya. Komplek perbukitan utama yang kedua adalah kompleks perbukitan Gunung Babakan, yang terletak di Kecamatan Purwaharja, dengan puncaknya yaitu Gunung Babakan (+243 m).

Desa Waringinsari merupakan pecahan dari wilayah desa Langensari, pada tahun 1979 yang sebelumnya merupakan kampung Waringinsari dan kampung Kedungwaringin. Atas keinginan warga masyarakat kedua kampung tersebut diatas untuk membentuk sebuah desa sehingga tokoh masyarakat yaitu bapak Rahlan Natawisastro, bapak Muhamad Badri, bapak Marto Naptali, Partoyusa dan tokoh masyarakat lainnya berembung tentang pembentukan desa baru dan mengusulkan kepada Pemerintah Desa Langensari untuk diadakan pemekaran desa yaitu kampung Waringinsari dan kampung Kedungwaringin menjadi satu desa sekaligus merumuskan nama

desa. Pengambilan nama desa Waringinsari bermula dari sebuah pohon beringin yang berada di kampung Kedungwaringin terletak di pesawahan sehingga banyak warga masyarakat khususnya para petani sering berteduh dibawah pohon beringin tersebut pada saat teriknya matahari.

Penetapan nama desa Waringinsari sekarang berasal dari sejarah pohon beringin tersebut yang mempunyai arti bahwa *Waringin* (dalam bahasa sunda) berarti Pohon Beringin sedangkan Sari (dalam bahasa jawa) inti. Jadi nama desa Waringinsari dapat diartikan inti sebuah pohon yang memberikan rasa teduh dan nyaman bagi masyarakat yang berada dibawahnya.

Berkat kegigihan dari tokoh masyarakat kedua kampung yaitu Waringinsari dan Kedungwaringin akhirnya mendapat persetujuan dari Pemerintah diatas pada waktu itu, maka pada tahun 1979 terbentuklah desa Waringinsari yang dipimpin oleh kertiker/penjabat sementara yaitu bapak Muhid sebagai Kepala Desa, setelah kepala desa ada maka dibentuklah perangkat desa dengan sekretaris desa saudara Ahmad Sukarjo, Kepala Kampung Waringinsari yaitu saudara Walitu dan Kampung Kedungwaringin yaitu saudara Sukiman dan berjalan sampai dengan tahun 1981.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Desa Waringinsari tahun 2014 – 2019 yang hendak dicapai adalah: ***Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Waringinsari dalam Kebersamaan Pembangunan.***

Pengertian iman secara terminologi adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Sedangkan taqwa secara terminologi adalah takut kepada Alloh berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan tidak melanggar dengan menjauhi segala larangan-Nya serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa.

Kesejahteraan masyarakat Desa adalah terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat baik jasmani dan rohani, serta perasaan aman tentram dan damai dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbangsa di lingkungan Desa Waringinsari. Kebersamaan Pembangunan adalah peran masyarakat dan pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang ada di wilayah Desa Waringinsari secara bersama-sama.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh pemangku kepentingan desa, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Menggali dan menumbuh kembangkan nilai-nilai kebersamaan dan memantapkan aktualisasi pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
3. Mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan bersih.
4. Memelihara stabilitas masyarakat yang aman, tertib, damai dan sejahtera.
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan kinerja pembangunan desa.

## **B. Kondisi Alam dan Geografis**

Desa Waringinsari merupakan salah satu desa di Wilayah Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dengan kondisi umum sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Luas dan Batas Wilayah 684,924 Ha
  - a. Luas Wilayah Desa Waringinsari adalah 684,924 Ha, terdiri dari:
    - Sawah Irigasi Teknis : 363,631 Ha

---

<sup>61</sup> Editor, "Profil Kota Banjar" <http://kotabanjar.go.id/> diakses tanggal 18 Agustus 2018.

- Sawah Tadah Hujan : 15 Ha
- Tegalladang : 75,484 Ha
- Pemukiman : 90,410 Ha
- Pekarangan : 99,974 Ha
- Lain-lain : 40,425 Ha

b. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Madura dan Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

*Batas Desa sebelah utara yaitu Sungai Citanduy.*

Sebelah Selatan : Desa Tambakreja dan Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

*Batas Desa sebelah selatan yaitu Sungai Apur (Saluran Pembuangan).*

Sebelah Timur : Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

*Batas Desa sebelah Timur yaitu Jalan dan Saluran Irigasi.*

Sebelah Barat : Desa Langensari dan Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

*Batas Desa sebelah Barat yaitu Jalan dan Saluran Pembuangan.*

2. Kondisi Geografis

- Ketinggian : 16 Meter
- Koordinat Bujur : 108.637512
- Koordinat Lintang : -7.362473

- Desa Terluar di Indonesia : Tidak
- Desa Terluar di Provinsi : Ya
- Desa Terluar di Kota : Ya
- Desa Terluar di Kecamatan : Ya

### 3. Iklim

- Curah hujan (mm) : 3.500
- Jumlah bulan hujan : 6 bulan
- Kelembaban udara (%) : 80
- Suhu rata-rata harian (oC) : 32
- Warna tanah : hitam kecoklatan
- Tekstur tanah : pasiran
- Kemiringan tanah (derajat) : 0,05

### 4. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa)

- a. Ke Pusat Kecamatan Langensari 1,2 km (3 menit)
- b. Ke Pusat Kota Banjar 16 km (26 menit)
- c. Ke Pusat Provinsi Bandung 164 km (3 jam 44 menit)
- d. Ke Pusat Ibu Kota Jakarta 310 km (6 jam 27 menit)

### 5. Tipologi Desa

Tipologi Desa Waringinsari secara menyeluruh:

- a. Berdasarkan letak/posisi geografis,
  - Morfologi/Topografi wilayah/kawasan, Perdesaan di dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut  $\pm 16$  meter.
  - Aliran sungai/river valley/catchmen area (DAS), Perdesaan di hilir (down – stream) yang batas wilayahnya bagian utara adalah sungai Citanduy.
  - Aksesibilitas wilayah (jalan, kereta api, sungai), Perdesaan dengan akses sedang/ ada akses dengan akses utama wilayah.

- b. Berdasarkan Kegiatan ekonomi atau produksi,
  - Perdesaan pertanian lahan basah yaitu Sawah tadah hujan dan Sawah beririgasi biasa.
  - Berdasarkan Perkembangan dan kekhususan, Perdesaan konvensional, asli, Perdesaan semi urban/mulai bergeser mengarah urban, Perdesaan dekat perkotaan.
  - Berdasarkan Lay-out, Hamlet system → dukuh/dusun.
- c. Tipologi Masyarakat Desa dilihat dari segi mata Pencaharian pokok, yaitu:
  - Desa Pertanian (dalam arti sempit), Desa Pertanian berlahan basah dan irigasi baik, Desa Pertanian berlahan kering dan sawah tadah hujan.
  - Desa Pertanian (dalam arti luas), Desa Perkebunan milik masyarakat dikelola secara konvensional.

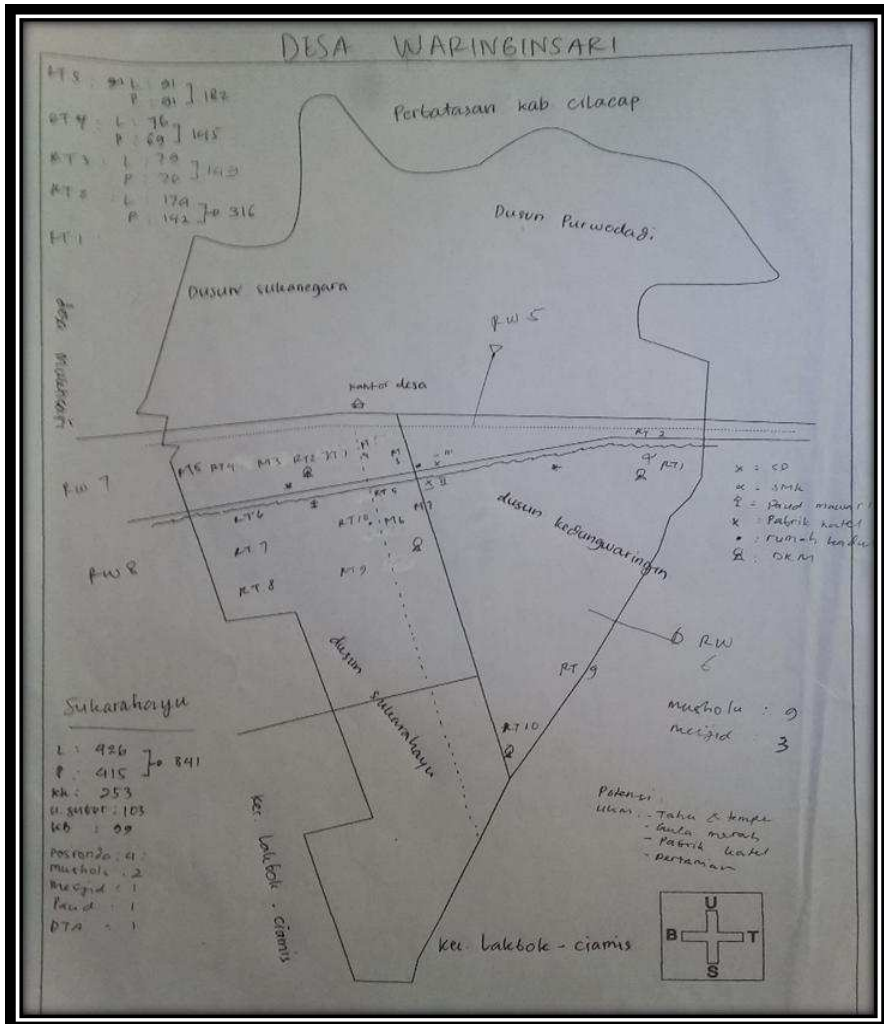
Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan, keadaan tipologi Desa Waringinsari menunjukkan persawahan klasifikasi swakarya katagori mula, dengan rincian:

- Ekonomi masyarakat : 0,65
- Pendidikan masyarakat : 0,54
- Kesehatan masyarakat : 0,79
- Keamanan dan ketertiban : 0,96
- Kedaulatan politik masyarakat : 0,69
- Peranserta Masyarakat : 0,89
- Total indek : 0,75

### **C. Kondisi Monografi**

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui gambaran umum data monografi Desa Waringinsari sebagai berikut:

Nama Desa : Waringinsari  
 Tahun Pembentukan : 1979  
 Nomor Kode Wilayah : 3279042003  
 Kode Pos : 46342  
 Kecamatan : Langensari  
 Kota : Banjar  
 Provinsi : Jawa Barat



**Gambar 3.1**  
**Peta Lokasi Desa Waringinsari**



1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dari 9.647 Jiwa
  - a. Laki-laki : 4.934 Jiwa 51,15 %
  - b. Perempuan : 4.713 Jiwa 48,85 %
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**  
**Desa Waringinsari Tahun 2017**

No	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 orang
2.	Belum bekerja	1.793 orang
3.	Bidan	1 orang
4.	Buruh harian lepas	737 orang
5.	Nelayan	1 orang
6.	Buruh Tani	22 orang
7.	Dokter	1 orang
8.	Guru	21 orang
9.	Industri	21 orang
10.	Karyawan BUMD	1 Orang
11.	Karyawan Bumh	2 orang
12.	Karyawan honorer	41 orang
13.	Karyawan Swasta	453 orang
14.	Kepala Desa	1 orang
15.	Kepolisian RI	3 orang
16.	Konstruksi	10 orang
17.	Lainnya	9 orang
18.	Mekanik	1.833 orang
19.	Mengurus rumah tangga	1 orang
20.	Nelayan	263 orang
21.	Pedagang	263 orang
22.	PNS	76 orang
23.	Pelajar	1.808 orang

24.	Pelaut	1 orang
25.	Pensiunan	37 orang
26.	Perangkat desa	15 orang
27.	Perdagangan	20 orang
28.	Pekebun	1.897 orang
29.	Sopir	18 orang
30.	TNI	10 orang
31.	Transportasi	9 orang
32.	Tukang Jahit	2 orang
33.	Ustadz	1 orang
34.	Wiraswasta	535 orang

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Islam : 9.447 Jiwa 97,93 %

Kristen : 189 Jiwa 1,96 %

Katholik : 11 Jiwa 0,11 %

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Desa Waringinsari Tahun 2017**

Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	1.588 Orang
Belum Tamat SD/Sederajat	957 Orang
Tamat SD/Sederajat	3.536 Orang
SLTP/Sederajat	2.012 Orang
SLTA/Sederajat	1.358 Orang
DI/DII	32 Orang
Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	40 Orang
Diploma IV/Strata I	120 Orang
Strata II(S2)	4 Orang

5. Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Desa  
 Lembaga Pemerintah dan Lembaga Sosial di Desa Waringinsari:
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
  - b. Lembaga Adat
  - c. BUMDES
  - d. Karang Taruna
  - e. RT/RW
  - f. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
  - g. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
  
6. Sarana dan Prasarana Fasos/Fasum
 

a. Kantor desa	1 buah
b. Prasarana Kesehatan	
1) Puskesmas	0 buah
2) Puskesmas pembantu	1 buah
3) Poskesdes	2 buah
c. Prasarana Pendidikan	
1) Perpustakaan Desa	1 buah
2) Gedung Sekolah PAUD	8 buah
3) Gedung Sekolah TK	0 buah
4) Gedung Sekolah SD	4 buah
5) Gedung Sekolah SMP	1 buah
6) Gedung Sekolah SMK	1 buah
7) Gedung Perguruan Tinggi	0 buah
d. Prasarana Ibadah	
1) Masjid	10 buah
2) Mushalla	39 buah
3) Gereja	4 buah
e. Prasarana Umum	
1) Lapangan Sepak Bola	1 buah

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 2) Lapangan Bola Volly | 2 buah |
| 3) Lapangan Tenis      | 6 buah |
| 4) Balai Pertemuan     | 5 buah |

#### **D. Kondisi Sosial dan Budaya**

Seperti kebanyakan daerah pedesaan di berbagai daerah dan khususnya desa-desa berbasis pertanian yang berada di wilayah Kota Banjar pada khususnya menunjukkan disparitas dan varian yang unik, di mana Desa Waringinsari menjadi salah satu desa berbasis pertanian yang sangat komplit. Kondisi umum sosial dan budaya di Desa Waringinsari menunjukkan data sebagai berikut:

##### 1. Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa waringinsari secara garis besar adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**  
**Desa Waringinsari Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Tingkat Kesejahteraan</b>	<b>Jumlah Keluarga</b>
1	Keluarga Prasejahtera	572
2	Keluarga Sejahtera I	414
3	Keluarga Sejahtera 2	494
4	Keluarga Sejahtera 3	1.069
5	Keluarga Sejahtera 3 plus	326

##### 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling penting di setiap wilayah karena hal tersebut termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga sarana dan prasarana

pendidikan haruslah memadai pula. Pada dasarnya sarana pendidikan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar sudah cukup memadai untuk mengentaskan program pemerintahan. Terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/MI, SLTP, SLTA/Sederajat. Ada juga lembaga pendidikan agama yang tersebar di wilayah Desa Waringinsari dan dapat terlihat dari tabel sarana pendidikan di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan Formal**  
**di Desa Waringinsari Tahun 2017**

Nama	Ter-akreditasi	Ter-daftar	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswa
			Pemerintah	Swasta	Desa		
1. Play Group	-	√	-	8	-	28	-
2. TK	-	√	-	-	-	-	-
3. SD/ sederajat	√	-	4	1	-	60	
4. SLTP/ sederajat	√	-	-	1	-	30	-
5. SLTA/ sederajat	√	-	-	1	-	35	-
6. PTN	-	-	-	-	-	-	-
7. PTS	-	-	-	-	-	-	-
8. SLB	-	-	-	-	-	-	-
9. Lembaga Pendidikan Agama							
a. DTA	-	√	-	-	-	57	-
b. DTW	-	√	-	-	-	57	-
c. Ponpes	-	√	-	-	-	15	-
10. Perpustakaan Desa	-	-	1	-	√	-	-
11. Taman Bacaan						-	-

Sumber: Profil Desa

Untuk sarana pendidikan Non Formal, di Desa Waringinsari tampaknya belum ada. Walaupun untuk beladiri telah ada persatuan olah raga yang ada di Desa Waringinsari, seperti pencak silat dan karate, namun hal tersebut tampaknya juga belum diresmikan sebagai lembaga yang sah untuk didirikan oleh pihak pemerintah dan hanya sekedar perkumpulan saja.

### 3. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hal yang penting dan harus diperhatikan oleh sitiap kalangan tak terkecuali oleh masyarakat itu sendiri. Kesehatan dapat dikatakan baik apabila sarana dan prasaranaa kesehatan tersedia atau memadai. Dalam lingkup pedesaan dengan adanya pusat kesehatan masyarakat merupakan hal yang membantu bagi masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah..

Desa Waringinsari merupakan desa di ujung timur Kota Banjar, berbatasan langsung dengan Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis. Untuk sarana Kesehatan cukup memadai, bahkan untuk proses persalinan, warga perbatasan banyak yang datang dan melakukannya di Rumah bersalin yang ada di Desa Waringinsari. Selain itu di Desa Waringinsari terdapat juga sarana kesehatan balita dan ibu hamil berupa Posyandu yang tersebar di wilayah Desa. Berikut tabel sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa wariginsari:

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan**  
**Desa Waringinsari Tahun 2017**

<b>Jenis Sarana Prasarana</b>	<b>Jumlah (Unit/Orang)</b>
Rumah sakit umum	-
Puskesmas	-
Puskesmas pembantu	1
Poliklinik/balai pengobatan	1

Apotik	-
Posyandu	10
Toko obat	-
Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	-
Gudang menyimpan obat	-
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	1
Rumah Bersalin	1
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-
Rumah Sakit Mata	-
Dokter umum	1
Dokter gigi	-
Dokter spesialis lainnya	-
Bidan	3
Paraji	10
Tukang pijat	11

Sumber: Profil Desa Waringinsari

#### 4. Agama

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim sehingga ada beberapa masyarakat yang menganut agama lain. Desa Waringinsari merupakan Desa yang memiliki masyarakat yang majemuk, Ini bisa kita lihat dari suku, adat-budaya, dan juga agama yang dianut oleh penduduknya. Sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, namun ada juga sebagian yang beragama Kristen dan Katholik.

Meskipun memiliki masyarakat yang majemuk dalam berbagai hal, namun kerukunan antar warga terjaga dengan baik, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis. Hubungan toleransi antar umat beragama tetap terjaga dengan baik karena adanya Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) yang *concern* membina hubungan antar penganut agama. Oleh karena itu, dapat dijelaskan di sini bahwa kondisi umum keberagaman agama di Desa Waringinsari bisa dilihat pada tabel sarana dan prasarana peribadatan sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Ibadah**  
**Desa Waringinsari Tahun 2017**

No	Jenis Sarana	Jumlah (Buah)
1.	Jumlah Masjid	10
2.	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	39
3.	Jumlah Gereja Kristen Protestan	3
4.	Jumlah Gereja Katholik	1
5.	Jumlah Wihara	-
6.	Jumlah Pura	-
7.	Jumlah Klenteng	-
8.	Lainnya	-

Sumber: Profil Desa Waringinsari

#### 5. Olah Raga

Olah raga merupakan salah satu kegiatan yang membuat badan menjadi sehat dan membuat badan menjadi segar. Ada pepatah bijak, pemuda sehat negara kuat. Hal ini menunjukkan peran olah raga sebagai salah satu penopang kesehatan kita. Wilayah Desa Waringinsari yang merupakan dataran rendah, sangat potensial untuk membuat saran olah raga. Sepak bola sebagai salah satu olah raga yang sangat digemari oleh pemuda, sudah ada sarananya berupa lapangan walaupun keadaannya belum maksimal. Selain itu sarana olah raga lainnya yang ada yaitu meja pingpong, lapang bulu tangkis, lapang voli. Berikut tabel sarana olah raga yang ada di wilayah Desa waringinsari:

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Sarana Prasarana Olahraga**  
**Desa Waringinsari Tahun 2017**

No.	Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1.	Lapangan sepak bola	1
2.	Lapangan bulu tangkis	3



3.	Meja pingpong	10
4.	Lapangan tenis	-
5.	Lapangan voli	5
6.	Lapangan golf	-
7.	Pacuan kuda	-
8.	Lapangan basket	-
9.	Pusat kebugaran	-
10.	Gelanggang Remaja	-
11.	Arum jeram	-

Sumber: Data Profil Desa Waringinsari

## 6. Kondisi Ekonomi

Berkembangnya perekonomian suatu wilayah tentunya erat hubungannya dengan perputaran keuangan yang ada wilayah tersebut. Lembaga Perekonomian Desa (LPD), biasanya memegang peranan penting. Koperasi, Bumdes, UPK, UP2K dan Raksa Desa adalah lembaga keuangan yang ada di wilayah Desa Waringinsari. Semakin banyak lembaga keuangan yang berada di suatu daerah maka kondisi ekonomi masyarakat tersebut dapat dikatakan baik, Berikut tabel jumlah lembaga ekonomi dan usaha yang ada di wilayah Desa Waringinsri:

**Tabel 3.8**  
**Jumlah Lembaga Ekonomi dan Usaha**  
**Desa Waringinsari Tahun 2017**

No	Jenis Lembaga Ekonomi	Jumlah /Unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus dan Anggota
1.	Koperasi Unit Desa	-	-	-
2.	Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-
3.	Koperasi lainnya	2	2	-
4.	Bumdes	1	2	505

5.	UPK	1	1	75
6.	Raksa Desa	1	1	35
7.	UP2K	1	1	23
	Jumlah	7	7	638

Sumber: Profil Desa Waringinsari

Sebagai salah satu wilayah yang berada di wilayah Kecamatan Langensari, Desa Waringinsari merupakan daerah pertanian. Kebutuhan akan modalpun meningkat, dengan semakin meningkatnya hasil dari pertanian itu sendiri. Untuk wilayah Desa Waringinsari baru ada lembaga ekonomi dan usaha. Sementara untuk Lembaga keuangan lainnya belum ada. Berikut tabel lembaga keuangan yang ada di Desa Waringinsari:

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Lembaga Keuangan**  
**Desa Waringinsari Tahun 2017**

No	Jenis Lembaga Keuangan	Jumlah /Unit
1.	Jasa Asuransi	-
2.	Lembaga Keuangan Non Bank	3
3.	Bank Perkreditan Rakyat	-
4.	Pegadaian	-
5.	Bank Pemerintah	-
	Jumlah	3

Sumber: Profil Desa Waringinsari

Berdasarkan data di atas bahwa desa Waringinsari mempunyai tiga lembaga keuangan non bank yaitu merupakan koperasi yang dimiliki oleh pihak pribadi atau masyarakat dan koperasi yang dijalankan oleh pemerintah setempat. Meskipun terkenal sebagai daerah pertanian, Desa Waringinsari juga memiliki masyarakat yang bergerak di sektor usaha/industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mulai dari industri rumahan yang

memproduksi makanan, alat rumah tangga, material bahan bangunan, kerajinan rumah tangga, rumah makan, dan pengolahan kayu.

Untuk jenis usaha atau sarana perdagangan yang ada di Desa Waringinsari meliputi pasar tradisioanal, kios/toko/warung, usaha peternakan, perikanan. Jasa kesenian juga merupakan salah satu ciri khas Desa Waringinsari. Musik atau kesenian tradisional yang ada yaitu kuda lumping, hadroh, janeng dan ada juga grup musik modern. Dalam beberapa aspek seni dan budaya, Desa Waringinsari menjadi salah satu contoh konkrit desa seni dan budaya di Kota Banjar.

Usaha lainnya yang ada di wilayah Desa Waringinsari yaitu, SPBU mini, pengecer gas dan bahan bakar minyak, serta usaha air minum kemasan atau isi ulang. Berikut tabel jumlah usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang ada di Desa Waringisari:

**Tabel 3.10**  
**Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/Industri**  
**Desa Waringinsari Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Jenis UMKM/Industri/Jasa</b>	<b>Jumlah/Unit</b>
	<b>UMKM/Industri</b>	
1.	Industri makanan	6
2.	Industri Alat rumah tangga	2
3.	Industri Material Bahan Bangunan	6
4.	Industri Kerajinan	15
5.	Industri Pengolahan kayu	1
6.	Lainnya	
	<b>Jasa Perdagangan</b>	
7.	Pasar Tradisional	1
8.	Jumlah Usaha Toko/Kios/Warung	135
9.	Usaha Peternakan	2

10.	Usaha Perikanan	5
11.	Usaha Perkebunan	-
12.	Lainnya	
	<b>Jasa Hiburan</b>	
13.	Group Musik/Band	1
14.	Kuda lumping	5
15.	Hadroh	5
16.	Janeng	1
17.	Lainnya	
	<b>Jasa Gas, Listrik, BBM dan Air</b>	
18.	Usaha Penyewaan Tenaga Listrik	-
19.	SPBU mini	1
20.	Pangkalan Minyak Tanah	-
21.	Pengecer Gas dan Bahan Bakar Minyak	5
22.	Usaha air minum kemasan/isi ulang	3
23.	<b>Jasa Lainnya</b>	

Sumber: Profil Desa Waringinsari

## **BAB IV**

### **HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Buah-Buahan kepada Kelompok Tani di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar**

Peningkatan kesejahteraan ekonomi merupakan suatu fenomena persoalan struktural dan multidimensional, karena sangat erat kaitannya dengan dimensi politik, sosial, ekonomi, aset, dan lain-lain. Misalnya, Wardi Bachtiar telah menggolongkan dimensi-dimensi kemiskinan tersebut kedalam dua kategori, yaitu; (1) kemiskinan alamiah, maksudnya kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. (2) kemiskinan struktural atau buatan, yakni kemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang memihak kepada kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang menyudutkan pihak lain.<sup>62</sup>

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia sudah banyak digulirkan, hanya saja pendekatannya masih bersifat parsial. Bila diamati terdapat pelajaran berharga dan mungkin sebagai penyadaran bagi para penyelenggara negara, bahwa kebijakan dalam melakukan pembangunan nasional pada umumnya, dan program peningkatan kesejahteraan pada khususnya yang menempatkan masyarakat pra sejahtera sebagai obyek pembangunan perlu dikoreksi.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut tentu perlu lebih melibatkan masyarakat prasejahtera sebagai subjek pembangunan, dan diharapkan peningkatan kesejahteraan tersebut nantinya

---

<sup>62</sup> Wardi Bachtiar, *Pengaruh Etos Kerja Terhadap Status Sosial Ekonomi Muslim Sunda Pemukiman Daerah Kumuh di Kota Madya Bandung*, (Bandung: Disertasi Unpad, 1995), hlm. 14.

dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya konsep pemberdayaan (*empowerment*) bagi masyarakat pra sejahtera.<sup>63</sup>

Konsep pemberdayaan merupakan strategi pembangunan yang digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Konsep ini dimulai sekitar 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an. Pada awal gerakan modern, konsep pemberdayaan ini bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam setiap kegiatan pemberdayaan ekonomi, seluruh anggota masyarakat hendaknya diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di wilayahnya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Hal ini juga berlaku dalam konteks Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar sangat tepat untuk dijadikan daerah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang difokuskan pada manajemen pemasaran produk gula semut.

Di awal sudah disinggung terkait karakteristik masyarakat desa dan kota. Mengapa kedua halnya disinggung? Ia menjadi unik karena Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar memiliki bentuk struktur pemerintahan desa tetapi berada di bawah ruang lingkup pemerintahan kota yakni Pemerintah Kota Banjar. Dari segi akses terhadap sarana dan prasarana penunjang, wilayah kota tentu sudah lebih memadai daripada wilayah kabupaten. Artinya, hanya tinggal mengatur warganya agar terampil memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang tersebut.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang melibatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat yang menjadikan masyarakat pra sejahtera

---

<sup>63</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: HUP, 2004), hlm. 1.

sebagai subyek pembangunan dalam menanggulangi masalahnya merupakan hal yang belum banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya yang bergerak dalam bidang pemberdayaan di luar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Hal inilah yang menarik perhatian dan minat penulis untuk memecahkannya masalah dengan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam masalah ekonomi.

Seperti telah dijelaskan pada bagian pendahuluan sebelumnya, salah satu komoditas unggulan hasil pertanian di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah buah-buahan. Buah-buahan seperti papaya, jambu, belimbing, dan sebagainya merupakan komoditas berharga yang memiliki harga ekonomi cukup lumayan dan dipandang dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitarnya. Namun demikian hasil komoditas pertanian berupa buah-buahan tersebut tampaknya belum diolah secara massif dan menghasilkan aneka produk kemasan yang menghasilkan nilai jual tinggi. Selama ini, hasil komoditas pertanian buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar lebih banyak dijual langsung ke pasaran tradisional atau ditampung oleh tengkulak dengan harga yang murah.

Problematika utama yang dihadapi oleh kalangan petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar menyangkut sejumlah persoalan, seperti ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, ketidaktegasan keberpihakan instansi terkait dalam mensupervisi mereka untuk mengolah buah-buahan menjadi komoditas unggulan. Upaya pengembangan ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar yang bersifat *oligopolistik*<sup>64</sup>, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasik (sumber daya manusia atau SDM, permodalan dan akses terhadap kelembagaan

---

<sup>64</sup> Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, dimana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, jasa penerbangan dan lainnya.

keuangan, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi), terjadinya distorsi dan inkonsistensi kebijakan pengembangan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa manajemen industri pengolahan buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karenanya, penulis berpendapat bahwa paling tidak ada 4 (empat) faktor umum yang mempengaruhi kegagalan usaha kecil, yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Manajerial yang tidak kompeten;
2. Kurang memberi perhatian;
3. *System control* yang lemah;
4. Kurangnya modal.

Sedangkan yang mempengaruhi keberhasilan usaha kecil adalah 4 (empat) faktor dasar berikut: (1) kerja keras, motivasi, dan dedikasi; (2) permintaan pasar akan produk atau jasa yang disediakan; (3) kompetensi manajerial; dan (4) keberuntungan. Selain itu, industri kecil yang benar-benar kecil dan mikro dapat dikelompokkan atas pengertian: (1) industri kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain; (2) industri kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri; dan (3) industri kecil yang memiliki tenaga kerja upah tetap.<sup>66</sup>

Industri kecil dengan kategori yang dimaksud di atas adalah yang sering dipandang sebagai usaha yang banyak menghadapi kesulitan, terutama yang terkait dengan lemahnya kemampuan manajerial, teknologi dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran dan mutu produk, serta faktor eksternal merupakan hambatan yang sulit diatasi, yaitu struktur pasar yang kurang sehat dan berkembangnya perusahaan-perusahaan asing yang menghasilkan produk sejenis untuk segmen pasar yang sama.

---

<sup>65</sup> Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 18.

<sup>66</sup> Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.



Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar salah satunya adalah mereka perlu diberikan semacam pelatihan manajemen industri. Menurut Cut Zurnali, ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:<sup>67</sup>

1. Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright mengemukakan, *training is a planned effort to facilitate the learning of job-related knowledge, skills, and behavior by employee*. Hal ini berarti bahwa pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai;<sup>68</sup>
2. Robbins dan Stephen P. menjelaskan *Training meant formal training that's planned in advanced and has a structured format*. Ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dimaksudkan di sini adalah pelatihan formal yang direncanakan secara matang dan mempunyai format pelatihan yang terstruktur dan terencana;<sup>69</sup>
3. Menurut Bernardin dan Russell, *Training is defined as any attempt to improve employee performance on a currently held job or one related to it. This usually means changes in spesific knowledges, skills, attitudes, or behaviors. To be effective, training should involve a learning experience, be a planned organizational activity, and be designed in response to identified needs*. Jadi pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dipikunya atau juga sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya. Hal

---

<sup>67</sup> Cut Zurnali, *Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Perilaku Produktif Karyawan pada Divisi Long Distance PT Telkom Indonesia Tbk*, Tesis, Program Pascasarjana UNPAD Bandung, 2004), hlm. 1-3.

<sup>68</sup> Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, *Human Resource Management*, International Edition, (New York: The McGraw-hill Companies Inc. 2003), hlm. 251.

<sup>69</sup> Robbins dan Stephen P., *Human Resource Management*, Sixth Edition, New York, John Wiley & Sons, Inc., 2001), hlm. 282.

ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifik. Dan agar pelatihan menjadi efektif maka di dalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaran atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan dirancang di dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi;<sup>70</sup>

4. Menurut Gomez-Mejia, Balkin, dan Cardy, *training is usually conducted when employees have a skill deficit or when an organization changes a system and employees need to learn new skill*. Ini berarti bahwa pelatihan biasanya dilaksanakan pada saat para pekerja memiliki keahlian yang kurang atau pada saat suatu organisasi mengubah suatu system dan para perlu belajar tentang keahlian baru;<sup>71</sup>
5. Menurut DeCenzo dan Robin, *Training is a learning experience in that it seeks a relatively permanent change in an individual that will improve the ability to perform on the job*. Ini berarti bahwa pelatihan adalah suatu pengalaman pembelajaran di dalam mencari perubahan permanen secara relatif pada suatu individu yang akan memperbaiki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya itu.;<sup>72</sup>

Dengan demikian pelatihan dapat didefinisikan sebagai kegiatan belajar dan praktik untuk *sesuatu tujuan baik*, dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan (*continuously and never end*) manusia, dan fitrahnya. Pengertian pelatihan yang dikemukakan oleh para ahli di atas sering dijadikan acuan dalam riset-riset manajemen sumberdaya manusia, psikologi industri, dan administrasi.

---

<sup>70</sup> Bernardin And Russell, *Human Resource Management*, Second Edition, (Singapore, McGraw-Hill Book Co, 1998), hlm. 172.

<sup>71</sup> Gomez-Mejia, Balkin, Cardy, 2001, *Managing Human Resources*, International Edition, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 2001), hlm. 259.

<sup>72</sup> DeCenzo and Robbins, *Human Resource Management*, Sixth Edition, (New York, John Wiley & Sons, Inc, 1999), hlm. 227.

Tujuan pelatihan secara umum adalah agar para pegawai dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari para karyawan. Pelatihan juga mempunyai pengaruh yang besar bagi pengembangan perusahaan. Ada beberapa manfaat pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan yang dikemukakan, antara lain:<sup>73</sup>

1. Meningkatkan pengetahuan para karyawan atas budaya dan para pesaing luar,
2. Membantu para karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi baru,
3. Membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas,
4. Memastikan bahwa budaya perusahaan menekankan pada inovasi, kreativitas dan pembelajaran,
5. Menjamin keselamatan dengan memberikan cara-cara baru bagi para karyawan untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan pada saat pekerjaan dan kepentingan mereka berubah atau pada saat keahlian mereka menjadi absolut,
6. Mempersiapkan para karyawan untuk dapat menerima dan bekerja secara lebih efektif satu sama lainnya, terutama dengan kaum minoritas dan para wanita.

Selain tujuan dan manfaat pelatihan di atas, terdapat pula 3 (tiga) tingkatan atau level analisis dalam menentukan kebutuhan pelatihan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. *Organization analysis* (analisis organisasi): Memfokuskan pada pengenalan di dalam organisasi di mana pelatihan dibutuhkan.

---

<sup>73</sup> Cut Zurnali, *Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Perilaku Produktif Karyawan pada Divisi Long Distance PT Telkom Indonesia Tbk*, Tesis, Program Pascasarjana UNPAD Bandung, 2004), hlm. 24-25.

2. *Operations analysis* (analisis operasi): Mencoba mengenal isi pelatihan-apa yang tenaga kerja harus lakukan agar bekerja secara kompeten.
3. *Individual analysis* (analisis individual): Menentukan seberapa baik setiap pekerja atau karyawan yang sedang melakukan tugas dalam menyelesaikan tugasnya.

Kaitannya dengan level di atas, Dessler menjelaskan bahwa pelatihan dapat memberikan karyawan baru atau lama suatu keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Dengan demikian segala bentuk proses pelatihan berarti menunjukkan seorang masinis bagaimana mengoperasikan mesin barunya, bagi seorang juru jual baru, bagaimana menjual produk perusahaannya, atau bagi seorang penyelia baru bagaimana mewawancarai dan menilai karyawan.<sup>74</sup>

Menurut Soekidjo Notoatmodjo, pelaksanaan program pelatihan dapat dikatakan berhasil apabila dalam diri peserta pelatihan tersebut terjadi suatu proses transformasi dalam peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin dan etos kerja. Sehingga untuk mengetahui terjadi tidaknya perubahan tersebut dilakukan penilaian atau evaluasi atas pelaksanaan pelatihan tersebut.<sup>75</sup>

Selanjutnya pelatihan manajemen industri pengolahan, pengemasan, dan pemasaran buah-buahan kepada para petani di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar dapat dilakukan melalui perencanaan program bisnis yang mencakup:<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Gary Dessler, *Human Resource Management*, Seventh Edition, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1997), hlm. 263.

<sup>75</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 53.

<sup>76</sup> Hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Titin dan Yeti, keduanya merupakan representasi dari pengrajin gula semut di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, yang dilaksanakan tanggal 26-27 Agustus 2017.

1. Standar pelaksanaan dan pengawasan;
2. Pemilihan berbagai alternatif terbaik;
3. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan;
4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi;
5. Membantu manager menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan;
6. Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait;
7. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.

Sedangkan manfaat yang lain dari perencanaan bisnis adalah:

1. Menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai;
2. Memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut;
3. Organisasi memperoleh standar sumber daya terbaik dan mendayagunakan sesuai tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan;
4. Menjadi rujukan anggota organisasi dalam melaksanakan aktivitas yang konsisten prosedur dan tujuan;
5. Memberikan batas wewenang dan tanggung jawab bagi seluruh pelaksana;
6. Memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara intensif sehingga bisa menemukan dan memperbaiki penyimpangan secara dini;
7. Memungkinkan untuk terpeliharanya persesuaian antara kegiatan internal dengan situasi eksternal;
8. Menghindari pemborosan.

Demikian pula diperlukan adanya standar pelaksanaan (SOP) dan pengawasan, skala prioritas, tujuan, batasan wewenang, pedoman kerja dan sebagainya memungkinkan seluruh personil yang terlibat dalam organisasi atau tim akan dapat bekerja lebih transparan dan penuh tanggung jawab, efektif, dan efisien. Dengan demikian kegiatan perencanaan dalam pemasaran produk gula semut memiliki ruang lingkup yang sangat luas terkait dimensi

waktu, spasial, tingkatan dan teknis perencanaannya yang saling terkait dan saling beriteraksi.

Adapun kebijakan teknis pelatihan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran komoditas buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar hendaknya mencakup:

#### 1. Perencanaan Dari Segi Dimensi Waktu

Dari demensi waktu perencanaan mencakup; (a) perencanaan jangka panjang (*long term planning*) berjangka 10 tahun ke atas, bersifat prospektif, idealis dan belum ditampilkan sasaran-sarana yang bersifat kualitatif. (b) Perencanaan jangka menengah (*medium term planning*) berjangka 3 sampai 8 tahun, merupakan penjabaran dan uraian rencana jangka panjang. Sudah ditampilkan sasaran-sasaran yang diproyksikan secara kuantitatif, meski masih bersifat umum. (c) Perencanaan jangka pendek (*sort term planning*) berjangka 1 tahunan disebut juga perencanaan jangka pendek tahunan (*annual plan*) atau perencanaan operasional tahunan (*annual opperasional planning*).

#### 2. Perencanaan Dari Segi Dimensi Spasial

Perencanaan ini terkait dengan ruang dan batas wilayah yang dikenal dengan perencanaan nasional (berskala nasional), regional (berskala daerah atau wilayah), perencanaan tata ruang dan tata tanah (pemanfaatan fungsi kawasan tertentu).

#### 3. Perencanaan Dari Segi Dimensi Tingkatan Teknis Perencanaan

Dalam demensi ini kita mengenal istilah (a) perencanaan makro (b) perencanaan mikro (c) perencanaan sektoral (d) perencanaan kawasan dan (e) perencanaan proyek. Perencanaan makro meliputi peningkatan pendapatan nasional, tingkat konsumsi, investasi pemerintah dan masyarakat, ekspor impor, pajak, perbankan dan sebagainya.

Perencanaan mikro disusun dan disesuaikan dengan kondisi daerah di mana kegiatan usaha tersebut dilakukan. Sedangkan perencanaan kawasan

memperhatikan keadaan lingkungan kawasan tertentu sebagai pusat kegiatan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif. Adapun perencanaan proyek adalah perencanaan operasional kebijakan yang dapat menjawab siapa melakukan apa, dimana, bagaimana dan mengapa.

#### 4. Perencanaan Dari Segi Dimensi Jenis

Dari segi jenisnya, perencanaan juga meliputi: (a) Perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*), (b) perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*), (c) perencanaan menyerong ke samping (*diagonal planning*), dibuat oleh pejabat bersama dengan pejabat bawah diluar struktur (d) perencanaan mendatar (*horizontal planning*), yaitu perencanaan lintas sektoral oleh pejabat selevel (e) perencanaan menggelinging (*rolling planning*) berkelanjutan mulai rencana jangka pendek, menengah dan panjang. (f) perencanaan gabungan atas ke bawah dan bawah ke atas (*top down and bottom up planning*).

Di samping itu, dalam beberapa kasus diperlukan pula sejumlah pendekatan atau strategi dalam menyusun perencanaan bisnis yang terkait erat dengan pemasaran buah-buahan oleh petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Menurut hemat penulis, paling tidak ada empat pendekatan dalam perencanaan pemasaran, yaitu: (1) pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*); (2) pendekatan ketenagakerjaan (*man power approach*); (3) pendekatan untung rugi (*cost and benefit*); (4) pendekatan biaya murah (*cost effectiveness*); dan (5) pendekatan terpadu (*integrative approach*).

##### 1. Pendekatan Kebutuhan Sosial (*Social Demand Approach*)

Pendekatan model ini didasarkan atas keperluan masyarakat saat ini dan menitik beratkan pada pemerataan pendapatan seperti kebijakan pemberdayaan ekonomi menuju keluarga sejahtera. Kekurangannya pendekatan model ini adalah: (a) mengabaikan alokasi dalam skala nasional; (b) mengabaikan kebutuhan perencanaan ketenagakerjaan; dan (c) cenderung

hanya menjawab problem pemerataan dengan lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas kesejahteraan ekonomi.

## 2. Pendekatan Ketenagakerjaan (*Manpower Approach*)

Pendekatan ini mengutamakan keterkaitan aspek ketersediaan lapangan kerja dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja. Membengkaknya angka pengangguran misalnya menjadi pendorong untuk mempertemukan *gape* antara dunia lapangan kerja dengan upah kerja. Upaya untuk hal ini misalnya diberlakukannya kebijakan padat karya atau kegiatan bisnis dan industri berbasis massal.

## 3. Pendekatan Untung Rugi (*Cost and Benefit Approach*)

Dalam pendekatan ini dibuat perhitungan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk pelaku usaha serta keuntungan yang akan diperoleh dari hasil usaha. Pendekatan ini adalah melihat bagaimana kegiatan bisnis sebagai upaya investasi yang harus memberikan keuntungan nyata bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## 4. Pendekatan Biaya Murah (*Cost Effectiveness Approach*)

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada penghematan biaya secermat mungkin untuk mencapai hasil usaha seoptimal mungkin, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kegiatan bisnis juga dilakukan jika benar-benar memberikan keuntungan yang relatif pasti dan berkesinambungan agar mampu membentuk fundamental ekonomi yang kuat di masyarakat.

## 5. Pendekatan Terpadu (*Integrative Approach*)

Pendekatan terpadu ini dapat digunakan untuk menjembatani berbagai kepentingan akan tujuan output kegiatan bisnis. Apalagi dalam ekonomi Islam dikenal akan adanya dua kebutuhan duniawi dan ukhrowi sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengelola kegiatan bisnis yang mampu memberikan kepastian bagi pemenuhan kebutuhan manusia baik materi maupun non material.



Mengacu kepada uraian dan hasil dari pengamatan tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah mereka perlu diberikan pelatihan manajemen pengolahan, pengemasan, dan pemasaran buah-buahan agar produk mereka bukan hanya terjual di pasar tradisional, namun juga dapat terjual di pasar modern, baik lokal maupun nasional. Lebih dari itu, untuk mewujudkan harapan tersebut, maka para petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar juga perlu menyusun perencanaan bisnis yang baik meliputi semua komponen administrasi bisnis mulai dari proses produksi, supervisi, keuangan, sarana dan prasarana, personal, peluang pasar, dan evaluasi hasil usaha.

### **B. Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Buah-Buahan kepada Kelompok Petani Buah-Buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar**

Pemberdayaan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang paling memungkinkan bagi suatu masyarakat untuk bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai ketahanan nasional.<sup>77</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan berdaya apabila memiliki salah satu atau

---

<sup>77</sup> Mushlihin Al-Hafizh, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", lihat dalam <http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-pemberdayaan-ekonomi-umat.html> diakses tanggal 18 Agustus 2018.

lebih dari beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi adalah mengembangkan potensi dasar yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pengembangan yang dimaksud dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, magang, pendampingan, dan lain-lain. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini memang cenderung lebih bersifat ceremonial dan belum memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Misalnya, beberapa kegiatan seperti lokakarya atau workshop baru sebatas dilaksanakan di dalam ruangan (*in class room*) dan belum banyak diikuti dengan pelatihan teknis yang bersifat eksperimen. Demikian pula dengan program pelatihan sekalipun kebanyakan baru juga lebih banyak dilakukan di dalam ruangan (*in house training*) dan belum diikuti dengan program magang atau job training, sehingga kemampuan peserta menjadi kurang maksimal.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah mereka diberikan pelatihan manajemen pengolahan, pengemasan, dan pemasaran buah-buahan. Sebagai contoh, memang tidak semua kemampuan (*skill*) yang diperlukan oleh dunia kerja bisa didapatkan dari sekolah yang formal, hal ini dikarenakan kemampuan (*skill*) yang diperlukan tersebut lebih spesifik dan fokus dengan apa yang akan ditugaskan.

Setiap pelaku usaha termasuk para petani buah-buahan memiliki budaya-budaya kerja sendiri yang harus diketahui oleh semua mitra kerjanya,

budaya-budaya usaha tersebut cenderung berbeda-beda antara di perkebunan dan di pasar ataupun antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Kecenderungan umum yang dimiliki oleh para petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah mereka melakukan aktifitas pertanian buah-buahan sebagai aktifitas rutin keseharian tanpa target dan tujuan yang jelas.

Jika yang tergambar hanyalah aktifitas bertani semata-mata tanpa tujuan dan target yang jelas, tentu saja produk buah-buahan yang dihasilkan mereka menjadi sangat bervariasi karena tidak adanya standar mutu yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dampaknya juga terlihat ketika mereka merasa kesulitan untuk mengolah dan memasarkan produk buah-buahan tersebut. Berdasarkan kondisi obyektif tersebut, para petani buah-buahan jelas perlu dilatih untuk mampu mengolah, mengemas, dan memasarkan buah-buahan, berikut pula hasil olahan buah-buahan yang mereka hasilkan menjadi beragam produk makanan.

Demikian pentingnya memberikan *training* atau pelatihan kepada para petani buah-buahan, mengandung arti bahwa pelatihan tidak saja dilakukan sebelum mereka telah menjalankan usaha pertanian, tetapi juga dilakukan saat mereka sedang melakukan pekerjaan tersebut. Hasil pelatihan diberikan kepada para petani buah-buahan diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan keterampilan mereka dalam mengolah setiap komoditas pertanian yang mereka hasilkan.

Tujuan umum diberikannya pelatihan kepada para petani buah-buahan adalah agar mereka mampu mengembangkan usaha, menghindari semaksimal mungkin kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas dalam pekerjaannya. Secara khusus tujuan pelatihan kepada para petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Sehingga mereka merasakan betul manfaat dari pelatihan manajemen pengolahan, pengemasan, dan pemasaran buah-buahan tersebut.

Ada beberapa tahapan teknis yang dapat diberikan kepada petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, antara lain:<sup>78</sup>

### 1. Orientasi (*Orientation*)

Tujuan dari orientasi adalah agar karyawan baru dapat mengetahui dan memahami informasi dari latar belakang perusahaan dan produksi. Isi daripada orientasi antara lain:

- a. Informasi tentang benefit atau keuntungan yang akan didapatkan oleh petani;
- b. Pekerjaan dan hal-hal rutin;
- c. Struktur organisasi dan operasionalnya;
- d. Kebijakan bisnis dan slogan-slogan perusahaan tentang kualitas, lingkungan, visi dan misi;
- e. Sistem-sistem yang ada dalam perusahaan (ISO, SMK3, TS, ROHS, GREEN PARTNER);
- f. Peraturan-peraturan dan disiplin;
- g. Keamanan dan keselamatan kerja dalam pekerjaan;
- h. Pengenalan fasilitas pekerjaan.

Hal-hal penting yang harus dilakukan untuk karyawan baru agar proses orientasi dapat berhasil dengan baik, seperti halnya membuat mereka merasa di terima dan nyaman, membantu mereka memahami perusahaan/produksi dalam arti yang luas, dan menjelaskan kepada mereka apa yang akan diharapkan oleh perusahaan dalam hal pekerjaan dan perilaku mereka.

### 2. Proses Pelatihan (*Training Process*)

Training atau pelatihan adalah suatu proses mengajar kepada karyawan untuk mendapatkan kemampuan dasar (*basic skill*) yang

---

<sup>78</sup> Budhi Kho, "Tahapan dan Manfaat Pelatihan Bagi Pelaku Usaha", artikel dalam <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-training-pelatihan-tahap-pelatihan/> diakses 18 Agustus 2018.

diperlukannya dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka. Terdapat lima proses yang harus dilakukan dalam menyediakan materi training:

- a. Menganalisis kebutuhan, yakni mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan identifikasi tujuan dan kriteria pelatihan;
- b. Merancang instruksi pelatihan, yakni membuat konten training program seperti jadwal training, manual bahan training, bahan untuk ujian;
- c. Validasi, yakni mempresentasikan terlebih dahulu konten training program tersebut kepada group yang kecil untuk mengetahui apakah penyajian Materi training cocok dan valid (melakukan percobaan atau try out);
- d. Implementasikan program training, yakni melakukan training aktual kepada karyawan baru yang ditargetkan;
- e. Evaluasi, yakni melakukan penilaian terhadap program training apakah berhasil atau gagal.

Berikut ini beberapa cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam training:

- a. Usahakan untuk membuat kesamaan di situasi training/pelatihan dan situasi pekerjaan yang sebenarnya;
- b. Menyediakan praktek yang memadai;
- c. Berikan label atau mengidentifikasi setiap fitur dari mesin atau langkah dalam proses;
- d. Memberikan arahan kepada peserta training/pelatihan untuk memperhatikan aspek penting dari pekerjaan;
- e. Menyediakan informasi agar peserta training /pelatihan memiliki persiapan yang cukup saat mereka mengerjakan tugas/pekerjaan yang nyata.

Sebagai contoh pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perangkat elektronik, ada kecenderungan materi-materi umum dan dasar

training yang diperlukan disiapkan dalam produksi perakitan elektronik, antara lain: pengenalan komponen atau material dalam produksi, soldering skill, screwing skill, pengenalan ESD, pengenalan mesin-mesin produksi dan cara mengoperasikannya. Barulah setelah melakukan program training, untuk mengetahui apakah Karyawan baru tersebut siap dan memenuhi standar dasar (basic standard) yang dibutuhkan oleh pekerjaannya, maka akan dilakukan ujian baik teori maupun praktek.

### 3. Magang (*On The Job Training*)

Program *On the Job Training* adalah salah satu metode training dengan mengajarkan karyawan baru tersebut di pekerjaan yang sebenarnya. Adapun langkah-langkah dalam OJT, antara lain:

- a. Mempersiapkan Karyawan baru yang akan dilatih;
- b. Mempersiapkan Pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan baru tersebut;
- c. Lakukan percobaan untuk melakukan pekerjaan, yang mencakup langkah-langkah berikut:
  - 1) Ajarkan dan terangkan langkah demi langkah dengan pelan-pelan;
  - 2) Lakukan perbaikan jika terjadi kesalahan;
  - 3) Jalankan pekerjaannya seperti biasa;
  - 4) Jangan membiarkan karyawan baru tersebut melakukan pekerjaannya sendiri.
- d. Tindak Lanjut (*Follow Up*), yang mencakup atas:
  - 1) Identifikasikan pihak mana saja yang perlu bantuan;
  - 2) Perbaiki kesalahan mereka sebelum menjadi suatu kebiasaan;
  - 3) Kurangi pengawasan secara bertahap, periksa hasilnya (kualitas dan kuantitas) dari waktu ke waktu;
  - 4) Pujilah mereka bagi yang telah melakukan pekerjaan dengan baik;
  - 5) Mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan supaya mencapai standar kualitas dan kuantitas.

Melalui pelatihan diharapkan tujuan diselenggarakan pelatihan secara umum diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Adapun tujuan-tujuannya sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja karena kekurangan keterampilan;
2. Memuktahirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif;
3. Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan;
4. Membantu memecahkan masalah operasional. Para manajer harus mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpahan sumber daya;
5. Mempersiapkan karyawan untuk promosi/ satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan;
6. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi;
7. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan.

Pelatihan juga mempunyai andil besar dalam menentukan efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan usaha. Beberapa manfaat program pelatihan adalah:<sup>80</sup>

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas;
2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima;
3. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan;
4. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumberdaya manusia;

---

<sup>79</sup> Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2006), hlm. 276.

<sup>80</sup> Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2006), hlm. 278.

5. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja;
6. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka.

Manfaat di atas membantu individu maupun organisasi. Program pelatihan yang efektif adalah memberikan bantuan yang berharga dalam perencanaan karir dan sering dianggap sebagai penyembuh penyakit organisasional. Apabila produktivitas tenaga kerja menurun banyak manajer berfikir bahwa solusinya adalah pelatihan. Meskipun program pelatihan tidak mengobati semua masalah organisasional, namun tentu saja program pelatihan tersebut berpotensi untuk memperbaiki situasi tertentu sekiranya program dijalankan secara benar.

Selanjutnya pada tataran teknis, Tim Pokja PKM UIN Sunan Gunung Djati Bandung memberikan tiga bentuk pelatihan kepada para petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, yaitu pelatihan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk.

#### 1. Pelatihan Pengolahan Buah-buahan

Seperti telah disebutkan sebelumnya, komoditas buah-buahan yang banyak dihasilkan oleh para petani di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah Blimbing, Jambu, Pepaya, Mangga, Pisang, dan Nanas yang diolah sedemikian rupa untuk untuk kemudian dijual ke pasaran.



**Gambar 4.1**



## Bahan Baku Buah-buahan



**Gambar 4.2**

## Proses Pengolahan Buah-buahan



**Gambar 4.3**

## Pengujian Laboratorium Buah-buahan



**Gambar 4.4**  
**Simulasi Pengolahan Buah-buahan**

## 2. Pelatihan Pengemasan Buah-buahan

Buah-buahan yang telah diolah, selanjutnya dikemas oleh para petani di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar menjadi berbagai produk seperti tampak pada gambar di bawah ini:



**Gambar 4.5**  
**Aneka Hasil Olahan Buah-buahan**



**Gambar 4.6**

**Aneka Minuman Buah-buahan**



**Gambar 4.7**

**Model Kemasan Minuman Buah-buahan**



**Gambar 4.8**

**Model Kemasan Minuman Buah-buahan**

### 3. Pelatihan Pemasaran Buah-buahan

Buah-buahan yang telah dikemas, selanjutnya pasarkan oleh para petani di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar baik dilakukan melalui pasar tradisional maupun pasar modern seperti tampak pada gambar di bawah ini:



**Gambar 4.9**

#### **Pemasaran Buah-buahan di Pasar Tradisional**



**Gambar 4.10**

#### **Pemasaran Buah-buahan di Pasar Modern**



**Gambar 4.11**

### **Pemasaran Buah-buahan di Pasar Modern**

Demikian beberapa aspek pelatihan yang diberikan kepada para petani buah-buahan, mulai dari pengolahan dan pengemasan hingga pemasaran diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka baik secara individu maupun kelompok. Program pelatihan dapat dikatakan efektif apabila memberikan dampak positif terhadap tingkat produktivitas usaha dan meningkatkan pendapatan mereka secara ekonomi. Namun perlu dicatat di sini bahwa meskipun program pelatihan tersebut belum optimal, namun sekurang-kurangnya telah memberikan pengenalan tentang bagaimana mengolah, mengemas, dan memasarkan produk-produk hasil olahan buah-buahan kepada para petani yang berada di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

### **C. Kendala dan Strategi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Buah-Buahan Kepada Kelompok Petani Buah-Buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment of economics*) dalam wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pemberdayaan umumnya diletakan pada kekuatan tingkat individu dan sosial, di mana setiap orang dan komunitas masyarakat mengalami perubahan sikap mental dan tekad yang kuat untuk bersama-sama mengambil peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi.<sup>81</sup>

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sudah seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan. Merupakan sebuah kesalahan fatal ketika sebuah negara mengejar pertumbuhan namun mengesampingkan upaya permasalahan kemiskinan sehingga jurang ketimpangan antara si miskin dan si kaya semakin melebar. Kondisi seperti ini akan membuat perekonomian semakin rentan dan pembangunan tidak berjalan secara berkelanjutan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh ESCAP & UNDP (2003) yang menghitung elastisitas kemiskinan di sejumlah negara di Asia membuktikan bahwa pertumbuhan yang tinggi akan tidak banyak berarti bagi kaum miskin apabila distribusi pendapatan antara si kaya dan miskin pincang.<sup>82</sup>

Sebuah penelitian dari Augusta (2014)<sup>83</sup> dalam artikelnya yang berjudul *Pertumbuhan Pencipta Kemiskinan* menyatakan bahwa partum-

---

<sup>81</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDES, 1996), hlm. 12.

<sup>82</sup> Editor, "Membangun Indonesia dari Desa: Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Langkah Mandiri untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan" lihat artikel lengkap dalam <http://bem-s1.fe.unpad.ac.id/membangun-indonesia-dari-desa-pemberdayaan-masyarakat-desa-sebagai-langkah-mandiri-untuk-mengatasi-masalah-kemiskinan-dan-ketimpangan/> diakses 18 Agustus 2018.

<sup>83</sup> *Ibid.*

buhan ekonomi di Indonesia berkorelasi positif terhadap kemiskinan, sementara kemajuan inflasi berkaitan negatif dengan laju kenaikan garis kemiskinan atau kapasitas orang miskin. Dari penelitian ini didapatkan bahwa Walau ada beberapa penelitian yang menentang hal tersebut seperti penelitian dari Timmer, penelitian dari Agusta ini patut di perhatikan.

Bagi Indonesia sebagaimana juga terjadi pada negara sedang berkembang lain, agaknya terperangkap dalam jebakan ekonomi eksklusif. Pembangunan sektor sekunder, yaitu manufaktur, dan tersier, yaitu jasa, jauh lebih ditekankan ketimbang sektor primer seperti pertanian. Padahal, menurut studi dari Ravallion dan Datt (1996) dengan memakai data India, dihasilkan bahwa *output* di sektor-sektor primer, khususnya pertanian jauh lebih efektif dalam penurunan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan *output* di sektor sekunder.

Apabila mengacu kepada hasil riset yang dirilis *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*, kualitas sumber daya manusia (SDM) di pedesaan masih menjadi hambatan utama dalam pembangunan desa. Untuk itu, dibutuhkan strategi yang tepat agar puluhan triliun dana desa yang digelontorkan dapat berdampak secara optimal. Persoalan krusial adalah anak muda tidak ada yang mau bekerja di desa. Bahkan berdasarkan hasil survey INDEF, anak muda yang *well education* tidak ada yang bergerak di desa.<sup>84</sup>

Oleh karena itu, jelas dibutuhkan pendekatan kultural dan teknologi agar menarik minat anak muda untuk kembali ke desa dan melakukan pembangunan. Usaha membangun desa dengan pendekatan teknologi akan diminati dan mampu merangsang anak mudah untuk kembali ke desa. Di

---

<sup>84</sup> Pernyataan Enny Sri Hartati (Direktur Eksekutif Indef), makalah seminar nasional bertema “Kawasan Perdesaan dan Nilai Tambah Ekonomi”, di Jakarta, 07 Desember 2017 yang dipublikasikan dalam <http://www.harianterbit.com/hantereekonomi/read/2017/12/08/90777/0/21/> *Kualitas-SDM-Masih-jadi-Kendala-Pembangunan-Desa* diakses tanggal 18 Agustus 2018.

samping kualitas SDM, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa. Saat ini memang telah ada dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi jika digabung dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) akan semakin bagus, karena sebenarnya APBD itu besar sekali dananya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT, Ahmad Erani Yustika yang mengakui jika selama ini program pemberdayaan desa belum tersentuh melalui dana desa karena lebih diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pola pembangunan sejatinya tidak hanya dilihat dari majunya infrastruktur, namun juga kualitas dan pemberdayaan masyarakat yang berujung kepada meningkatnya perekonomian. Dana desa masih menyentuh isu-isu dasar dan pelayanan sosial. Tapi isu pemberdayaan dan penguatan sumber daya manusia dan aspek ekonomi masih jauh dari itu.

Permasalahan tersebut hampir merata terjadi di semua desa yang membuat sumber daya alam dan ekonomi di pedesaan belum tergarap secara maksimal. Sumber daya ekonomi di desa sangat luar biasa, tapi sayanya masyarakat desa defisit penguatan sehingga tidak menjadikannya sebuah kekuatan. Jika ada orang yang memahami dan memiliki pengetahuan, bisa membawa kondisi menjadi jauh lebih baik.

Demikian halnya dengan kondisi umum masyarakat yang berada di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar merupakan masyarakat yang bisa dikatakan giat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat di Desa Waringinsari termasuk masyarakat yang bisa memanfaatkan kondisi tanah yang ada untuk bercocok tanam, ada juga yang berjualan, membuka usaha sendiri, berdagang dirumah, dan sebagainya. Namun permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat yaitu



masyarakat sering kali membutuhkan tambahan modal untuk usaha maupun untuk konsumtif pribadi.

Namun, masyarakat tidak mau dipusingkan dalam melakukan peminjaman uang seperti prosedur yang ada di bank. Untuk itulah, pemerintah Desa telah berupaya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai solusi alternatif peningkatan ekonomi masyarakat. Tim Pokja PKM UIN SGD Bandung dalam melakukan pengabdian di Badan Usaha Milik Desa diharapkan sedikit banyak dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di Desa Waringinsari. Dari permasalahan yang ada di masyarakat yaitu kekurangan modal, BUMDES masih dianggap merupakan salah satu solusi dari permasalahan tersebut.

Pada saat melakukan pengabdian di Badan Usaha Milik Desa, di satu sisi masih ada permasalahan yang terjadi pada diri masyarakat, yakni masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dan BUMDES sebagai solusi atas permasalahan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan mereka akan tetapi kebanyakan masyarakat hanya mudah untuk mengajukan permohonan dana tapi susah untuk membayar kembali, hal ini memberi pengaruh kepada perputaran uang selanjutnya, yakni dengan banyaknya masyarakat yang belum membayar pinjamannya, masyarakat yang selanjutnya melakukan peminjaman sulit untuk dicairkan karna masih banyak dana yang tertahan di masyarakat.

Di sisi lainnya, pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga merasa masyarakat seperti spele terhadap Badan Usaha Milik Desa dikarenakan masyarakat menganggap bahwa uang yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersebut juga merupakan uang pemerintah yang disalurkan ke desa untuk pembangunan masyarakat. Jadi, masyarakat merasa tidak perlu khawatir jika tidak membayar uang yang dipinjam tepat waktu karna uang tersebut dianggap memang harus disalurkan ke masyarakat, tidak

seperti bank yang mempunyai sanksi jika tidak mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo dikarenakan uang tersebut adalah uang nasabah yang dihimpun dan disalurkan kembali. Padahal seharusnya tidak seperti itu, menurut hukum walaupun uang tersebut memang dari pemerintah untuk keuangan di desa, tapi bukan berarti masyarakat menganggap seenaknya bahwa uang tersebut tidak masalah jika tidak dikembalikan sesuai dengan jatuh tempo.

Berdasarkan kondisi tersebut, jelas dibutuhkan solusi untuk menyadarkan masyarakat tentang memberdayakan ekonomi secara mandiri, dalam arti bahwa dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah desa saja, namun masyarakat juga harus berpartisipasi dan berinovasi dengan semua potensi yang dimilikinya. Untuk itulah Tim Pokja PKM UIN SGD Bandung telah bekerja sama dengan instansi terkait yakni Dinas Sosial & P3A serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Banjar untuk memberikan pelatihan manajemen pengolahan, pengemasan, dan pemasaran komoditas hasil agroindustri di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

Berdasarkan hasil temuan Tim Pokja PKM UIN SGD Bandung diketahui ada beberapa kendala yang menjadi penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan manajemen industri pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil komoditas agroindustri di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari, antara lain:<sup>85</sup>

#### 1. Kebijakan Sektoral

- a. Kebijakan yang tidak *pro-poor*, yakni pola distribusi anggaran BUMDES masih lebih banyak diarahkan pada pembangunan infra struktur desa daripada pengembangan sumber daya manusia dan potensi ekonomi desa;

---

<sup>85</sup> Laporan Hasil Pengamatan kegiatan Tim Pokja PKM UIN SGD Bandung 2018.

- b. Perubahan komposisi kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi dan lambatnya penurunan kemiskinan, serta belum mencerminkan adanya keseimbangan dan proporsionalitas kebijakan distribusi anggaran;
  - c. Beberapa komoditas buah-buahan seperti Blimbing, Mangga, Jambu, dan buah-buahan lainnya hanya dijual kepada tengkulak tanpa diolah menjadi aneka produk yang memiliki nilai jual tinggi di sentra oleh-oleh;
  - d. Kurangnya inovasi untuk menciptakan pasar tradisional dan pasar modern yang mampu menampung dan menjual hasil olahan buah-buahan.
2. Kebijakan Tenaga Kerja
- a. Belum adanya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan mengenai pengolahan komoditas buah-buahan seperti Blimbing, Mangga, Jambu, dan buah-buahan lainnya menjadi aneka produk yang memiliki nilai jual tinggi;
  - b. Belum adanya rumah produksi yang dikelola secara bersama-sama oleh kelompok usaha petani buah-buahan yang dapat menyerap jumlah pekerja cukup banyak;
  - c. Belum optimalnya pendampingan, supervisi, dan pelatihan kepada para petani buah-buahan dalam mengolah hasil panen.
3. Kebijakan Konektivitas
- a. Kurangnya akses terhadap sarana-prasaran pendukung kegiatan ekonomi untuk mengolah hasil panen buah-buahan;
  - b. Kurangnya akses mendapatkan pelatihan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil panen dan hasil olahan buah-buahan dari berbagai instansi terkait;
  - c. Kurangnya kemampuan membangun jaringan pemasaran hasil panen dan produk olahan buah-buahan di dalam atau ke luar Desa Waringinsari.

Permasalahan tersebut sebenarnya telah disadari bersama oleh para petani maupun pemerintah daerah, namun mereka belum sepenuhnya optimal mengembangkan konsep pembangunan ekonomi baru agroindustri dan agrowisata. Padahal Desa Waringisari Kecamatan Langensari Kota Banjar memiliki potensi lebih untuk dikembangkan sebagai Desa Wisata. Inilah yang menjadi dasar utama pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja dan pelatihan usaha yang dapat berimplikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.

Berdasar kepada permasalahan tersebut di atas, maka proses pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan menjadi tuntutan bersama karena ia merupakan proses panjang dengan memanfaatkan dan mengelola segala sumber daya pertanian secara optimal dan lestari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitarnya. Menurut pendapat Soesilowati dalam Latif dijelaskan bahwa paling tidak ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat desa, antara lain:<sup>86</sup>

1. Strategi Fasilitatif yaitu strategi yang mengharapkan kelompok yang menjadi sasaran suatu program sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen perubah bersama-sama masyarakat mencari penyelesaian terhadap suatu masalah;
2. Strategi Edukatif, yaitu strategi yang memberikan pengetahuan dan keahlian pada masyarakat yang akan diberdayakan;
3. Strategi Persuasif, yaitu strategi yang berupaya membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku. Strategi ini lebih cocok digunakan bila masyarakat tidak sadar terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan;

---

<sup>86</sup> A. Gunawan Latif, *Peran LSM dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Pulau Barang Caddi Kota Makasar*, Tesis Program Pasca Sarjana IPB PS SPL. Bogor 1996.

4. Strategi kekuasaan, yaitu strategi yang membutuhkan agen perubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai akses untuk monopoli.

Inti dari empat strategi pemberdayaan ekonomi di atas adalah memberikan cara pengelolaan terbaik yang harus dilakukan agar masyarakat pedesaan mau dan mampu mengelola sumberdaya yang mereka miliki. Hal tersebut sangat diperlukan agar masyarakat desa memiliki kemandirian ekonomi dan tetap memiliki karakteristik yang khusus. Meskipun tidak dipungkiri bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir ada kecenderungan masyarakat terdidik di desa cenderung bermigrasi ke perkotaan karena alasan ekonomi.

Strategi yang pertama yang bersifat fasilitatif dapat dilakukan pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya melalui potensi dasar pengolahan hasil panen buah-buahan, dengan cara:

1. Pelaksana program bekerjasama dengan instansi terkait memberikan program pendidikan, pelatihan, pendampingan, supervisi, dan konsultasi kepada para petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, di antaranya:
  - a. Pelatihan manajemen bisnis dan tata kelola wirausaha industri kreatif;
  - b. Pelatihan manajemen bisnis dan tata kelola agro industri pariwisata;
  - c. Pelatihan manajemen keuangan bagi pelaku UMKM;
  - d. Pelatihan tenaga pendamping bagi pelaku UMKM.
2. Program peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akan dilakukan oleh pelaksana program yang dirancang melalui:
  - f. Pengembangan desa wisata dan budaya;
  - g. Pengembangan komoditi unggulan berbasis agro industri;
  - h. Pengembangan kawasan agro politan;
  - i. Pengembangan kawasan niaga terpadu.

Program-program tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan dengan intensitas berbeda yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori:

1. Jangka Pendek (*Short Term Program*) yaitu, kegiatan yang sifatnya insidental, seperti pelatihan (*training*);
2. Jangka Menengah (*Mid Term Program*) yaitu kegiatan yang sifatnya berkala, seperti supervisi/asistensi (*supervision and monitoring*);
3. Jangka Panjang (*Long Term Program*) yaitu kegiatan yang sifatnya berkelanjutan, seperti: aktifitas bisnis (*business activity*).

Solusi berikutnya adalah memberikan pelatihan pemasaran hasil pengolahan buah-buahan kepada kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Pemasaran pada hakikatnya merupakan suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai dengan konsumen.<sup>87</sup>

Menurut Morissan pemasaran adalah suatu konsep yang menyangkut suatu sikap mental, suatu cara berpikir yang membimbing anda melakukan sesuatu yang tidak selalu menjual benda tetapi juga menjual gagasan-gagasan, karier, tempat (parawisata, rumah, lokasi industri), undang-undang, jasa (pengangkutan, penerbangan, pemotongan rambut, kesehatan), hiburan (pertunjukan, pertandingan-pertandingan) dan lain sebagainya.<sup>88</sup>

Manajemen pemasaran juga merupakan suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan (yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir) serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai

---

<sup>87</sup> Shinta Agustina, *Manajemen Pemasaran*, (Malang: Universitas Briwijaya Press, 2011), hlm. 2.

<sup>88</sup> Morrissan, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 2.

tujuan organisasi secara efisien dan efektif.<sup>89</sup> sedangkan menurut pendapat Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah suatu analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pembeli untuk mencapai tujuan obyektif organisasi.<sup>90</sup>

Sedangkan menurut syariah, organisasi pemasaran adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam organisasi bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai (*value creating activities*) yang memungkinkan siapapun yang melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam.

Berkenaan dengan hal tersebut, M. Syakir Sula<sup>91</sup> menjelaskan pemasaran syariah (*syariah marketing*) sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan *values*, dari satu inisiator kepada *stakeholder*-nya, dan dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam. Ia menjelaskannya dengan merujuk terlebih dahulu dari definisi pemasaran yang disepakati pakar marketing dunia, kemudian mendasarkan pada kaidah fiqih dalam Islam. Kaidah fiqh dalam Islam yang dimaksud yaitu:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلال أو حلال حراما

Kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis (syarat) yang mereka buat, kecuali kesepakatan (syarat) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Shinta Agustina, *Op.Cit*, hlm. 2.

<sup>90</sup> Philip Kotler, *Dasar-dasar Pemasaran Jilid 1*, (Jakarta: Prenhallindo, 1996), hlm. 13.

<sup>91</sup> Herman Kartajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 26-27.

<sup>92</sup> *Ibid.*

Mengacu kepada penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa kata kunci dalam konsep pemasaran adalah bahwa dalam seluruh proses pemasaran, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value), tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah tidak terjadi dalam suatu transaksi/proses bisnis, maka segala bentuk transaksi apapun dalam kegiatan pemasaran dapat diperbolehkan.

Di samping itu, kegiatan pemasaran hendaknya juga dikembalikan pada karakteristik yang sebenarnya, yakni religius, beretika, realistis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang dinamakan *marketing syariah*, dan inilah konsep terbaik marketing untuk hari ini dan masa depan. Adapun perbandingan pemasaran syariah dengan pemasaran konvensional dapat dijelaskan beberapa hal antara lain:<sup>93</sup>

#### 1. Konsep dan Filosofi Dasar

Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasarkan pada nilai-nilai ilahiyah dalam segala aktivitas pemasarannya. Pemasar hanya lebih fokus pada pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam pemasaran syariah seorang pemasar harus merasakan bahwasanya setiap aktivitas pemasarannya ia selalu diawasi oleh Allah SWT, sehingga sangat berhati-hati dalam menjaga aktivitas pemasarannya.

#### 2. Etika Pemasar

Pemasar syariah sangat memegang teguh etika dalam melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Sangat menghindari kebohongan, berlebihan dalam promosi, menjaga kejujuran dan janji. Dibandingkan

---

<sup>93</sup> Nur Rianto al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010).



pemasaran konvensional cenderung bebas nilai sehingga seorang pemasar bebas menggunakan cara-cara meskipun bertentangan dengan syariah.

### 3. Pendekatan dengan Konsumen

Konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra yang sejajar. Perusahaan tidak menjadikan konsumen sebagai “sapi perah” untuk membeli produknya. Olehnya tidak boleh melakukan aktivitas pemasaran yang merugikan konsumen. Selalu berupaya menciptakan nilai produk yang positif dan umpan balik dari konsumennya. Sebaliknya pada pemasaran konvensional cenderung konsumen diletakkan sebagai objek untuk mencapai target penjualan semata-mata. Konsumen terkadang dirugikan dengan janji yang berbeda dengan realitas.

### 4. Cara Pandang Terhadap Pesaing

Dalam pemasaran syariah setiap perusahaan dapat bersaing secara sehat dan masing-masing mempunyai peluang untuk berkembang dengan baik tanpa menjatuhkan pesaingnya. Pesaing merupakan mitra yang turut dalam menyukseskan implementasi ekonomi syariah. Hal berbeda pada pemasaran konvensional cenderung menganggap pesaing sebagai pihak lawan yang harus dimatikan karena dapat menghambat laju perusahaan.

### 5. Budaya Kerja

Budaya kerja yang harus diaplikasikan adalah bagaimana budaya kerja yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW yaitu memiliki sifat kejujuran (*shiddiq*), cerdas atau kompeten (*fathanah*), bertanggungjawab (*amanah*) dan mampu menyebarluaskan dan mengkomunikasikan aktivitas kerja yang baik (*tabligh*). Paling tidak ada 4 (empat) hal yang menjadi *key success factors* (KSF) dalam mengelola suatu bisnis, agar mendapat celupan nilai-nilai moral yang tinggi, yaitu:

1. *Shiddiq* (benar dan jujur);
2. *Amanah* (terpercaya, kredibel);
3. *Fathanah* (cerdas);

#### 4. *Thabligh* (komunikatif).<sup>94</sup>

Untuk mengatasi masalah pemasaran produk olahan buah-buahan yang dialami oleh petani di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam menyusun organisasi bisnis yang jelas, terutama yang terkait dengan manajemen pemasaran produknya. Salah satu alternatif pemecahannya adalah merumuskan organisasi pemasaran produk olahan buah-buahan harus bersatu dalam satu wadah kepentingan bersama dalam bentuk model pemasaran melalui kemitraan usaha.

Kemitraan usaha yang diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dapat membuka peluang pengembangan usaha seluas-luasnya bagi Usaha Kecil dan Menengah Mikro (UMKM), oleh Pemerintah dan dunia usaha. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM bahwa kegiatan kemitraan UMKM terkait pemasaran produk olahan buah-buahan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain:

##### 1. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha petani buah-buahan sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra, misalkan perusahaan waralaba. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis dan manajemen, serta menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi, disamping memproduksi kebutuhan perusahaan. Kelompok mitra usaha pengolahan buah-buahan memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

##### 2. Pola Dagang Umum

Merupakan hubungan kemitraan dalam memasarkan hasil usaha kelompok tani buah-buahan yang dibutuhkan perusahaan. Beberapa kegiatan

---

<sup>94</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2000), hlm 120.

agribisnis hortikultura menerapkan pola ini. Kelompok tani bermitra dengan Toko Swalayan atau mitra usaha dagang lainnya. Pola yang sama dan disebut "*Contract Farming*" untuk komoditas hortikultura banyak berhasil dikembangkan oleh para pengusaha di Thailand. Kiat tersebut secara nyata dipraktekannya dalam membina petani produsen mitra (contohnya bisnis terong), oleh Bob Sadino.

### 3. Pola Sub Kontrak

Pola hubungan kemitraan yang dibangun oleh pihak perusahaan dengan kelompok mitra usaha gula semut yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Ciri khas dari bentuk sub kontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu. Pola ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal dan ketrampilan serta menjamin produk kelompok mitra usaha petani buah-buahan.

### 4. Pola Keagenan

Merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana industri kecil produk olahan buah-buahan diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya yang bertanggungjawab terhadap produk olahan buah-buahan yang dihasilkan, sedangkan industri kecil tersebut diberi kewajiban untuk memasarkan produk olahan buah-buahan tersebut, bahkan disertai dengan target yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

### 5. Waralaba

Merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan antara kelompok mitra pengrajin gula semut dengan perusahaan pemberi hak lisensi, merek dagang, saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan manajemen. Para pemilik usaha waralaba bertanggungjawab terhadap sistem operasi, pelatihan,

program pemasaran, merek dagang dan hal lainnya kepada mitra pemegang usaha.

Saat ini, pemegang usaha waralaba hanya mengikuti pola yang ditetapkan pemilik serta memberikan sebagian pendapatan berupa royalti dan biaya yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut. Oleh karenanya, implementasi bentuk-bentuk kemitraan tersebut seyogyanya dituangkan dalam bentuk tertulis, mengatur lingkup kemitraan, hak dan kewajiban, bentuk pembinaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Hal tersebut sangat penting dilakukan agar para petani buah-buahan yang berada di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar bisa lebih terjamin dari segi hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dapat memfasilitasi, mendukung, dan memstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

Kemitraan antar UMKM dan kemitraan antar UMKM dengan Usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, SDM dan teknologi. Selanjutnya Menteri dan menteri teknis akan mengatur pemberian insentif bagi Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan UMKM melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Dengan demikian, melalui model kemitraan usaha, tidak hanya pengrajin-pengrajin kecil yang mendapatkan efek manfaat dari adanya kemitraan usaha tersebut, tetapi perusahaan-perusahaan mitra pun juga demikian. Para petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar yang diikat dalam berbagai kelompok usaha tentu jauh lebih muda dibina dan punya peluang lebih besar untuk membangun

kemitraan usaha dengan pelaku usaha yang lebih besar. Adanya organisasi bisnis juga lebih membuka ruang untuk memperluas jaringan pemasaran produk olahan buah-buahan, bukan hanya pada segmen pemasaran yang kecil (eceran), tapi juga dapat diperluas ke jaringan pasar yang lebih besar seperti grosir.

#### **D. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Buah-Buahan Kepada Kelompok Petani Buah-Buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar**

Evaluasi program pelatihan adalah usaha pengumpulan informasi dan penjangkauan informasi untuk mengetahui dan memutuskan cara yang efektif dalam menggunakan sumber-sumber latihan yang tersedia guna mencapai tujuan pelatihan secara keseluruhan. Evaluasi pelatihan dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai hasil-hasil program pelatihan, kemudian menggunakan informasi itu dalam penilaian. Evaluasi pelatihan juga memasukkan umpan balik dari peserta yang sangat membantu dalam memutuskan kebijakan mana yang akan diambil untuk memperbaiki pelatihan tersebut. Dengan demikian maka evaluasi program pelatihan harus dirancang bersamaan dengan “perancangan pelatihan” berdasarkan pada perumusan tujuan.

Dalam forum evaluasi program pelatihan, setiap kegiatan dievaluasi berdasarkan tujuannya. Adapun tujuan evaluasi pelatihan, antara lain:<sup>95</sup>

1. Menemukan bagian-bagian mana saja dari suatu pelatihan yang berhasil mencapai tujuan, serta bagian-bagian yang tidak mencapai tujuan atau kurang berhasil sehingga dapat dibuat langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;

---

<sup>95</sup> M. Nasrul, *Evaluasi Program Pelatihan*, makalah materi pelatihan dipublikasikan dalam <http://www.google.com/forum> tanggal 2 April 2012 dan diakses tanggal 18 Agustus 2018.

2. Memberi kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pemikiran dan saran serta penilaian terhadap efektifitas program pelatihan yang dilaksanakan;
3. Mengetahui sejauh mana dampak kegiatan pelatihan terutama yang berkaitan dengan terjadinya perilaku di kemudian hari;
4. Identifikasi kebutuhan pelatihan untuk merancang dan merencanakan kembali kegiatan pelatihan selanjutnya.

Demikian halnya evaluasi pelatihan diperlukan sebagai bagian dari setiap proses atau tahapan pelatihan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari suatu pelatihan. Evaluasi pelatihan menghendaki adanya umpan balik secara terus menerus, sehingga kegiatan evaluasi pelatihan tidak hanya dapat dilakukan sekali pada akhir program. Setiap tahap pencapaian sasaran merupakan tindakan evaluasi terhadap program pelatihan. Ada beberapa komponen yang perlu dievaluasi dalam evaluasi setiap kegiatan pelatihan, antara lain:<sup>96</sup>

1. Pencapaian Tujuan dan Ketepatan Tujuan

Dalam evaluasi hendaknya dilakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan ketepatan tujuan. Artinya yaitu bahwa apakah pelatihan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan dan apakah tujuan tersebut tepat sesuai dengan kebutuhan pelatihan.

2. Isi atau Materi Pelatihan

Dalam evaluasi akhir hendaknya dilakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan isi atau materi pelatihan yang dibahas selama pelatihan berlangsung; yaitu antara lain apakah materi yang dibahas sesuai dengan tujuan, apakah materi pelatihan terlalu sederhana, terlalu sulit, terlalu teoritis dan lain sebagainya.

---

<sup>96</sup> M. Nasrul, *Evaluasi Program Pelatihan*, makalah materi pelatihan dipublikasikan dalam <http://www.google.com/forum> tanggal 2 April 2012 dan diakses tanggal 18 Agustus 2018.

### 3. Fasilitator Pelatihan

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengumpulan informasi tentang ‘fasilitator’ yang membantu proses terjadinya kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini perlu dilakukan pengumpulan informasi yang menyangkut tentang keterampilan fasilitator, kemampuan fasilitator dalam memfasilitasi pelatihan. Hal-hal yang perlu dievaluasi, antara lain:

- a. Penguasaan dan kemampuan menggunakan metoda partisipatif;
- b. Penguasaan dan pemahaman terhadap materi pelatihan;
- c. Kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi dengan peserta secara efektif;
- d. Kerjasama team fasilitator;
- e. Kemampuan penggunaan media dan sarana pelatihan secara efektif dan efisien;
- f. Peserta pelatihan.

Pengumpulan informasi tentang peserta perlu juga dilakukan dalam evaluasi akhir untuk mengetahui tingkat partisipasi peserta, perasaan peserta, kerjasama peserta dengan peserta yang lain, kerjasama dengan fasilitator. Di samping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kriteria peserta, apakah peserta yang terlibat dalam pelatihan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana ditetapkan dalam kerangka acuan pelatihan, dan lain-lain.

### 4. Metodologi Pelatihan/Efektifitas Pelatihan

Evaluasi pelatihan juga perlu mengumpulkan informasi tentang penggunaan dan pemanfaat metoda dan efektifitasnya. Apakah metoda yang dipergunakan mampu mendorong keterlibatan peserta, apakah metoda yang dipergunakan cocok dengan tujuan yang diharapkan, apakah metoda yang dipergunakan sesuai dengan sifat isi materi pelatihan.

## 5. Penyelenggaraan Pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelatihan yang seringkali diabaikan. Pada umumnya, evaluasi penyelenggaraan lebih berfokus pada aspek logistik. Hal-hal yang perlu dievaluasi antara lain meliputi:

- a. Komunikasi, yaitu bagaimana pemberitahuan atau undangan dipersiapkan oleh pihak Ujian, merupakan salah satu jenis evaluasi penyelenggara, apakah undangan jelas dan disertai dengan informasi yang dibutuhkan, biasanya dilengkapi dengan Kerangka Acuan Pelatihan;
- b. Sarana dan prasarana pendukung pelatihan yang meliputi tempat pelatihan, baik untuk diskusi pleno maupun untuk diskusi kelompok, konsumsi, akomodasi, ketersediaan dan kesiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk peserta dan fasilitator, kepanitiaan dan lain-lain.

Oemar Hamalik mengemukakan bahwa prosedur penyelenggaraan setiap pelatihan terdiri dari empat tahap, yaitu:<sup>97</sup>

1. Tahap pendahuluan, merupakan tahap persiapan sebelum peserta melaksanakan keseluruhan kegiatan. Pada tahap ini peserta melakukan kegiatan orientasi;
2. Tahap pengembangan, merupakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh pelatih. Pada tahap ini peserta melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya:
  - a. Kegiatan tatap muka dengan tim pelatih yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan yang telah direncanakan;
  - b. Kegiatan berstruktur, sebagai tindak lanjut kegiatan tatap muka seperti: berdiskusi, demonstrasi, eksperimen, dan lainnya;

---

<sup>97</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 78.



- c. Kegiatan mandiri, mendalami dan memperluas penguasaan materi/proyek, baik yang bersumber dari bacaan atau pun kegiatan pelatihan;
  - d. Seminar, sebagai media pertukaran informasi;
  - e. Kunjungan instansional, sebagai studi perbandingan untuk perbaikan dan peningkatan kerja;
  - f. Laporan harian, sebagai monitoring;
  - g. Karyawisata, sebagai penunjang kegiatan pelatihan, dan sebagainya.
3. Tahap kulminasi, merupakan tahap puncak kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Pameran, dimaksudkan untuk mempertunjukkan secara menyeluruh semua produk yang dihasilkan oleh peserta;
  - b. Seminar akhir, dalam seminar akhir ini dibahas secara menyeluruh semua pengalaman, kesan, dan berbagai masalah yang ditemui oleh peserta dan pembimbing selama pelaksanaan program. Pada bagian seminar akhir ini, berbagai teori yang menunjang ditinjau dan dilihat relevansinya;
  - c. Laporan individual, memuat semua pengalaman yang telah dilaksanakan peserta.
4. Tahap tindak lanjut, merupakan suatu tahap transisi, di mana berlangsungnya proses penempatan dan pembinaan terhadap para lulusan pelatihan.

Kesulitan mulai lebih terasa, khususnya untuk menempatkan lulusan pelatihan sedangkan kesempatan kerja belum tersedia. Dalam kondisi ini, dituntut keberanian dari pihak pengambil keputusan, misalnya menyediakan suatu proyek cipta kerja dengan bantuan modal dan pembinaan manajemen yang teratur dan terencana.

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa evaluasi program mempunyai ukuran keberhasilan, yang dikenal dengan istilah kriteria. Istilah kriteria dalam penilaian dikenal dengan kata “tolak ukur” atau ”standar”.

Kriteria adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria atau tolak ukur bersifat jamak karena menunjukkan batas atas dan batas bawah, sekaligus batas-batas di antaranya. Dengan demikian, kriteria menunjukkan gradasi atau tingkatan, dan ditunjukkan dalam bentuk kata keadaan atau predikat.<sup>98</sup>

Dasar dalam pembuatan standar atau kriteria adalah sumber pengambilan kriteria secara keseluruhan. Dengan pengertian bahwa kriteria adalah suatu ukuran yang menjadi patokan yang harus dicapai. Ada beberapa sumber pembuatan kriteria penilaian evaluasi, antara lain:<sup>99</sup>

1. Peraturan atau ketentuan yang sudah dikeluarkan berkenaan dengan kebijakan yang bersangkutan atau ketentuan yang berlaku umum;
2. Buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan (juklak);
3. Konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku ilmiah;
4. Hasil penelitian yang sudah dipublikasikan atau diseminarkan;
5. Pertimbangan orang yang memiliki kelebihan dalam bidang yang sedang dievaluasi (*expert judgment*);
6. Hasil kesepakatan kelompok/tim atau beberapa orang yang mempunyai wawasan tentang program yang dievaluasi;
7. Pemikiran sendiri (akal atau nalar sendiri).

Di samping kriterian tersebut ada beberapa kriteria penilaian/evaluasi program pelatihan, antara lain:<sup>100</sup>

1. Kriteria penilaian masukan, kriteria ini berkaitan erat dengan perencanaan program. Perangkat kriteria yang dapat digunakan adalah:
  - a. Tujuan perilaku yang dirumuskan secara operasional, rinci, mengacu pada perubahan tingkah laku yang mencakup atas aspek-aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap, berdasarkan data masyarakat,

---

<sup>98</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 23.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 127.

- posisi perkembangan peserta, disiplin ilmu manajemen, tujuan itu layak untuk dicapai, berdaya guna bagi fungsi-fungsi pendidikan dan pelatihan, serta memperhatikan segi prioritas dan keseimbangan;
- b. Seleksi peserta, merupakan syarat untuk mempersiapkan tenaga lulusan, dilaksanakan oleh lembaga diklat, sesuai dengan kemampuan kelembagaan, dilaksanakan oleh tenaga kepelatihan yang berpengalaman, berguna untuk rekrutmen, mencakup berbagai aspek seperti: kemampuan akademik, tingkat kecerdasan, kematangan, kesehatan, social, keterampilan berkomunikasi, minat, motivasi belajar, dan sebagainya;
  - c. Isi program pelatihan, sesuai dengan perkembangan IPTEK, memberi kemudahan untuk menguasai unsur-unsur dalam peta pengetahuan, peta keterampilan, dan peta sikap serta moral, bermakna bagi peserta untuk melaksanakan pekerjaan, perkembangan pribadi yang seimbang, dan untuk kehidupan sehari-hari. Isi/ bahan pelajaran mencakup pendidikan umum (kelompok dasar), pengajaran pokok/kejuruan (kelompok inti), dan pengajaran penunjang (pelengkap);
  - d. Pemilihan dan penggunaan metode dan media, harus konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai, bahan pelajaran, kemampuan pelatih, dan kondisi lingkungan;
  - e. Pembinaan, dilaksanakan terus-menerus dalam jangka panjang, membantu peserta untuk memahami dirinya, bersifat luwes, menggunakan berbagai instrument pengumpulan data, dan teknik langsung atau tidak langsung dengan prosedur individual dan kelompok;
  - f. Organisasi program pelatihan, merupakan program pelatihan professional, disusun seimbang yang memadukan teori dan praktek, berdasarkan disiplin ilmu, berurutan, berdasarkan sistematika tertentu.

2. Kriteria penilaian proses, yang mencakup penilaian secara internal dan eksternal.

Secara internal, kriteria penilaian mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Koherensi, adalah keterkaitan antara unsur-unsur dalam suatu program pelatihan;
- b. Sumber manusia, adalah kesesuaian antara kemampuan tenaga pelaksanaan dalam suatu program pelatihan;
- c. Persepsi pemakaian program, adalah reaksi dari pihak pemakai terhadap suatu program pelatihan yang telah dilaksanakan;
- d. Persepsi penyediaan program, adalah sikap dan penilaian penyedia program terhadap semua aspek program pelatihan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan;
- e. Efisiensi penggunaan biaya, adalah perbandingan antara biaya yang telah dianggarkan dan dikeluarkan bagi produk yang diharapkan dengan tercapainya hasil yang nyata setelah suatu program pelatihan dilaksanakan;
- f. Kemampuan, adalah kemampuan suatu program pelatihan yang ditujukan untuk menghasilkan produk yang telah dirancang sebelumnya dengan makna tertentu;
- g. Dampak (*impact*), adalah efek lebih yang dicapai oleh suatu program dibandingkan dengan tanpa pelaksanaan program tersebut atau dibandingkan dengan program-program lainnya.

Secara eksternal, kriteria penilaian mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Pengaruh kebijaksanaan, suatu program yang dikembangkan berdasarkan arahan kebijaksanaan tertentu;
- b. Analisis keuntungan, berdasarkan biaya yang dikeluarkan (*cost benefit analysis*); seberapa besar ketercapaian hasil program dibandingkan dengan pengeluaran biaya untuk melaksanakan program tersebut;

- c. Efek pelipat ganda, yaitu efek suatu program tidak hanya terjadi pada satu kelompok sasaran, tetapi juga dapat terjadi pada kelompok-kelompok sasaran lainnya.
3. Kriteria penilaian produk, penilaian terhadap produk suatu program pelatihan dilakukan berdasarkan kriteria, sebagai berikut:
    - a. Keinginan dan harapan, yaitu rasional tentang perlunya sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan pemakai sehingga perlunya pengembangan produk tertentu;
    - b. Kelayakan, adalah ukuran yang berkenaan dengan efisiensi administratif (pengelolaan) dan alokasi sumber-sumber (biaya);
    - c. Efektivitas produk, adalah ukuran yang berkenaan dengan hakikat produk dan penilaian pengaruh produk yang digunakan;
    - d. Kedayagunaan, adalah ukuran yang berkenaan dengan kualitas produk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam produk dan kemungkinan pelaksanaannya dalam bidang-bidang lainnya.

***Tahapan berikutnya menentukan instrumen evaluasi. Istilah evaluasi, pengukuran, dan tes sering diartikan sama atau saling tertukar, namun beberapa pemakai memberikan arti yang berbeda bagi masing-masing istilah tersebut.<sup>101</sup>***

1. Tes ialah sejumlah pertanyaan yang diberikan untuk dijawab.
2. Pengukuran, lebih luas dari tes. Pengukuran dapat dilakukan dengan beberapa cara di samping dengan tes, antara lain dengan observasi, skala rating, cek list yang dapat memberikan informasi dalam bentuk kuantitatif.
3. Evaluasi mencakup tes dan pengukuran, yaitu proses pengumpulan informasi untuk membuat penilaian yang mana kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan;
4. Observasi (pengamatan), yang dilakukan untuk melengkapi informasi;

---

<sup>101</sup> Farida Yusuf Tayibnapi, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 189.

5. *Anedotal Record* (AR), catatan pelatih hasil pengamatan perilaku peserta yang dianggap penting untuk dipertimbangkan, melengkapi hasil evaluasi dengan instrument lainnya;
6. *Rating Scale* (RS), berbeda dengan AR yang tidak terstruktur. RS dapat memberikan prosedur yang sistematis dalam mencatat dan melaporkan hasil evaluasi, hasil observasi yang terstruktur, dan ada tingkatan yang dipilih;
7. *Cecklist* (CL) hampir sama dengan RS, perbedaannya adalah macam pilihan yang diberikan untuk pertimbangan. Pada RS ada tingkatan yang harus dipilih, sedangkan pada CL yang dipilih adalah “ya” atau “tidak” karakteristik yang disebutkan dalam pilihan.

Dengan demikian dapat dikatakan di sini bahwa program pelatihan adalah realisasi dari suatu kebijakan. Evaluasi program pelatihan mutlak diperlukan adalah salah satu upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan program, atau untuk mengetahui implementasi dari suatu kebijakan. Evaluasi kegiatan program pelatihan mengacu pada tujuan umum sebagai ukuran atau tingkat keberhasilan melaksanakan suatu kegiatan.



**Gambar 4.12**

**Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Pengolahan Buah-buahan kepada Para Petani di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar**



**Gambar 4.13**

**Penyerahan Cendera Mata oleh Ketua Pokja PKM UIN SGD Bandung kepada Kepala Dinsos & P3A yang didampingi Kepala Seksi P3A dan Sekretaris Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar**

Kemudian untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah-buahan kepada kelompok tani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar dapat digambarkan pada matrik berikut:

**Tabel 4.1**

**Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Buah-Buahan Kepada Kelompok Petani Buah-Buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar**

Aspek Penilaian	Persiapan	Pelaksanaan	Evaluasi
Pencapaian Tujuan dan Ketepatan Tujuan	Rencana pelatihan telah disusun dengan lengkap, baik dari segi supra struktur maupun infra struktur	Secara umum tujuan kegiatan pelatihan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana secara tepat	Kegiatan pelatthan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana
Isi atau Materi Pelatihan	Isi/materi kegiatan pelatihan disusun sesuai kebutuhan peserta	Isi/materi pelatihan belum sepenuhnya memenuhi harapan dan target sesuai kebutuhan peserta	Peserta perlu diberikan isi/materi lanjutan pelatihan teknis mengolah buah-buahan

Fasilitator Pelatihan	Fasilitator pelatihan mewakili kalangan akademisi dan praktisi	Fasilitator pelatihan adalah perwakilan instansi terkait	Fasilitator pelatihan sebaiknya kalangan akademisi dan praktisi
Metodologi Pelatihan	Metodologi pelatihan dirancang bersifat pengembangan skill peserta	Metodologi pelatihan dilaksanakan sesuai rencana namun belum sepenuhnya tepat sasaran	Penerapan metodologi pelatihan belum efektif dan efisien sesuai sasaran dan target yang diharapkan
Penyelenggaraan Pelatihan	Penyelenggaraan pelatihan dirancang berjalan dengan baik sesuai agenda yang telah disusun	Penyelenggaraan pelatihan berjalan lancar sesuai dengan rancangan agenda yang telah disusun	Peserta mengharapkan adanya kegiatan lanjutan yang lebih bersifat terapan

Mengacu kepada tabel di atas, dapat dikatakan di sini bahwa pencapaian tujuan dan ketepatan kegiatan pelatihan secara telah terselenggara dengan baik dan lancar, kecuali dari segi isi/materi dan fasilitator tampaknya masih memiliki kekurangan, yakni peserta lebih membutuhkan isi/materi yang lebih bersifat teknis dan terapan dalam mengolah buah-buahan agar lebih memiliki nilai ekonomis. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah peserta sangat mengharapkan dilaksanakannya kegiatan lanjutan yang lebih bersifat terapan, diisi oleh pelaku bisnis langsung, ada simulasi pengolahan dan pengemasan buah-buahan menjadi aneka produk yang memiliki nilai jual tinggi.

Pada akhirnya, penulis dapat merumuskan bahwa tingkat keberhasilan suatu program pelatihan diantaranya dapat diukur berdasarkan sejauhmana implementasi program telah dilaksanakan dan sejauhmana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program pelatihan yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektifitasnya. Demikian pula dengan kebijakan-kebijakan baru yang berhubungan dengan program tersebut apakah didukung oleh data atau tidak. Oleh karena itu, evaluasi program pelatihan



pada gilirannya bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (*decision maker*) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan sebuah program di masa yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan pelaksanaan kegiatan PKM di lapangan, pada bagian akhir ini penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah mereka perlu diberikan pelatihan manajemen pengolahan, pengemasan, dan pemasaran buah-buahan agar produk mereka bukan hanya terjual di pasar tradisional, namun juga dapat terjual di pasar modern, baik lokal maupun nasional. Lebih dari itu, untuk mewujudkan harapan tersebut, maka para petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar juga perlu menyusun perencanaan bisnis yang baik meliputi semua komponen administrasi bisnis mulai dari proses produksi, supervisi, keuangan, sarana dan prasarana, personal, peluang pasar, dan evaluasi hasil usaha;
2. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah mereka perlu diberikan pelatihan manajemen pengolahan, pengemasan, dan pemasaran buah-buahan. Tujuan umum diberikannya pelatihan kepada para petani buah-buahan adalah agar mereka mampu mengembangkan usaha, menghindari semaksimal mungkin kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas dalam pekerjaannya. Secara khusus tujuan pelatihan kepada para petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Sehingga mereka merasakan betul manfaat dari pelatihan manajemen pengolahan, pengemasan, dan pemasaran buah-buahan tersebut;

3. Beberapa kendala yang menjadi penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan manajemen industri pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil komoditas agroindustri di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari, antara lain: kebijakan sektoral, kebijakan tenaga kerja, dan kebijakan konektivitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, paling tidak ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat desa, antara lain melalui strategi fasilitatif, strategi persuasif, strategi edukatif, dan strategi kekuasaan. Inti dari empat strategi pemberdayaan ekonomi di atas adalah memberikan cara pengelolaan terbaik yang harus dilakukan agar masyarakat pedesaan mau dan mampu mengelola sumberdaya yang mereka miliki. Solusi konkritnya adalah memberikan pelatihan manajemen industri pengolahan, pengemasan dan pemasaran hasil pengolahan buah-buahan kepada kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
4. Pencapaian tujuan dan ketepatan kegiatan pelatihan secara umum telah terselenggara dengan baik dan lancar, kecuali dari segi isi/materi dan fasilitator tampaknya masih memiliki kekurangan, yakni peserta lebih membutuhkan isi/materi yang lebih bersifat teknis dan terapan dalam mengolah buah-buahan agar lebih memiliki nilai ekonomis. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah peserta sangat mengharapkan dilaksanakannya kegiatan lanjutan yang lebih bersifat terapan, diisi oleh pelaku bisnis langsung, ada simulasi pengolahan dan pengemasan buah-buahan menjadi aneka produk yang memiliki nilai jual tinggi.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merumuskan rekomendasi/tindak lanjut dari kegiatan PKM ini, antara lain:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah mereka perlu diberikan pelatihan manajemen pengolahan, pengemasan, dan pemasaran buah-buahan yang bersifat teknis dan simulasi oleh praktisi langsung;
2. Pemerintah Daerah melalui instansi terkait perlu memberikan supervisi lebih intensif dan berkala dalam bentuk pendampingan kepada para petani untuk mengolah, mengemas, dan memasarkan hasil olahan buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar dan sekitarnya;
3. Pemerintah Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar perlu membuka ruang dan akses yang lebih luas bagi para petani untuk memasarkan hasil olahan buah-buahan dalam berbagai bentuknya di pasar tradisional dan pasar modern;
4. Sebagai salah satu sentra industri buah-buahan terbesar di Kota Banjar, maka Desa Waringinsari Kecamatan Langensari dapat dikembangkan sebagai *Pilot Project Desa Wisata Berbasis Agro-Industri*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustina, Shinta. 2011. *Manajemen Pemasaran*. Malang: Universitas Brijwijaya Press.
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. 1994. *Bulugh al-Maram*. Terjemah A. Hasan. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Al-Arif, Nur Rianto. 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. *Kifayat al-Ahyar*. Terjemah M. Thalib. Surabaya: Bina Ilmu.
- Alma, Buchari. 2000. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Syatibi, Imam. 1996. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bachtiar, Wardi. 1995. *Pengaruh Etos Kerja Terhadap Status Sosial Ekonomi Muslim Sunda Pemukiman Daerah Kumuh di Kota Madya Bandung*. Bandung: Disertasi Unpad.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres.
- Bernardin and Russell. 1998. *Human Resource Management*. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Chambers, R. 1996. *Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Oxfam – Kanisius.
- Chambers, Robert. 1996. *Participatory Rural Appraisal (Memahami Desa Secara Partisipatif)*, Terjemahan Y. Sukoco. Yogyakarta: Kanisius.
- DeCenzo and Robbins. 1999. *Human Resource Management, Sixth Edition*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

- Dessler, Gary. 1997. *Human Resource Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dharmamesta, Basu Swastha dan Handoko, T. Hani. 2004. *Manajemen Pemasaran Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Liberty.
- Dimiyati dan Moejiono. 1996. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djarmiko, Muhammad Budi dan Koesdijanto, Doddy. 2012. *The Book Of Empowering Center*. Bandung: STEMBI Bandung Business School.
- Gomez-Mejia, Balkin, Cardy. 2001. *Managing Human Resources*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Hamalik, Oemar. 2007. *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Titin dan Yeti, keduanya merupakan representasi dari pengrajin gula semut di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, yang dilaksanakan tanggal 26-27 Agustus 2017.
- Hatimah, Ihat dkk. 2007. *Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: HUP.
- Hubeis, Musa. 2011. *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kartajaya, Herman dan Sula, M. Syakir. 2006. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan.
- Kotler dan Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13*. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip. 1996. *Dasar-dasar Pemasaran Jilid 1*. Jakarta: Prenhallindo.
- Martodireso dan Widada. 2002. *Agribisnis Kemitraan Usaha: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mikhael. 2008. *Filsafat Ekonomi 'Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Morrissan. 2008. *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta: Kencana.

- Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Munir. 2001. *Qiyas Penalaran Analogis dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka.
- Mutiara, Panggabean. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright. 2003. *Human Resource Management, International Edition*. New York: The McGraw-hill Companies Inc.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 1991. *Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robbins dan Stephen P. 2001. *Human Resource Management*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Soehari, Agus. 2007. *Budaya Visual Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Soemardjo. 2004. *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesanya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumidiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Taqiyuddin, Abu Bakar Ibn Muhammad. t.th. *Kifayatul Akhyar*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wrihatnolo, Randy R. & Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kelompok Gramedia.

Ya'kub, Hamzah. 1993. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponogoro.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **B. Artikel/Makalah**

Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi", dalam *Jurnal Ekonomi* Nomor 20, Edisi Juni-Juli.

Latif, A. Gunawan. 1996. *Peran LSM dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Pulau Barang Caddi Kota Makasar*, Tesis Program Pasca Sarjana IPB PS SPL. Bogor.

Putri, Yuninda Gerdiana dan Rosidah. 2012. "Kemitraan Usaha Total Quality Management", makalah kuliah Kewirausahaan pada Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Rahardjo, M. Dawam. 2001. *Wacana Studi Ekonomi Islam Kontemporer*, makalah dalam "Seminar Ekonomi Islam" di Jakarta, 10 Maret.

Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2004-2029 dan Rencana Strategis UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015-2019.

Zadjuli, Suroso Imam. 2003. *Kelembagaan Ekonomi Islam Dalam Perspektif Islam: Kajian Kritis Terhadap Kelembagaan Konvensional*, makalah dalam "Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam" untuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni.

Zurnali, Cut. 2004. *Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Perilaku Produktif Karyawan pada Divisi Long Distance PT Telkom Indonesia Tbk*, Tesis, Program Pascasarjana UNPAD Bandung.

## **C. Undang-Undang**

Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi kerangka acuan kegiatan PKM di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Usaha Kecil dan Menengah.

#### **D. Internet**

Kusnadi dalam Sandra Pratama Sutrisno, *Pengertian Kemitraan Usaha: Bahan Mata Kuliah Manajemen Kewirausahaan* dalam <https://pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan/> diakses tanggal 23 Juli 2017.

Marindo, “Kemitraan Usaha Peternak dan Penguasaha dalam Peternakan Ayam”, artikel yang ditulisa Sandra Pratama Sutrisno dalam <https://pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan/> diakses 23 Juli 2017.

Editor, “Profil Kota Banjar” <http://kotabanjar.go.id/> diakses tanggal 18 Agustus 2018.

Mushlihin Al-Hafizh, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, lihat dalam <http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-pemberdayaan-ekonomi-umat.html> diakses tanggal 18 Agustus 2018.

Budhi Kho, “Tahapan dan Manfaat Pelatihan Bagi Pelaku Usaha”, artikel dalam <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-training-pelatihan-tahap-pelatihan/> diakses 18 Agustus 2018.

Editor, “Membangun Indonesia dari Desa: Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Langkah Mandiri untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan” lihat artikel lengkap dalam <http://bem-s1.fe.unpad.ac.id/membangun-indonesia-dari-desa-pemberdayaan-masyarakat-desa-sebagai-langkah-mandiri-untuk-mengatasi-masalah-kemiskinan-dan-ketimpangan/> diakses 18 Agustus 2018.

Pernyataan Enny Sri Hartati (Direktur Eksekutif Indef), makalah seminar nasional bertema “Kawasan Perdesaan dan Nilai Tambah Ekonomi”,

di Jakarta, 07 Desember 2017 yang dipublikasikan dalam [http://www.harianterbit.com/hantereekonomi/read/2017/12/08/90777/0/21/ Kualitas-SDM-Masih-jadi-Kendala-Pembangunan-Desa](http://www.harianterbit.com/hantereekonomi/read/2017/12/08/90777/0/21/Kualitas-SDM-Masih-jadi-Kendala-Pembangunan-Desa) diakses tanggal 18 Agustus 2018.

- M. Nasrul, *Evaluasi Program Pelatihan*, makalah materi pelatihan dipublikasikan dalam <http://www.google.com>[forum tanggal 2 April 2012 dan diakses tanggal 18 Agustus 2018.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **CURICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag  
Tempat/ Tgl. Lahir : Ciamis, 6 November 1974  
Jabatan : Dosen/Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syari'ah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung  
Alamat : Griya Bukit Manglayang Jl. Elang No. 6 Cinunuk  
Cileunyi Bandung 40624 Telp. 081322457211  
E-Mail Address : dk\_yusup@yahoo.com / dkyusup@uinsgd.ac.id  
Twitter/Facebook : @DeniKYusup

### **PENDIDIKAN**

1. S1 Muamalah FSH (1998) dan S2 Hukum Islam (2001) IAIN SGD Bandung, Postgraduate Master in Islamic Studies, Leiden University, the Netherlands (2003), dan S3 Hukum Islam UIN SGD Bandung (2009);
2. International Short Course of Islamic Studies, Postgraduate Master Program, Leiden University, The Netherlands (2003);
3. International School of Human Rights, Utrecht University-The Netherlands, Katholic University of Leuven-Belgium, and Northwestern University California, United States of America (2003);
4. International Student Conference in Aachen, Germany and Paris, France (2003);
5. International Visiting Fellowship in Leadership Program (IVLP), Department of State, United States of America (2012);
6. International Visiting Fellowship Program in International Cross-Culture of Asian Student, University of Tokyo, Japan (2012);
7. International Visiting Fellowship Program in International Partnership for Legal Identity and Legal Aid, AIPJ-AUSAID, Australia (2013).
8. International Visiting Fellowship Program for Research in University Legal Clinic at Monash University, Melbourne (2016).

### **ORGANISASI**

1. Ketua I HMJ Muamalah FSH (1995-1996), Ketua LPKP SMF Syari'ah (1996-1997) dan Ketua II BEM IAIN/UIN SGD Bandung (1997-1998);
2. Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), Leiden-The Netherlands (2003);
3. Ketua Departmen Pengembangan Ekonomi Syari'ah, Pengurus Pusat Himpunan Sarjana Syari'ah (PP HISSI) (2009-Skrng)
4. Ketua Dewan Pakar Hubungan Kerjasama Luar Negeri ICMJ Orwil Jawa Barat (2012-Skrng);

5. Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) Jawa Barat (2012-Skrng);
6. Senior Anotator di Lembaga untuk Independensi dan Pembaharuan Peradilan (2013-Skrng).

## **CURICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Widiawati, S.Pd, MM  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 03 Mei 1981  
Jabatan : Dosen Prodi MKS  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung  
Alamat : Komplek Griya Citra Mas Cinunuk Cileunyi  
Bandung 40624 Telp. 085323024441  
E-Mail Address : widiawati@uinsgd.ac.id

### **PENDIDIKAN**

1. SDN Cikawung Ading Tasikmalaya (1993)
2. SMPN 2 Cipatujah Tasikmalaya (1996)
3. SMKN 1 Tasikmalaya (1999)
4. S1 Ilmu Pendidikan Ekonomi UPI Bandung (2003)
5. S2 Magister Manajemen STIE ISM Tangerang (2014)

### **PENGALAMAN**

1. CPNS MKS FSH UIN SGD Bandung (2015-2016);
2. Dosen MKS FSH UIN SGD Bandung (2016-Sekarang).

## **CURICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Azis Surono  
NIM : 1143070037  
Jabatan : Mahasiswa MKS FSH/Anggota Tim  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung  
Alamat : Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung  
40614  
E-Mail Address : azissurono.mksfsh@gmail.com

### **PENDIDIKAN**

1. SDN Kutajaya II Karawang (2008);
2. SMPN Kutawaluya Karawang (2012)
3. SMAN Rengasdengklok (2014);
4. S1 MKS FSH UIN SGD Bandung (2014-Sekarang);

### **ORGANISASI**

1. Fungsionaris HMJ MKS FSH UIN SGD Bandung (2016-2017);
2. Fungsionaris SEMA FSH UIN SGD Bandung (2017-2018).

**KERANGKA ACUAN (TERM OF REFERENCE)**  
**PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**TIM POKJA PKM LP2M UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**BEKERJASAMA DENGAN**  
**DINAS SOSIAL & P3A DAN DINAS KOPERASI UKM &**  
**PERDAGANGAN**  
**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>LEMBAGA</b>	: KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
<b>UNIT KERJA/SATKER</b>	: LP2M UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
<b>PROGRAM</b>	: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
<b>HASIL (OUTCOME)</b>	: PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
<b>MITRA KERJA</b>	: PEMERINTAH KOTA BANJAR
<b>UNIT KERJA/SATKER</b>	: DINAS SOSIAL & P3A DAN DINAS KOPERASI UKM & PERDAGANGAN KOTA BANJAR
<b>KEGIATAN PEMASARAN</b>	: PELATIHAN PENGOLAHAN, PENGEMASAN, DAN
<b>INDIKATOR</b>	<b>HASIL KOMODITAS AGROINDUSTRI</b> : MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGOLAH HASIL KOMODITAS AGROINDUSTRI DI DESA WARINGINSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR
<b>KELUARAN (OUTPUT)</b>	: PARA PETANI MAMPU MENGOLAH HASIL PERKEBUNAN SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN DAN SUMBER DAYA EKONOMI DI KOTA BANJAR
<b>LOKASI KEGIATAN</b>	: DESA WARINGINSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR
<b>VOLUME</b>	: 16
<b>SATUAN UKUR</b>	: JAM



**uin**  
**SUNAN GUNUNG DJATI**  
**BANDUNG**



**DINAS SOSIAL DAN P3A**  
**KOTA BANJAR**



**DINAS KOPERASI UKM**  
**DAN PERDAGANGAN**  
**KOTA BANJAR**



## **A. Latar Belakang**

Untuk lebih mendorong pelaksanaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai instansi di dalam dan luar negeri, tak terkecuali dengan sejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia, salah satunya adalah Pemerintah Kota Banjar Propinsi Jawa Barat.

Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah merupakan bagian integral peran Perguruan Tinggi dalam memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Kota Banjar, salah satu langkah nyatanya adalah memberdayakan masyarakat di Kota Banjar di berbagai bidang, seperti pendidikan, keagamaan, sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan kemasyarakatan.

Adapun yang menjadi fokus kegiatan PKM LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018 ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sasaran utamanya adalah memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pelatihan industri pengolahan buah-buahan berbasis agrowisata di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara Tim Pokja PKM LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) serta Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Pemerintah Kota Banjar.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/06361/2015 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

10.Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Bandung Nomor 082A Tahun 2012 tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

### **C. Tujuan dan Target Pencapaian**

1. Memberikan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kelompok petani dalam industri pengolahan buah-buahan berbasis agrowisata di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
2. Memberikan akses, pendampingan, dan penyuluhan secara terpadu dan sistemik kepada kelompok petani dalam industri pengolahan buah-buahan berbasis agrowisata di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya;
3. Meningkatkan peran, kapasitas, dan partisipasi perempuan melalui kegiatan wirausaha dalam rangka mendukung program pembangunan di Kota Banjar dan mewujudkan ***Kota Banjar Menjadi Daerah Termaju di Wilayah Priangan Timur.***

### **D. Desain Program**

#### **4. Perencanaan Program:**

- a. Koordinasi dan Konsultasi  
Koordinasi dan Konsultasi dilakukan oleh Tim Pokja PKM UIN SGD Bandung dengan Dinas Sosial & P3A dan Dinas Koperasi UKM & Perdagangan Kota Banjar
- b. Pemetaan Potensi Ekonomi  
Cakupannya adalah Pengembangan Kawasan Bisnis Terpadu, Pengembangan Industri Kreatif Syariah, Pengembangan Desa Wisata Syariah, dan Promosi Komoditas Unggulan Buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.
- c. Target/Sasaran  
Target/Sasarannya adalah kalangan kelompok petani buah-buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

#### **5. Pelaksanaan Program:**

- a. Nama Kegiatan  
Nama Kegiatan adalah Pelatihan Pengolahan, Pengemasan dan Pemasaran Hasil Komoditas Agroindustri
- b. Pelaksana Kegiatan  
Pelaksana adalah Kolaborasi Tim Pokja PKM UIN SGD Bandung dan Dinas Sosial & P3A dan Dinas Koperasi UKM & Perdagangan Kota Banjar
- c. Narasumber dan Materi Kegiatan  
Narasumber dan Materi Kegiatan disusun oleh Tenaga Ahli, Tim Pokja UIN SGD Bandung, Dinas Sosial & P3A, dan Dinas Koperasi UKM & Perdagangan Kota Banjar
- d. Peserta Kegiatan

Peserta adalah 8 Kelompok Tani Buah-Buahan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

e. Waktu Kegiatan

Dilaksanakan 2 hari yakni Jumat dan Sabtu, 27-28 Juli 2018

f. Dana Kegiatan

Kegiatan ini dibiayai oleh DIPA UIN SGD Bandung 2018 dan APBD Kota Banjar

**6. Evaluasi Program:**

g. Menyusun Laporan Akhir Kegiatan yang meliputi Laporan Substantif dan Laporan Keuangan;

h. Laporan Akhir Kegiatan disampaikan dalam bentuk *Hard File* dan *Soft File*;

i. Semua bentuk Laporan Akhir Kegiatan dan Dokumentasinya akan dipublikasikan sesuai keperluan.

**E. Penutup**

Demikian TOR ini disusun sebagai kerangka acuan realisasi program kerjasama antara PKM LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Dinas Sosial & P3A dan Dinas Koperasi UKM & Perdagangan Kota Banjar.

Bandung, 04 April 2018  
Ketua Tim Pokja PKM UIN,

**Dr. Deni Kamaludin Yusup, MA**  
NIP. 197411062005011006

**AGENDA ACARA KEGIATAN**  
**PELATIHAN PENGOLAHAN, PENGEMASAN, DAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS**  
**AGROINDUSTRI DESA WARINGINSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR**  
**KERJASAMA TIM POKJA PKM LP2M UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**DENGAN DINAS SOSIAL & P3A DAN DINAS KOPERASI UKM & PERDAGANGAN**  
**PEMERINTAH KOTA BANJAR**

**Banjar, 27-28 Juli 2018**

<b>WAKTU</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANA</b>
<b>Jumat, 27-07-2018</b>		
07.30 – 08.30	Check in Peserta	Peserta
08.30 – 09.00	1. Pembukaan 2. Sambutan Tim Pokja PKM UIN Bandung 3. Sambutan Kepala Dinsos & P3A Kota Banjar 4. Doa/Tutup	Panitia Ketua Pokja PKM UIN  Kadinsos & P3A Kota Banjar
09.00 – 11.00	Sesi 1 <b>Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Mengelola Komoditas Hasil Pertanian dan Perkebunan</b>	Dinas Sosial dan P3A Kota Banjar
11.00 – 13.00	Sholiskan	
13.00 – 15.00	Sesi 2 <b>Manajemen Pengolahan Komoditas Buah-buahan Hasil Pertanian dan Perkebunan</b>	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banjar
<b>Sabtu, 28-07-2018</b>		
08.00 – 10.00	Sesi 3 <b>Manajemen Pengemasan Komoditas Buah-buahan Hasil Pertanian dan Perkebunan</b>	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banjar
10.00 – 12.00	Sesi 4 <b>Marketing Mix Strategy: Product, Price, Place, and Promotion</b>	Widiawati, SE, MM
12.00 – 12.30	Penutupan	Panitia

## PHOTO-PHOTO DOKUMENTASI KEGIATAN











## PEMASARAN (Marketing)

Adalah segala kegiatan untuk menyampaikan barang-barang ke tangan konsumen baik itu konsumen rumah tangga maupun konsumen industri.

Supaya usaha kegiatan pemasaran berjalan dengan baik, pertama-tama produk yang hendak ditawarkan harus sesuai dengan **selera pasar** atau dalam bahasa pemasaran dikenal sesuai dengan **kebutuhan (needs)** dan **keinginan (want)** target pasar yang dituju.

Need



DQP 1514

wants



## MARKETING MIX “Bauran Pemasaran”

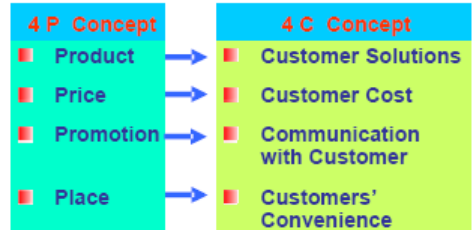
- ▶ *Marketing mix*, strategi yang akan digunakan untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam pasar.
- ▶ Pengertian bauran (*mix*) adalah terpadu atau campuran yang terdiri dari bermacam-macam unsur (*the mixture of elements*) dimana masing-masing saling menunjang dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan.

- ▶ Empat variabel untuk memenangkan persaingan (Alex D. Triyana 1985:19)
  1. Bauran pemasaran (*marketing mix*) yang terdiri dari empat unsur: *Product, Price, Place, and Promotion (4 P's)*.
  2. Segmentasi Pasar, yang kemudian disusul dengan pemilihan target pasar.
  3. Anggaran Pemasaran (*Marketing Budget*)
  4. Ketepatan waktu (*timing*)

## MARKETING MIX



## KONSEP PENERAPAN PEMASARAN



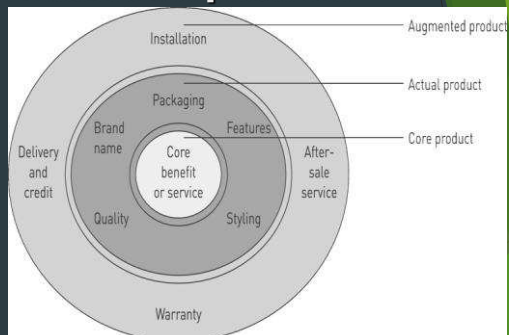
## Marketing mix



## PRODUCT

- Produk adalah serangkaian keuntungan-keuntungan yang disampaikan kepada customer.
- Bentuk "KEUNTUNGAN" yang disampaikan bisa tangible dan intangible.

## Levels of a product



## Brand

- ▶ Mudah diingat
- ▶ Menimbulkan Kesan Positif
- ▶ Tepat untuk Promosi



## Packaging /Kemasan/ Pembungkus

Berlaku Rumus AIDA+S

- A = Attention
- I = Interest
- D = Desire
- A = Action
- S = Satisfaction



## Packaging (Pengemasan)

### Apa yang WAJIB Untuk Packaging Anda



- 1 Brand Nama/Logo/Merk Dagang**  
Merupakan nama dagang dari Perusahaan anda.  
(contoh: Nestle, Indofood, AmWay, dll)
- 2 Nama Produk**  
Nama yang diberikan kepada produk anda.  
(contoh: Indomie, Suparmie, Mico, dll)
- 3 Jenis Produk**  
Jenis produk yang anda pasarkan.  
(contoh: Susu Cokelat, Kripik Pisang, dll)
- 4 Logo Halal**  
Tanda sertifikat bahwa produk anda dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Tanda ini dikeluarkan oleh Dit. POM dan MPU Provinsi tempat dimana anda berdomisili.
- 5 Berat Netto Produk Anda**
- 6 PHTT (Peringatan)**  
Bomor peringatan yang menyatakan bahwa produk anda telah lulus uji klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di provinsi anda.
- 7 Penjelasan Produk**  
Penjelasan singkat tentang keunggulan produk anda.
- 8 Expire Date**  
Tanggal masih dapat dipergunakan atau tidak dari produk yang dibungkus dalam tersebut sebuah packaging
- 9 Barcode**  
Sistem registrasi komputerisasi barang
- 10 Kemasan**  
Kandungan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat produk anda.
- 11 Kandungan Gizi**  
Kandungan Gizi yang dimiliki oleh produk anda.
- 12 Alamat & Keterangan Produsen**  
Alamat dari anda sebagai produsen. Berguna apabila ada keluhan dari konsumen.

## PRICE (Harga)

Adalah pengorbanan yang harus diberikan/dikeluarkan oleh target market (Konsumen) untuk memperoleh produk yang kita pasarkan

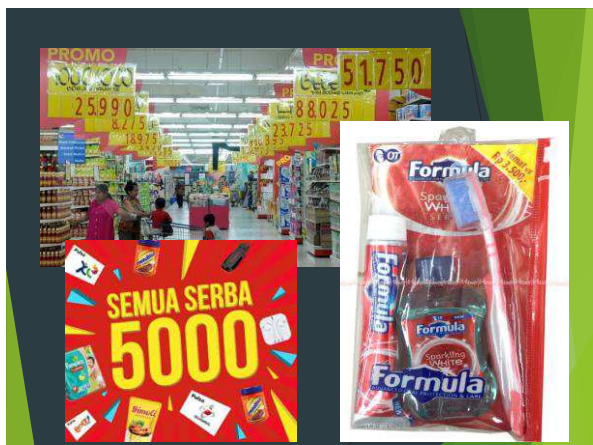
Price:

Produsen

1. Skimming (peluncuran)
2. Penetration (penetrasi)

Pengecer

1. Pricing Lining
2. Odd Prices
3. Combination Offer



Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.



## Advertising/Iklan

- ▶ Spanduk
- ▶ Billboard/Papan Iklan
- ▶ Brosur
- ▶ Iklan di Media cetak atau elektronik

## Promosi Penjualan

- ▶ Potongan Harga/Diskon
- ▶ Kupon Undian
- ▶ Percobaan Produk Gratis



## Publisitas

Segala bentuk komunikasi nonpersonal yang tidak berbayar mengenai suatu gagasan, barang atau jasa. Publisitas bias dilakukan dalam pameran, bakti social dan kegiatan lainnya. Tujuannya supaya bias membangun citra yang baik di masyarakat.

## Personal Selling

Kegiatan promosi yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan calon konsumen (pembeli).

## Media Interaktif

Internet merupakan komponen utama, sehingga media interaktif bias disebut juga pemasaran online.



## Place/Distribusi

Place:

1. Retail (eceran)
2. Wholesale (besar-besaran)
3. Mail order (pesanan lewat surat)
4. Internet
5. Direct sales (penjualan langsung)
6. Multi channel (berbagai saluran)



MULTI  
LEVEL  
MARKETING







## PENGEMBANGAN AGROPHOLITAN BERBASIS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

Disusun Oleh :  
YADI SURYADI PRAJA, S.Sos.,M.AP  
NIP : 19830226 200801 1 003

DINAS KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN  
KOTA BANJAR

### PENDAHULUAN

Pembentukan Kota Banjar sebagai daerah otonom baru yang terpisah dari daerah induk Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan di Kota Banjar sejak diresmikan pada tanggal 21 Februari 2003 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Sementara itu, mayoritas kegiatan perekonomian di Kota Banjar saat ini adalah kegiatan ekonomi berbasis pertanian, seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan lainnya. Kegiatan tersebut dapat dikembangkan lebih luas di masa depan, dan menjadi basis ekonomi kota yang kuat. Sebagai agropolitan, kegiatan perekonomian Kota Banjar juga berpeluang dikembangkan lebih luas ke bidang bisnis berbasis pertanian (agrobisnis), seperti agroindustri, jasa-jasa pertanian, agrowisata, serta koleksi dan distribusi produk-produk pertanian. Pengembangan kegiatan pertanian sebagai basis ekonomi dapat menjadikan Kota Banjar menjadi pusat ekonomi wilayah Priangan Timur dengan tetap mempertahankan kultur gotong royong dan partisipasi masyarakat tetapi disisi lain dapat memodernkan diri namun tetap memelihara keasrian dan keseimbangan ekosistem. Dengan latar belakang tersebut maka kota Banjar mengusung Visi *Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar Yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan*



### PERMASALAHAN

#### A. Sektor Pertanian/Sektor Rill



1. Masyarakat Petani kurang diajarkan mengenai analisis usaha, banyak para petani yang beralih profesi, hal itu disebabkan karena usaha dari sektor pertanian tidak menjanjikan.
2. Usia produktif masyarakat petani relatif usianya sudah tua. Minat Generasi muda sebagai penerus petani relatif sangat kurang, hal tersebut dikarenakan dari sektor pertanian tidak menjanjikan.
3. Mayoritas masyarakat dipedesaan adalah petani maupun petani penggarap yang dalam kehidupan keseharian bertani sebagai mata pencaharian, dan sebagai sumber pendapatan bagi ekonomi keluarga. Rata-rata hidup dalam garis kemiskinan dengan beban tanggungjawab keluarga yang tinggi, sedangkan pemasukan minim.
4. Petani masih menjual hasil produksinya ke tengkulak, yang tentunya harga tengkulak lebih rendah, sehingga merugikan para petani, dan permainan harga di atur oleh tengkulak. Hal tersebut juga bisa mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat untuk membeli produk-produk dari Kota Banjar
5. Adanya penilaian yang tidak pas pada bidang pertanian oleh Lembaga Keuangan Perbankan maupun non perbankan bahwa disektor usaha pertanian tidak prittable dan bankable. Sehingga akses permodalan terhambat mengakibatkan perkembangan usaha di sektor pertanian stagnan.

### PERMASALAHAN

#### B. Sektor Ekonomi/ Koperasi dan UMKM Kota Banjar



1. Koperasi Kelurahan atau Bumdes sekarang sudah punya uang 1.150.000.000. sebagian ADD juga digunakan untuk membiayai usaha-usaha ekonomi produktif yang dikelola masyarakat, namun *tidak ada yang mengarahkan ke arah sektor pertanian atau sektor rill*. Kebanyakan pengelola Koperasi atau Bumdes melakukan usahanya ke sektor pinjam pinjam, yang tentunya sektor Simpan pinjam sangat rentan dengan kemandegan.
2. Anggapan masyarakat bahwa dana 1,15 Miliar tersebut adalah dana *hibah*, padahal Pemerintah Kota Banjar memberikan alokasi dana penguatan ekonomi untuk membiayai usaha-usaha ekonomi produktif, dana tersebut digulirkan dan dikelola oleh kelurahan/desa dan *harus dikembalikan* kepada Pemerintah Kota Banjar.
3. Dari 163 Koperasi di Kota Banjar masih banyak yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tercatat 48 koperasi yang melaksanakan RAT. Yang sebagiannya belum melaksanakan RAT, malahan ada yang tidak berjalan sama sekali.
4. Semakin maraknya rentenir berkedok Koperasi dengan berbagai modus operasinya yang menjerat masyarakat petani.
5. Imej yang ada di masyarakat bahwa Koperasi itu adalah jenis usaha Koperasi Simpan Pinjam.
6. UMKM di Kota Banjar kurang tersentuh program pemerintah terutama dalam hal Pembiayaan. Karena Bank pelaksana program Pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) menerapkan sistem Bankkeble. UMKM jarang yang menerapkan Bankkeble. Karena rata-rata pelaku UMKM tidak mengerti Bankkeble.
7. Persyaratan pendukung untuk UMKM/IKM Kota Banjar seperti P-IRT, Sertifikat Halal, SIUP, TPD, HO (perijinan) jarang yang di terapkan oleh UMKM.
8. Bahan Baku produksi tidak tersedia di Kota Banjar, sehingga Pelaku UMKM/IKM mencari bahan baku di luar Kota Banjar
9. Jarangnya Badan Usaha/Koperasi yang mau menjadi penyedia Bahan Baku di Kota Banjar.
10. Jarangnya Badan Usaha/Koperasi yang mau menyediakan sarana pemasaran UMKM/IKM Kota Banjar.

## PERMASALAHAN



### C. Sektor Pemerintah Kota Banjar

1. Ego sektoral antar Intansi masih tinggi. Mereka terkesan mengurus bidang-bidang masing-masing, tidak ada kebersamaan untuk membangun, terkadang setiap kebijakan di setiap intansi terkadang tidak nyambung atau tidak mendukung terhadap konsep Agropolitan.
2. Pola pikir Pegawai Negeri Sipil yang masih belum peka terhadap konsep Agropolitan.

## SOLUSI



### A. Sektor Pertanian/Sektor Rill

1. Mendirikan **Koperasi** yang berbasis pertanian terpadu sebagai wadah bagi para petani guna mengakses permodalan maupun pemasaran hasil pertanian, dengan maksud untuk menghindari petani pola **liron** dari para tengkulak serta meningkatkan hasil petani dengan pendampingan modal, teknis, penanganan pasca panen berkelanjutan, untuk mengentaskan petani dari garis kemiskinan, sehingga usaha di bidang sektor ini bisa menjanjikan.
2. Penyerapan Tenaga Kerja pedesaan yang tidak memiliki keahlian untuk dibina oleh Koperasi dalam lingkup kerjasama pemanfaatan lahan anggota Koperasi di Bidang usaha pertanian

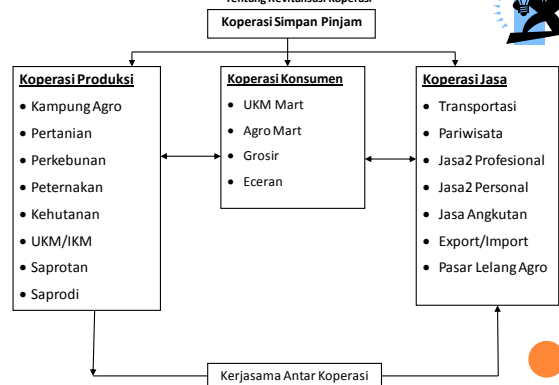
### B. Sektor Ekonomi/ Koperasi Kota Banjar

1. Mengembangkan Koperasi disesuaikan dengan Undang-undang terbaru Nomor 25 Tahun 1992 dengan pola pengembangan pemikiran sebagai berikut :

## DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Peroperasian.
2. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal.
3. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
6. Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan UMKM, Mendagri dan Kepala Pertanian nasional RI Nomor 017/SK/BM/KUKM/VII/2007 Nomor:57-351 tahun 2007, No 5 SKB-BPN - 2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang percepatan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan.
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri KUMKM dan Menteri Perdagangan No.500-738.A/2010, No 1320.1/M-DAG/MPU/IX/2010 dan No 12.1/NKB/M.KUKM/IX/2010 tentang sinergi program pengembangan ekonomi dan penataan lingkungan perkotaan melalui penguatan usaha sektor mikro
8. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Revitalisasi Koperasi
9. Surat Kementrian Koperasi dan UMKM RI No631/DEP.3.5/ VII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang penjaminan kredit Daerah (LPKD) bagi koperasi dan UKM.

Kerangka Pemikiran  
Konsep Koperasi menurut Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013  
Tentang Revitalisasi Koperasi



Penjelasan :

- a. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota. Fungsinya adalah sebagai pembuat produk pertanian.
- b. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota. Fungsinya adalah sebagai penjual/pedagang dari produk pertanian.
- c. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota. Fungsinya hampir sama dengan koperasi konsumen, namun ruang lingkupnya lebih luas untuk pengadaan Barang produksi pertanian, baik itu export ataupun import.
- d. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota. Jadi orientasi pelayanan Koperasi Simpan Pinjam adalah kepada Anggota Koperasi bukan ke Anggota Masyarakat. Fungsi koperasi simpan pinjam adalah sebagai Bank yang melayani pembiayaan untuk Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, dan Koperasi Jasa.

2. Mensetting ulang jenis usaha Koperasi Kelurahan di sesuaikan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, kemudian mengarahkan dibidang usaha apa yang akan dilakukan oleh Koperasi kelurahan dan disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah masing-masing Desa/Kelurahan.
3. Koperasi Kelurahan menerapkan Sistem OVOP (One Village One Product) Satu Desa/Kelurahan satu Produk, dengan diarahkan oleh Kepala Kelurahan/Desa, misalkan Potensi di Kelurahan Muktisari mayoritas adalah petani ikan gurame dan ikan lele sangkuriang, itu berarti jenis usaha koperasinya adalah Koperasi Produksi Perikanan, jadi Fokus satu produk perikanan yang paling dominan di Kelurahan Muktisari. Walaupun ada komoditas yang lain misalnya ada potensi pertanian, namun tetap yang paling di unggulkan adalah sektor perikanan.
4. Koperasi Kelurahan di rubah atau di setting menjadi koperasi konsumen dengan konsep UKM Mart/ AGRO MART. Dimana dalam konsep AGRO MART tersebut menyediakan kebutuhan masyarakat di sekitar kelurahan baik itu Produk UKM ataupun Produk Pertanian.

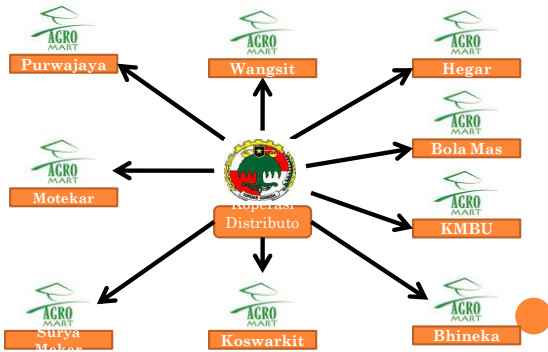
## KOPERASI PRODUSEN



## KOPERASI KONSUMEN



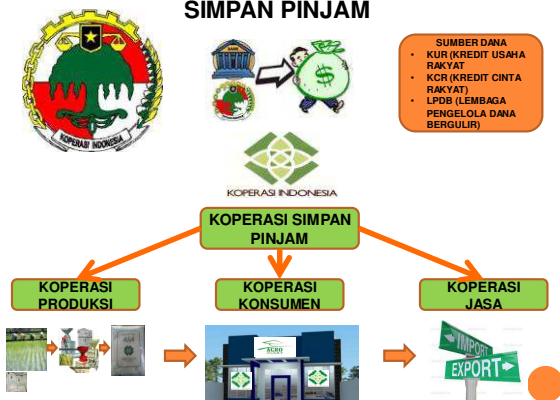
**Konsep Pemikiran**



**KOPERASI JASA**



**SIMPAN PINJAM**



**C. Sektor Pemerintah Kota Banjar**

Mengumpulkan Dinas-dinas/OPD yang terkait dengan Agropholytan. Sebetulnya setiap OPD saling berkaitan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Berikut Dinas-dinas/OPD yang terkait dengan Konsep Agropholytan, beserta Tugas pokok dan fungsinya :

1. Dinas Pertanian : Sudah tentu sebagai Objek dari pertanian, fokus ruang lingkupnya adalah pembinaan **pertanian, peternakan dan perikanan**.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi : Objeknya fokus terhadap pembinaan **Agro Industri, Lelang Agro, dan Koperasi**.
3. Dinas Lingkungan Hidup : Objeknya adalah pengelolaan sampah bersifat komunal, fokus **Produksi Kompos** yang ada di TPA/TPS, sampah di kelola kemudian diolah menjadi kompos, dan menyuplai pupuk kompos kesetiap petani atau Koperasi Petani di Kota Banjar.
4. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata : Objeknya adalah **Pembinaan Pemuda/pemudi untuk di arahkan menjadi pelaku pertanian, baik menjadi petani langsung ataupun sebagai pelaku Agro Bisnisnya**. Karena permasalahannya usia produktif petani sudah pada batas waktu usia non-produktif (sudah tua). Serta membangun infrastruktur di **sektor Pariwisata berbasis Agro Wisata**
5. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja : Objeknya adalah hampir sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yaitu fokus **mengarahkan pencari pekerjaan untuk di arahkan ke sektor pertanian**, karena penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 60% bisa mengurangi angka pengangguran.

6. Dinas Pekerjaan Umum : Objeknya adalah membangun infrastruktur sekunder, primer dan tersier, untuk wilayah sektor agro.
7. Dinas Kesbanglimnas : Objeknya adalah **mengarahkan setiap Kelurahan/Desa untuk menerapkan konsep Agropholitan** disesuaikan dengan potensi usaha Koperasi yang ada di Wilayah Kelurahan/Desa masing-masing.
8. BPMPT : Objeknya adalah memberikan dan mempermudah pelayanan perijinan kepada pelaku usaha baik UKM ataupun Koperasi.
9. BKKBN : Objeknya adalah membina **keluarga petani produktif untuk ber-KB**, dengan tujuan untuk kesejahteraan keluarga para petani.
10. Dinas Kesehatan : Objeknya adalah fokus lebih mengutamakan **pembinaan kesehatan kepada para petani**.
11. BAPPEDA : Objeknya adalah merancang **Masterplan Agropolitan**

## ANALISIS SWOT

1. Strength, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Revitalisasi Koperasi dimana dianjurkan dan diarahkan jenis usaha koperasi untuk bergerak di bidang sektor riil.
2. Weakness, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini. Belum semua secara keseluruhan koperasi di Kota Banjar yang jenis usahanya pada bidang sektor riil, kebanyakan usaha koperasinya adalah simpan pinjam.
3. Opportunity, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Koperasi di Kota Banjar berpeluang untuk bergerak dibidang sektor riil dengan didukungnya infrastruktur yang memadai di Kota Banjar.
4. Threat, adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Dengan diberlakukannya Masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015 tentunya menjadi ancaman bagi koperasi yang belum mempersiapkan kelembagaan ataupun usaha koperasi di bidang sektor riil.



HATUR NUHUN ...!!!